



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan hidayah-Nya semata, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2018 telah dapat diselesaikan sebagai salah satu kewajiban kami selaku kepala SKPD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, bahwa Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja SKPD (renja SOPD) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rencana Kerja (RENJA) ini memuat unsur-unsur evaluasi kinerja serta analisis pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2016 dan perkiraan 2017 serta Rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2018 yang bersinergi dengan penyusunan Rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, Rancangan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018 serta Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 .

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati untuk lebih sempurnanya penulisan ini, kiranya dapat diberikan sumbang - saran positif dari berbagai pihak.

Akhirnya, mudah - mudahan Renja ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2018 serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2018.

Bukittinggi, _____ 2017
1438 H

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI**

dto

Ir. OKTAVIANUS, MT
Nip. 19631030 199202 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2018	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1.1
1.2. Landasan Hukum	1.2
1.3. Maksud dan Tujuan	1.4
1.4. Sistematika Penulisan	1.4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2016	2.1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 201 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021	2.1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum	2.11
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum	2.14
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bukittinggi	2.15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat	2.16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2016	3.1
3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	3.1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2018	3.2
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2018	3.5
BAB IV PENUTUP	4.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, bahwa Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja SKPD (renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2018 terjadi beberapa perubahan landasan yuridis yang cukup mendasar diantaranya acuan RPJMD dan Renstra yang berpedoman kepada visi misi kepala daerah terpilih periode 2016-2021 serta perubahan urusan yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan yang terkait pekerjaan umum, perumahan permukiman dan penataan ruang serta perencanaan pembangunan berubah menjadi pekerjaan umum, penataan ruang serta pertahanan .

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

- **Pendekatan teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah berdasarkan pengolahan data dan informasi serta tetap mengacu kepada rancangan awal RKPD, rancangan Renstra, serta rancangan RPJMD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja.
- **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam menselaraskan hasil Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, Kecamatan dan juga kota serta musrenbang Propinsi Sumatera Barat dan juga nasional.
- **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih serta kebijakan dan program prioritasnya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** dimana hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, Kecamatan, kota, provinsi, hingga nasional.

Dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana telah diuraikan diatas dilakukan perumusan tujuan dan sasaran untuk melahirkan program dan kegiatan dengan indikator kinerja serta dana indikatif yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bukittinggi dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanian.

Hasil penyusunan program/kegiatan akan disinkronkan dengan kebijakan prioritas dan program/kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi sebagai bentuk sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan nasional.

1.2. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar DalamLingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 126, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2010, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- r. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- s. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
- t. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
- u. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
- v. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
- w. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2012-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 tahun 2011);
- x. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
- y. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017;
- z. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017;
- aa. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2018;
- bb. Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Nomor 37/DPUPR/VII/2017 Tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016-2021;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah untuk memberikan gambaran mengenai Kebijakan, Program dan Kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi pada tahun 2018 serta perkiraan maju untuk Tahun 2019.

Secara khusus Rencana Kerja ini mempunyai Tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi berdasarkan Renstra Dinas untuk melaksanakan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi.
4. Menyediakan informasi dan gambaran pelaksanaan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi serta indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Penyampaian dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2018 mulai dari pengolahan data/ informasi, analisis dan perumusan Program/Kegiatan dalam bentuk dokumen mengacu kepada Lampiran 6 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Penyajian rencana kerja (RENJA) dimaksud , disusun menurut sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan.
- BAB II Evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD hal-hal dan capaian Renstra DKPD, Analisis Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal SKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.
- BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang Terdiri dari telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan.
- BAB IV Penutup.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi yang merupakan amanat dari Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijaksanaan teknis bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan.
- b) Pelaksanaan kebijaksanaan teknis bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan.
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d) Pelaksanaan administrasi dinas dan
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Analisis Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2016 sesuai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2016 terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1
CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2016

Sasaran		Rencana Tingkat Capaian	Realisasi (%)	Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Ket.
URAIAN	Indikator Sasaran				
1	2	3	4	5	6
Urusan Wajib Pekerjaan Umum					
1 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi jaringan jalan dan trotoar di dalam sistem transportasi yang mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan	Porsentase/panjang jaringan lampu jalan, jalan, dan jembatan serta trotoar yang berkondisi mantap	80,40	57,63	71,68%	Dari Masukan
		80,40	61,42	76,40%	Dari Keluaran

Sasaran		Rencana Tingkat Capaian	Realisasi (%)	Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Ket.
URAIAN	Indikator Sasaran				
kapasitas jalan dalam upaya peningkatan perekonomian/kesejahteraan					
2 Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi melalui pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.	Porsentase/Luas jaringan irigasi yang berkondisi mantap.	95.71	47,38	49,50%	Dari Masukan
		95.71	54,29	56,72%	Dari Keluaran
3 Meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung mengurangi luas dan lama genangan.	Porsentase/ panjang drainase, talub/turab/bronjong yang berkondisi mantap.	98,33	75.23	76,51%	Dari Masukan
		98,33	84,86	86,30%	Dari Keluaran
4 Meningkatnya efektifitas gedung negara, rumah dinas, bangunan umum dan lingkungan dalam upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat	Porsentase/jumlah gedung negara, rumah dinas, bangunan umum dan lingkungan yang berkondisi mantap	100,00	91,83	91,83%	Dari Masukan
		100,00	100,00	100,00%	Dari Keluaran
Urusan Wajib Perumahan					
5 Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana berbasis masyarakat.	Porsentase/Jumlah infrastruktur dasar yang disediakan pada kawasan permukiman	96,55	59,47	61,59%	Dari Masukan
		96,55	67,28	69,69%	Dari Keluaran
Urusan Wajib Penataan Ruang					

Sasaran		Rencana Tingkat Capaian	Realisasi (%)	Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Ket.	
URAIAN	Indikator Sasaran					
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengurangan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan, dengan pemahaman serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai amanat (perda) RTRW Kota Bukittinggi.	Perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai amanat (perda) RTRW/struktur dan pola ruang Kota Bukittinggi.	89,29	37,76	42,30%	Dari Masukan
			89,29	58.87	65,93%	Dari Keluaran
TOTAL			93,38	61,55	65,91%	* Dari Masukan
			93,38	71,12	76,16%	* Dari Keluaran

Sumber: Hasil Analisis Rata-rata capaian

Dari tabel Capaian kinerja DPU tahun 2016 diatas jika dilihat secara keseluruhan capaian kinerja DPU dari sisi masukan rata-rata hanya sebesar 65,91% dengan predikat kurang baik, namun jika dilihat dari sisi keluaran kegiatan capaian kinerja DPU tahun 2016 mencapai 76,16% dengan predikat sedang. Secara umum rendahnya realisasi kegiatan dan keuangan disebabkan oleh banyaknya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di Perubahan APBD seperti sisa – sisa DAK tahun berjalan lokasi yang tidak bebas, lokasi berada di fasilitas umum, dan beberapa kegiatan juga gagal lelang karena tidak adanya penawaran terhadap kegiatan tersebut.

Secara rinci pencapaian sasaran masing-masing urusan ditunjang oleh pencapaian program dan kegiatan sesuai dengan tingkat pencapaian indikator output masing-masing kegiatan. Capaian kinerja pada tingkat program dan kegiatan untuk Tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016

KODE				URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA				PERMASALAH AN
					INDIKATOR KELUARAN	TARGET	REALISASI	%	
1				2	3	4	5	6	7
C				BELANJA LANGSUNG					
1	03			URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM					
1	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	03	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat (materai, perangko dan fax)	1 Tahun (materai 3000 : 100, materai 6000 : 600, perangko dan fax)	1 Tahun (materai 3000 : 100, materai 6000 : 600, perangko dan fax)	100%	sesuai kebutuhan
1	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan/pembayaran Jasa Komunikasi (telpon), Air dan Listrik Kantor dan Listrik PJU	1 Tahun	1 Tahun	100%	sesuai kebutuhan
1	03	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan/service dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional, alat berat, BBM, dan pengecatan menunjang kelancaran tugas kantor	1 Paket (4 minibus, 7 Pickup, 6 truck, 24 spd mtr)	1 Paket (4 minibus, 7 Pickup, 6 truck, 24 spd mtr)	100%	sesuai kebutuhan
1	03	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksanya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4 Orang	4 Orang	100%	sesuai kebutuhan
1	03	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22 Komputer, 32 Laptop, dan 32 Printer	22 Komputer, 32 Laptop, dan 32 Printer	100%	
1	03	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	72 item	72 item	100%	sesuai kebutuhan
1	03	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36 item barang cetak dan 166.725 lembar photocopy	36 item barang cetak dan 166.725 lembar photocopy	100%	sesuai kebutuhan
1	03	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 item	20 item	100%	sesuai kebutuhan
1	03	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	1152 porsi makan, 812 porsi snack	1152 porsi makan, 812 porsi snack	100%	sesuai kebutuhan
1	03	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultansi, Sosialisasi, dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Terlaksana Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Keluar Kota Bukittinggi	1 Tahun	1 Tahun	100%	sesuai kebutuhan
1	03	01	21	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor DPU (Satpam)	4 org Satpam	4 org Satpam	100%	

KODE				URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA				PERMASALAH AN
					INDIKATOR KELUARAN	TARGET	REALISASI	%	
1				2	3	4	5	6	7
1	'03	01	28	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terlaksananya Pembayaran Jasa Pegawai Non PNS + BPJS	60 org	60 org	100%	
1	'03	01	31	Pelaksanaan Proses Adminsitrtasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya Pembayaran Honorarium PPK, PPHP dan Pejabat Pengadaan, Peneliti Kontrak	121 paket pekerjaan	121 paket pekerjaan	100%	sesuai honorarium yang dibutuhkan
1	'03	01	34	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Terlaksananya Pembayaran Honorarium PTK , Perencana Keg. Swakelola, Pelaksana Keg. Swakelola, Pengawas Keg. Swakelola, dan Pengelola Administrasi Kegiatan	121 paket pekerjaan	121 paket pekerjaan	100%	sesuai honorarium yang dibutuhkan
1	'03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1	'03	02	03	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Pembangunan/Rehabilitasi/Lanjutan pembangunan Kantor Dinas PU + Interior dan Landscape dapat terlaksana	5 unit	5 unit	100%	
1	'03	02	09	Pengadaan Peralatan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor (komputer dan printer)	4 unit komputer, 5 unit printer	4 unit komputer, 5 unit printer	100%	
1	'03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
1	'03	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Serta Kelengkapannya	145 stel	132 stel	100%	
1	'03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
1	'03	06	05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya Dokumen Renja SKPD Tahun 2017	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	sesuai kebutuhan
1	'03	06	07	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danlkhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100%	sesuai kebutuhan
1	'03	06	17	Penyusunan RENSTRA SKPD Tahun 2010-2015	Terlaksananya Penyusunan RENSTRA SKPD Tahun 2015-2020	-	-	-	
1	'03	06	19	Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Prognosis 6 Bulan berikutnya	Tersedianya Laporan keuangan dan prognosis 6 Bulan	6 laporan	6 laporan	100%	
1	'03	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					
1	'03	15	01	Peningkatan Trotoar	Terlaksananya Peningkatan Terotoar	1 paket (1000 M')	1 paket (1000 M')	100%	
1	'03	15	02	Pembangunan Trotoar	Terlaksananya Pembangunan Terotoar	7 paket	7 paket	100%	

KODE				URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA				PERMASALAHAN
					INDIKATOR KELUARAN	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	'03	15	03	Peningkatan Jalan Dalam Kota	Terlaksananya Peningkatan Jalan Dalam Kota	1 paket (400M)	1 paket (400M)	100%	
1	'03	15	04	Pembangunan Jalan Dalam Kota	Terlaksananya Pembangunan Jalan Dalam Kota	400 M'	400 M'		
1	'03	15	05	Pembangunan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan Jembatan	3 paket	3 paket	100%	
1	'03	17		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong					
1	'03	17	01	Pemasangan Batu Bronjong	Terlaksananya Pemasangan Batu Bronjong	50 M'	50 M'	100%	
1	'03	17	02	Pemasangan / Pembangunan Dam	Terlaksananya pemasangan/pembangunan Dam	1175 M'	1175 M'	100%	
1	'03	18		Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan					
1	'03	18	01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Rutin Jalan Dalam Kota	180.17 Km	180.17 Km	100%	
1	'03	18	02	Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan dalam Kota	31 buah	31 buah	100%	
1	'03	18	03	Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Trotoar dalam Kota	22,346 Km	22,346 Km	100%	
1	'03	20		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah					
1	'03	20	02	Penyusunan DED Pengembangan SPAM Ngarai Sianok	Tersedianya dokumen DED Pengembangan SPAM Ngarai Sianok	1 paket	1 paket	100%	
1	'03	20	04	Pemberdayaan Sanitasi	Terlaksananya proses pemberdayaan + penyediaan tenaga fasilitator lapangan (TFL)	4 orang TFL + 14 Kegiatan	4 orang TFL + 14 Kegiatan	100%	
1	'03	20	05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum (DAK 2016)	Terlaksananya DAK Bidang Infrastruktur Air Minum (DAK 2016)/pemasangan pipa	588 HDPE + 618 PVC	588 HDPE + 618 PVC	100%	
1	'03	20	06	DAK Bidang Sanitasi (DAK 2016)	Terlaksananya DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi (DAK 2016) – Pembuatan Septic Tank	4 Paket	4 Paket	100%	
1	'03	20	07	Pembuatan Sumur Bor Air Bersih	Terlaksananya pembuatan sumur bor	1 paket (50 Meter)	1 paket (50 Meter)	100%	
1	'03	20	08	Pendampingan Kegiatan DAK Bidang Air Minum (DAK 2016)	Terlaksananya pendampingan Kegiatan DAK Bidang Air Minum (DAK 2016)/Pemasangan pipa	1 Paket	1 Paket	100%	
1	'03	20	09	Pendampingan Kegiatan DAK Bidang Sanitasi (DAK 2016)	Terlaksananya Pendampingan Kegiatan DAK Bidang Sanitasi (DAK 2016) – Pembuatan septictank	4 Septictank	4 Septictank	100%	

KODE				URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA				PERMASALAH AN
					INDIKATOR KELUARAN	TARGET	REALISASI	%	
1				2	3	4	5	6	7
1	'03	21		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					
1	'03	21	01	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Lampu PJU	3000 titik	3000 titik	100%	
1	'03	21	02	Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Terlaksananya Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	45 titik	45 titik	100%	
1	'03	21	03	Event-Event Daerah dan Nasional	Terlaksananya penunjang event daerah/nasional	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	
1	'03	21	04	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terlaksananya Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di TMP	7000 M2	7000 M2	100%	
1	'03	21	05	Penyusunan Perwako (RTH) dan RTNH	Terlaksananya Penyusunan Perwako (RTH) dan RTNH	2 Perwako (RTH dan RTNH)	2 Perwako (RTH dan RTNH)	100%	
1	'03	21	06	Penyusunan RTBL Kawasan Strategis	Terlaksananya Penyusunan RTBL Kawasan Prioritas Kota Pusaka Bukittinggi	1 kawasan	1 kawasan	100%	
1	'03	22		Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum					
1	'03	22	01	Rehab Balai Pemuda	Terlaksananya Rehab Balai Pemuda Campago Ipuah	100 M2	100 M2	100%	
1	'03	22	02	Pembangunan Gapura / Gerbang	Terlaksananya Pembangunan Gapura / Gerbang	5 lokasi	5 lokasi	100%	
1	'03	22	04	Rehab Kantor Lurah	Terlaksananya rehab kantor lurah Tengah Sawah	1 paket	1 paket	100%	
1	'03	22	05	Review Revitalisasi Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Aur Tajung Kang	Tersusunnya dokumen Review Revitalisasi Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Aur Tajung Kang	1 Paket	1 Paket	100%	
1	'03	22	06	Perencanaan Pembangunan Pasar Penampungan Pedagang Pasar Bawah	Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Pasar Penampungan Pedagang Pasar Bawah	1 Paket	1 Paket	100%	
1	'03	22	07	Pembangunan Posyandu	Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Posyandu	1 paket	1 paket	100%	
1	'03	22	08	Pembangunan Kantor Lurah	Terlaksananya Pembangunan Kantor Lurah	4 Kantor Lurah (1344 M2)	4 Kantor Lurah (1344 M2)	100%	
1	'03	23		Program Pengaturan Jasa Konstruksi					
1	'03	23	01	Pendamping Kegiatan P2KP	Terlaksananya Pendampingan P2KP	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	
1	'03	23	02	Pendampingan kegiatan BSPS	Terlaksananya Pendamping Kegiatan BSPS	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	
1	'03	23	03	Pembinaan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pembinaan terhadap pelaku usaha Jasa Konstruksi			100%	

KODE				URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA				PERMASALAH AN
					INDIKATOR KELUARAN	TARGET	REALISASI	%	
1				2	3	4	5	6	7
1	'03	25		Program Pengendalian Banjir					
1	'03	25	01	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	Terlaksananya Pengendalian Banjir	9,831 Km	9,831 Km	100%	sesuai kebutuhan
1	'03	25	03	Pembuatan Sumur Resapan untuk Penanggulangan Banjir	Terlaksananya Pembuatan Sumur Resapan untuk Penanggulangan Banjir	1 paket	1 paket	100%	
1	'03	26		Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur					
1	'03	26	01	Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD Dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	Terlaksananya Dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD Dengan Nilai Kecil dari 100 Juta	130 paket	130 paket	100%	
1	'03	26	02	Penyediaan basis data dan informasi infrastruktur perkotaan	Tersedianya dokumen basis data dan informasi perkotaan	1 dokumen (24 kelurahan)	1 dokumen (24 kelurahan)	100%	
1	'03	26	03	Revisi Masterplan Drainase Kota Bukittinggi	Tersedianya Revisi Masterplan Drainase Kota Bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen	100%	
1	'03	26	04	Penyusunan Jakstrada Kota Bukittinggi	Tersedianya dokumen Jakstrada Kota Bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen	100%	
1	'03	26	05	Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Terlaksananya Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	1 dokumen per Triwulan	1 dokumen per Triwulan	100%	
1	'03	26	06	Operasional Perda Bangunan Gedung	Terlaksananya Operasional Perda Bangunan Gedung	3 TABG, 15 SLF sederhana dan 3 SLF Non sederhana	3 TABG, 15 SLF sederhana dan 3 SLF Non sederhana	100%	
1	'03	26	07	Aktualisasi Data Jalan Kota Bukittinggi	Tersedianya Dokumen Aktualisasi Data Jalan Kota Bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen		
1	04			URUSAN WAJIB PERUMAHAN					
1	04	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan					
1	'04	16	02	Peningkatan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	Terlaksananya Peningkatan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	16 paket	16 paket	100%	
1	'04	16	03	Pembangunan Riol	Terlaksananya Pembangunan Riol	3 Paket	3 Paket	100%	
1	'04	16	04	Rehab/Peningkatan Riol	Terlaksananya rehab/peningkatan riol	1 Paket	1 Paket	100%	
1	'04	16	04	DAK Perumahan dan Pemukiman (DAK 2015)	Terwujudnya DAK Perumahan dan Pemukiman (DAK 2015)	1 Paket	1 Paket	100%	
1	05			URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG					
1	05	15		Program Perencanaan Tata Ruang					
1	'05	15	02	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Terlaksananya Pembuatan Keterangan Rencana Kota	350 PKRK	350 PKRK	100%	

KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN			TOLOK UKUR KINERJA				PERMASALAHAN
				INDIKATOR KELUARAN	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7		
1 '05 15 03	Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Terlaksananya Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	50 sertifikat	50 sertifikat	100%			
1 '05 15 04	Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Terlaksananya Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	2 perda	2 perda	100%			
1 '05 15 07	Pengadaan cetak peta tata ruang	Tersedianya cetak peta tata ruang	1 peta	1 peta	100%			
1 '05 15 08	Pendataan Bangunan	Tersedianya Dokumen Pendataan Bangunan	1 dokumen	1 dokumen	100%			
1 05 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang							
1 '05 17 01	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	1 tahun monitoring + pengaduan masyarakat	1 tahun monitoring + pengaduan masyarakat	100%	sesuai kebutuhan		
1 '05 17 02	Audit Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Audit ketaatan Pemanfaatan Ruang terhadap dokumen tata ruang	1 dokumen RTRW	1 dokumen RTRW	100%			
1 06	URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
1 06 16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah							
1 '06 16 22	Pendamping Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Bukittinggi	Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Bukittinggi	1 perda RTRW dan 2 Perda RDTR terdampingi	1 perda RTRW dan 2 Perda RDTR terdampingi	100%	sesuai kebutuhan		
1 '06 16 23	DED Pembangunan RSUD Bukittinggi	Terwujudnya penyusunan DED Pembangunan RSUD Bukittinggi	1 paket/1 dokumen	0	100%	Gagal tender		
1 '06 16 24	DED Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi	Terlaksananya Penyusunan DED Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen	100%			
	GRAND TOTAL BELANJA LANGSUNG							

Dari segi realisasi keuangan realisasi belanja Dinas pekerjaan Umum Pada Tahun 2016 secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2015) dimana persentase realisasi adalah menurun dari tahun 2015 yang hanya 68,15%. Untuk belanja tidak langsung terealisasi 96,35% dan belanja langsung 66,44% yang menurun dari Tahun 2015 yaitu sebesar 68,36%.

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Keuangan DPU Tahun 2016

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PORSENTASE
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
5	BELANJA DAERAH	111.257.785.914,36	75.821.014.621,00	68,15
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.353.148.015,36	6.121.139.265,00	96,35
2.1.1	Belanja Pegawai	6.353.148.015,36	6.121.139.265,00	96,35
2.2	BELANJA LANGSUNG	104.904.637.899	69.699.875.356	66,44
2.2.2	Belanja Pegawai	2.451.606.500,00	1.942.931.000,00	79,25
2.2.3	Belanja Barang dan Jasa	38.672.999.674,00	25.789.163.680,00	66,69
2.2.4	Belanja Modal	63.780.031.725,00	41.967.780.676,00	65,80

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2015 yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam **lampiran 1** Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2017 ini.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan bagian dari sistem perencanaan Kota Bukittinggi yang tidak terlepas dari sistem perencanaan pembangunan nasional dimana diperlukan sinergitas dalam pencapaian prioritas pembangunan antara daerah/kota dengan prioritas provinsi dan nasional. Komitmen ini terlihat dari penerapan Standar Pelayanan Minimal yang harus dilakukan oleh daerah sesuai dengan target minimal IKK yang harus dicapai dalam kurun waktu penerapan.

Profil pemenuhan pencapaian/kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mengalami perubahan standar yang semula diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2010 direvisi dengan Peraturan Menteri No.01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Disamping itu terkait dengan pelaksanaan pelayanan bidang perumahan rakyat diatur dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M.2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dimana ditetapkan 2 (dua) jenis pelayanan dasar skala Kabupaten/Kota, yaitu Rumah layak huni dan terjangkau; serta lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

Untuk mengukur/menganalisis capaian kinerja pelayanan minimal yang terkait Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan laporan SPM dimaksud dapat diuraikan berikut:

1. Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- a. **Pelayanan Sumber Daya Air;** Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat
 - 1) Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

Tersedianya kapasitas sumber daya air yang dimiliki PDAM Kota Bukittinggi Tahun 2012 untuk melayani 80% jumlah penduduk administratif sebagaimana target MDGs yaitu 90.855 jiwa, adalah sebesar 199 lt/detik. Sedangkan kapasitas sumber daya air yang seharusnya dimiliki untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduk adalah 274 lt/detik. Capaian ini didapat dari adanya ketersediaan air pada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Guguk Panjang, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan Kecamatan Mandiagin Koto Salayan.

- 2) Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sampai tahun 2014 sebesar 458 lt/dtk atau 99,56%. Dengan target 100% capaian kinerja indikator ini termasuk kategori sangat berhasil. Untuk luas areal realisasi tanam di Kota Bukittinggi merupakan tugas, pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian.

b. Pelayanan Jalan;

▪ Jaringan :

- 1) Aksesibilitas :

Pada tahun 2015, tidak ada rencana penambahan ruas jalan baru. Panjang jalan eksisting yang ada hingga tahun 2015 ini sepanjang 194,22 kilometer. Jika dibandingkan dari tahun 2011 hingga 2015 tidak terjadi penambahan ruas jalan yang menghubungkan seluruh pusat kegiatan. Hal ini disebabkan Kota Bukittinggi tidak ada rencana penambahan ruas jalan, dan hanya menganggarkan perbaikan, peningkatan ataupun rehabilitasi jalan yang ada.

- 2) Mobilitas :

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan. Target pada tahun 2015 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi adalah 80% dan realisasi sebesar 71,34%. Realisasi ini sama dari tahun 2010, hal ini disebabkan tidak terjadi penambahan ruas jalan selama tahun tersebut.

- 3) Keselamatan :

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. Target capaian sesuai dengan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi pada tahun 2015 adalah 80% dan realisasi sebesar 80,22%. target tersebut dapat terealisasi karena banyaknya kegiatan yang dilakukan berupa perbaikan dan rehabilitasi ruas jalan yang ada. Dari total ruas jalan 194,22 km yang menghubungkan seluruh pusat kegiatan yang ada di Bukittinggi, 155,8 km telah memenuhi persyaratan administrasi teknis dan laik fungsi.

▪ Ruas :

- 1) Kondisi Jalan :

Kondisi jalan ditentukan oleh kondisi kerataan permukaan perkerasan jalan yang harus dicapai sesuai dengan nilai kerataan perkerasan jalan. Kondisi jalan ini harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman.

Target capaian sesuai dengan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi pada tahun 2015 adalah 80% dan realisasi sebesar 80,22%. Target tersebut

dapat terealisasi karena banyaknya kegiatan yang dilakukan berupa perbaikan dan rehabilitasi ruas jalan yang ada. Dari total ruas jalan 194,22 km yang menghubungkan seluruh pusat kegiatan yang ada di Bukittinggi, 155,8 km panjang ruas jalan yang memenuhi kriteria kondisi jalan. Panjang ruas jalan yang memenuhi kriteria kondisi jalan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan.

2) Kecepatan :

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana. Kriteria kecepatan ini adalah bahwa setiap ruas jalan telah terbangun sesuai dengan kecepatan rencananya. Nilai SPM berdasarkan prosentase panjang jalan yang memenuhi kriteria kecepatan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah.

Target capaian sesuai dengan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi pada tahun 2015 adalah 80% dan realisasi sebesar 80,22%. Target tersebut dapat terealisasi karena banyaknya kegiatan yang dilakukan berupa perbaikan dan rehabilitasi ruas jalan yang ada. Dari total ruas jalan 194,22 km yang menghubungkan seluruh pusat kegiatan yang ada di Bukittinggi, 155,8 km panjang ruas jalan yang memenuhi kriteria kecepatan jalan. Panjang ruas jalan yang memenuhi kriteria kecepatan jalan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan

c. Pelayanan Air Minum

Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Pada pelayanan air minum dengan jaringan perpipaan, untuk tahun 2015 jumlah penduduk Kota Bukittinggi adalah sebesar 120.491 jiwa. Jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum yang aman pada tahun 2016 adalah 53.076 jiwa sesuai dengan target 43% yang tercantum dalam Dokumen SPAM.

d. Pelayanan Penyehatan Lingkungan (Sanitasi Lingkungan)

1) Air Limbah Permukiman

- Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Sistem pembuangan air limbah setempat merupakan sistem pembuangan air limbah secara individual yang dioleh dan dibuang di tempat, yang meliputi cubluk, tangki septik dan resapan dan sistem setempat lainnya, sarana pengangkutan dan pengolahan akhir lumpur tinja.

Target capaian jumlah infrastruktur dasar yang disediakan pada kawasan permukiman pada tahun 2015 adalah 89% dan realisasi 82%. Realisasi dari tahun 2011 hingga 2015 tidak terjadi peningkatan karena Kota Bukittinggi belum memiliki unit pengolahan tinja atau IPLT. Begitupun juga dengan kendaraan operasional, masyarakat Bukittinggi masih mengandalkan kendaraan operasional dari pihak swasta.

- Tersedianya sistem air limbah skala komunitas / kawasan / kota

Tersedianya sistem air limbah skala komunitas / kawasan / kota untuk indikator ini dilaksanakan dengan Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Sanitasi Lingkungan yang dilaksanakan dari tahun 2009 sampai sekarang. Kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan MCK untuk kapasitas 20-25 KK. Sedangkan untuk sistem air limbah skala kawasan atau kota Kota Bukittinggi baru melakukan kegiatan pembangunan pada tahun 2013 yang berlokasi pada kelurahan Belakang Balok. Sesuai dengan rencana strategi Dinas Pekerjaan Umum 2010-2015 target infrastruktur dasar yang disediakan pada kawasan permukiman adalah 89% pada tahun 2014.

2) Drainase

- Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi

- genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam), dan tidak lebih dari 2 kali setahun.

Sistem jaringan saluran-saluran air yang digunakan untuk pematusan air hujan, yang berfungsi menghindarkan genangan (inundation) yang berada dalam suatu kawasan atau dalam batas administratif kota. Definisi Operasional tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase, baik bersifat struktural yaitu pencapaian pembangunan fisik yang mengikuti pengembangan perkotaan, maupun bersifat non-struktural yaitu terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan drainase oleh pemerintah yang berupa fungsionalisasi institusi pengelola drainase dan penyediaan peraturan yang mendukung penyediaan dan pengelolaannya.

Target capaian prosentase atau panjang drainase, talub/turap/bronjong dan riol sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi pada tahun 2014 adalah 87%. Indikator ini dilaksanakan dengan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong dan peningkatan, pemeliharaan drainase.

e. Penataan Bangunan dan Lingkungan

1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

SPM Penataan Bangunan dan Lingkungan (IMB) bertujuan untuk meningkatnya jumlah bangunan gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) di kabupaten/kota untuk memenuhi ketentuan administratif dan ketentuan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya guna mewujudkan bangunan yang andal serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Pengurusan IMB mulai tahun 2008 telah diserahkan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan pada tahun 2014 menjadi Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) untuk menjalankan amanat perizinan satu pintu. Data jumlah IMB yang telah diterbitkan oleh BP2TPM pada tahun 2016 adalah 433 izin, sedangkan rencana capaian jumlah bangunan gedung yang memiliki IMB tidak dimiliki oleh BP2TPM.

2) Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)

Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) harus tersedia di kabupaten/kota sehingga mendukung pencapaian sasaran penyelenggaraan bangunan gedung melalui penyediaan HSBGN yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Definisi

Operasional Harga Satuan Bangunan Gedung Negara merupakan biaya maksimum per-m² pelaksanaan konstruksi untuk pembangunan bangunan gedung negara khususnya untuk pekerjaan standar bangunan gedung negara yang ditetapkan secara berkala untuk setiap kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota setempat.

Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara di Kota Bukittinggi, indikator ini dilaksanakan dengan Penyusunan Buku Standart Harga Bangunan Negara yang dilakukan setiap tahunnya, sehingga realisasi 100%.

f. Jasa Konstruksi

1) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

IUJK diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan pada tahun 2014 menjadi Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) untuk menjalankan amanat perizinan satu pintu. Sesuai dengan SOP pada KPPT waktu penerbitan IUJK adalah 6 hari. Jumlah permohonan IUJK yang masuk sebanyak 35 izin atau realisasi 100%, dengan menerbitkan IUJK sebanyak 35 Izin.

2) Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Sistem informasi jasa konstruksi adalah sekumpulan komponen dari informasi mengenai jasa konstruksi yang saling terintegrasi untuk menyajikan data dan informasi mengenai jasa konstruksi. Hingga tahun 2015 Kota Bukittinggi belum memiliki Sistem Informasi Jasa Konstruksi, hal ini disebabkan belum adanya sumber daya manusia dan struktur organisasi yang jelas yang menjelaskan tugas dan fungsinya.

g. Penataan Ruang

1) Informasi Penataan Ruang

Indikator dari Informasi Penataan Ruang adalah tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang wilayah beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Informasi berupa Peta Analog dan Peta Digital adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan rencana rincinya dalam bentuk cetakan yang dapat digandakan, mudah diakses pada jam kerja, dan tanpa dipungut biaya. Informasi mengenai keberadaan Peta Analog dan Peta Digital disebarluaskan melalui berita di media massa. Peta analog dapat terdiri dari peta RTRW Kabupaten/Kota dan peta Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. peta analog harus memuat informasi rencana struktur dan pola ruang dengan skala minimal 1 : 50.000 (RTRW Kabupaten), 1 : 25.000 (RTRW Kota), dan 1: 5.000 (rencana rinci), yang dilengkapi dengan legenda peta.

Kota Bukittinggi pada tahun 2015 telah dilakukan penyusunan dokumen revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2010-2030. Karena revisi tersebut maka kegiatan ketersediaan peta analog belum dilakukan. Tetapi untuk mendukung SPM ini Kota Bukittinggi telah melaksanakan sebanyak 6 kegiatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan dan RTBL.

2) Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR

Pelibatan peran masyarakat berupa konsultasi publik dalam penyusunan rencana tata ruang dan program penataan ruang sebagai bentuk participatory planning yang memenuhi syarat inklusif dan mampu menjangkau aspirasi masyarakat.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan konsultasi publik untuk penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) khusus kawasan Aur Biugo Tigo Baleh, dan Konsultansi Publik untuk penyusunan Dokumen Revisi RTRW.

3) Izin Pemanfaatan Ruang

Indikator dari izin pemanfaatan ruang adalah terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya. Setiap Kabupaten/Kota diharapkan telah memiliki Perda RTRW Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya yang dilengkapi dengan peta, dan untuk kemudian dapat dijadikan dasar untuk pemberian izin pemanfaatan ruang.

Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan target Izin Pemanfaatan Ruang pada Tahun 2015 adalah 100%, dan realisasi yang didapatkan dari indikator tersebut sebesar 100%, dengan telah disahkannya Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Bukittinggi pada tahun 2011, sehingga pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang yang seharusnya berpedoman pada Peraturan Daerah, dapat dilaksanakan.

4) Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang

Indikatornya berupa terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Tindakan Awal Pengaduan Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang adalah suatu bentuk pelayanan yang responsif kepada masyarakat terhadap segala bentuk pengaduan atas pelanggaran di bidang penataan ruang, dengan melakukan tindakan awal paling lama 5 (lima) hari

Untuk merealisasikan SPM ini, kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Tata Ruang Seksi Pengawasan dan Pengendalian. Dari pengaduan yang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum, 80% dapat ditangani.

2. Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat.

a. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

SPM ini merupakan jumlah lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas yang meliputi jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih dan listrik yang memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja waktu tertentu. SPM ini merupakan perbandingan jumlah lingkungan yang didukung PSU dengan jumlah lingkungan perumahan.

Tabel 2.4

Profil Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s/d Tahun 2017.

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	2015	2016	Ket
			Indikator	Nilai				
I	Sumber Daya Air	Prioritas Utama penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat	1 Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	100%	2015	71.7%	71.7%	
			2 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	70%	2015	99.56	99.56	

No	Jenis Pelayanan Dasar			Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	2015	2016	Ket	
				Indikator	Nilai					
II	Jalan	Jaringan	Aksesbi litas	3	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	100%	2015	100.00	100.00	
			Mobilit as	4	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	100%	2015	71.51	71.51	
			Kesela matan	5	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60%	2015	80.22	80.22	
		Ruas	Kondisi Jalan	6	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	60%	2015	80.22	80.22	
			Kecepa tan	7	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60%	2015	80.22	80.22	
III	Air minum	Cluster Pelayanan		8	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari			38.91	38.91	
		Sangat buruk				40%	2015			
						50%				
						70%				
						80%				
						100%				
IV	Penyehatan Lingkungan (Sanitasi Lingkungan)	Air Limbah		9	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	60%	2015	82.39	82.39	
				10	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	5%	2015	0.00	0.00	
		Drainase		13.1	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	50%	2015	43.41	43.41	
				13.2	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50%	2015	37.08	37.08	
		V	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Izin Mendirikan Bangunan		15	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.	100%	2015	0
		Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)		16	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota	100%	2015	100	100	

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu Pencapaian	2015	2016	Ket
			Indikator	Nilai					
VI	Jasa Konstruksi	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	17	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100%	2015	100	100	
		Sistem Informasi Jasa Konstruksi	18	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100%	2015	0	0	belum tersedianya Sitem Informasi Jasa Kontruksi
VII	Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	19.1	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog	100%	2015 Kab. /Kota	0	0	Sedang dlm Revisi RTRW
					100%	2015 Kecamatan	0.00	0.00	Sedang dlm Revisi RTRW
					100%	2015 (Kelurahan)	0.00	0.00	Sedang dlm Revisi RTRW
			19.2	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital	100%	2015 Kab. /Kota	0.00	0.00	Sedang dlm Revisi RTRW
					100%	2015 Kecamatan	0.00	0.00	Sedang dlm Revisi RTRW
					100%	2015 (Kelurahan)	0.00	0.00	Sedang dlm Revisi RTRW
		Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR	20.1	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR	100%	2015	40	40	Perda RTRW telah disyahkan pada tahun 2011, tahun 2015 dalam penyusunan RDTR dan Revisi RTRW
			20.2	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan program pemanfaatan ruang.	100%	2015	60	60	Perda RTRW telah disyahkan pada tahun 2011, tahun 2015 dalam penyusunan RDTR dan Revisi RTRW
		Izin Pemanfaatan Ruang	21	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	100%	2015 (Kabupate n /Kota)	100	100	

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	2015	2016	Ket	
			Indikator	Nilai					
		Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang	22	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%	2015 (Kab. /Kota dan Kecamatan	73.13	73.13	

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image dan masyarakat (budaya). Sementara itu kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam penentuan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, dan efisiensi pemerintah. Berdasarkan word economic forum 2008-2009, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai merupakan penyumbang kedua sebagai faktor problematik dalam melakukan usaha setelah birokrasi pemerintah yang tidak efisien, dengan demikian maka tantangan pembangunan infrastruktur kedepan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing daerah dalam konteks regional dapat membaik.

Salah satu isu strategis yang dihadapi adalah bagaimana membangun infrastruktur yang dapat mengatasi berbagai permasalahan seperti kesenjangan pembangunan antara kawasan pusat kota dengan kawasan pinggiran kota, menguarai kemacetan di pusat Kota, penyediaan RTH dan mengatasi banjir/genangan di beberapa kawasan strategis Kota, dan penyediaan sarana dan prasarana air bersih.

Tantangan lainnya adalah berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang, dimana Kota Bukittinggi sebagai Kota yang mempunyai beragam fungsi mesti bisa menyelaraskan struktur dan pola ruang dengan rencana pembangunan infrastruktur kota yang diharapkan akan menciptakan keseimbangan lingkungan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi. Selain itu penyediaan infrastruktur bukan hanya untuk Penduduk Kota Bukittinggi namun juga untuk melayani masyarakat sekitarnya, karena faktanya terdapat peningkatan jumlah penduduk pada siang hari sekitar 3 s/d 4 kali lipat dari jumlah penduduk malam hari sebagai penduduk yang tercatat dalam administrasi Kota.

Menghadapi tantangan diatas maka diperlukan pendekatan pembangunan yang bersifat kewilayahan dan direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersediaan infrastruktur suatu wilayah agar infrastruktur pekerjaan umum dapat mendukung ekonomi kota secara efektif dan efisien. Tantangan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum kedepan juga erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 pilar pembangunan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Sehingga bagaimana pembangunan fisik, sosial dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan, yaitu bagaimana menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Isu lainnya adalah perlu adanya perhatian serius tahun kedepan adalah pentingnya seluruh aparatur ke PU an untuk terus meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas yang

disokong secara optimal oleh jajaran birokrasi melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas birokrasi dan mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima dan meningkatkan inovasi dalam ke PU an mulai dari perencanaan, pembangunan, pengawasan maupun pelaporan serta pemahaman yang kuat terhadap TUPOKSI masing-masing aparat.

Tantangan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan i

nfrastruktur di Kota Bukittinggi adalah kendala alamiah berupa wilayah geografis Kota yang hanya seluas 25,239 Km2 dengan luas potensial pembangunan hanya sebesar 80% (selebihnya kawasan lindung ngarai) serta karakter lahan yang pada umumnya dimiliki oleh kaum adat sehingga menjadi salah satu penyebab terhambatnya pembebasan lahan sehingga menjadi salah satu kendala dalam penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bukittinggi.

Sesuai dengan rancangan prioritas pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2017 yang mengacu kepada Rancangan RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021, terdapat 2 (dua) misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum saat ini.

SASARAN	INDIKATOR	2015	2021	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 3: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KOTA SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN					
Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan					
Fasilitas Sosial yang memenuhi standar lingkungan Pemenuhan target universal access (air minum)	% fasilitas sosial yang representative dan memenuhi standar lingkungan (Puskesmas, Sekolah, Pasar, Taman Rekreasi) 1. % air minum layak 2. % kawasan kumuh	70.50% 90,64%	90% 100%	1. Melengkapi sarana dan prasarana fasilitas sosial yang lebih representatif memenuhi standar lingkungan 2. Meningkatkan manajemen pengelolaan fasilitas sosial 3. pengembangan sistem air minum perpipaan	1. Melakukan kerjasama dengan instansi / dunia usaha 2. Menyiapkan regulasi yang mendukung pemenuhan sarana prasarana fasilitas sosial yang mendukung keindahan kota 3. Menyiapkan sistem pengelolaan fasilitas umum secara elektronik
					4. Meningkatkan kualitas jaringan pipa air bersih 5. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum 6. Meningkatkan sarana dan prasarana air minum yang aman dan sehat

SASARAN	INDIKATOR	2015	2021	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					7. Menyediakan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan
	% sanitasi layak	93,12%	100%	1. ketersediaan sarana prasarana sanitasi dasar, berupa drainase dan air limbah	1. mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase 2. memperkuat kelembagaan AMPL/ Pokja Sanitasi 3. mengembangkan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat 4. meningkatkan cakupan layanan air limbah melalui pembangunan perpipaan dan IPAL terpusat 5. mendorong pengolahan air limbah domestik permukiman melalui pembangunan IPAL Komunal dan IPLT standar lingkungan hidup 6. pemeliharaan sarana dan prasarana drainase 7. mengembangkan gerakan sungai bersih
Tujuan 2 : Meningkatkan penataan ruang kota					
Pengendalian pemanfaatan ruang kota	1. % pemanfaatan ruang kota sesuai RTRW 2. % pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan			1. pengembangan sistem informasi geo spasial 2. Optimalisasi penegakan PERDA tata ruang	1. menerapkan sistem informasi spasial berbasis web 2. Memaksimalkan peran dan fungsi PPNS 3. Pembentukan satgas pengendalian tata ruang

SASARAN	INDIKATOR	2015	2021	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 3 : Terwujudnya pelayanan lalin dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib lancar dan terpadu					
Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas	1. % jalan berkondisi baik	100%	100%	1. pengembangan prasarana jalan	1. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.

Sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa program dan kegiatan SKPD merupakan kompilasi dari mekanisme/prinsip perencanaan teknokratis, politis, top down dan bottom up. Mekanisme bottom up yang dilakukan berupa menjangking usulan dari masyarakat pada Musrenbang tahun 2017 sesuai wewenang dan tugas fungsi ke PU an. Proses penjangkingan usulan ini telah dilakukan secara berjenjang semenjak dari musrenbang kelurahan, kecamatan dan Kota dengan serangkaian diskusi dan tinjauan lapangan sehingga menghasilkan usulan yang benar-benar prioritas dan layak serta dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bukittinggi yang disejalkan dengan kebijakan politis kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta mensinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi serta dokumen-dokumen perencanaan nasional dan sektoral lainnya seperti RPIJM.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat tersebut setelah dilakukan berbagai proses penjangkingan dan pembahasan dikompilasikan kedalam program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang terakhir dirubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Kompilasi usulan program dan kegiatan dari masyarakat tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat

KODE									URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	KETERANGAN
1	'01	03	1	01	03	01	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
1	'01	03	1	01	03	01	15	01	Peningkatan Trotoar	
1	'01	03	1	01	03	01	15	02	Pembangunan Trotoar	
									Pembuatan bandar dan Trotoar Jl. Raya Tigo Baleh Depan Kantor Lurah sampai depan Masjid Jami' Kelurahan Pakan Labuah	Pakan Labuah / Dlm proses Identifikasi
									Pembuatan Trotoar RW II RT 3,9,5 di Kelurahan Kubu Gulai Bancah	Kubu Gulai Bancah / Dlm proses Identifikasi
1	'01	03	1	01	03	01	15	03	Peningkatan Jalan Dalam Kota	
								-	Peningkatan jalan aspal beton di Jl. Sertu Kamaruddin RT II RW I	Sapiran / Dlm proses Identifikasi
								-	Pengaspalan ulang jalan Prof. Hazairin RW I (simpang yarsi) s/d Jl. Kehakiman RW II (Mesjid Al Barkah Belakang Balok) Kelurahan Belakang Balok	Belakang Balok / Dlm proses Identifikasi
								-	Pengaspalan Jalan Kumango/depan soto H. Minah Kelurahan Benteng Pasar Atas	Benteng Pasar Atas / Dlm proses Identifikasi
								-	Pengaspalan ulang RT 02/RWII, RT 04/RW II, RT 01/RW III jangkak	Campago Ipuah / Dlm proses Identifikasi
								-	Pengaspalan Jalan Munggu Terapung RW 2 RT 4, 5,6 RW I RT 05 Kubu gulai bancah	Kubu gulai bancah / Dlm proses Identifikasi
								-	Pelebaran Jalan Flamboyan RT 04/RW 04 Kelurahan Campago Guguk Bulek	Campago Guguk Bulek / Dlm proses Identifikasi
								-	Rehabilitasi Jalan Kirab Remaja RT 02/RW 05 Kelurahan Puhun Tembok	Puhun Tembok / Dlm proses Identifikasi
1	'01	03	1	01	03	01	15	04	Pembangunan Jalan Dalam Kota	
								-	Pembangunan Jalan Dalam Kota	

								-	Pengaspalan Jalan Kantor DPRD	
								-	Pembuatan jalan ke SDN 13 Bukik Sangkuik RT 03 RW IV Kelurahan Bukit Apit Puhun	Bukit Apit Puhun / Dlm proses Identifikasi
								-	Rehab Jalan Dalam Kota	
1	'01	03	1	01	03	01	15	06	Pembangunan Jembatan	
								-	Pembangunan Box Culvert	
									Penyusunan DED Jalan 2 Jalur Jl. Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta	
1	'01	03	1	01	03	01	16		Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	
1	'01	03	1	01	03	01	16	01	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	
									- Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong (tersebar/dok. masterplan drainase	
									- Lanjutan Pembangunan Bandar dan Trotoar (dari RW V sampai ke RW IV depan Pasa Pagi Birugo) Kelurahan Birugo	Birugo/ Dlm proses Identifikasi
									- Pembangunan Pintu Air Permanen (Bandar Nagari) RT2, RW II Kelurahan Birugo	Birugo/ Dlm proses Identifikasi
									- Pembuatan bandar/drainase jalan bermawi dari simpang tigo baleh s/d depan mushalla nurul bilad kapalo koto Kelurahan Pakan Labuah	Pakan Labuah/ Dlm proses Identifikasi
									- Pembangunan Drainase RW II RT 4,5,6,7 RW I RT 9 Samping Mesjid Nurul Wathan Kelurahan Kubu Gulai Bancah	Gulai Bancah/ Dlm proses Identifikasi

									- Pembuatan drainase dari simpang Kapalo Kota ke Arah Tambuo	
									- Perbaikan saluran drainase dan gorong-gorong di jalan sumua ladang cakiah RT 03 RW 01	
									- Pembuatan sumur resapan di Komp. MTSN 2 Bukittinggi	
1	'01	03	1	01	03	01	16	02	Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota	
1	'01	03	1	01	03	01	16	03	Peningkatan Drainase	
1	'01	03	1	01	03	01	17		Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	
1	'01	03	1	01	03	01	17	01	Pemasangan Batu Bronjong/Dam Bangunan	
1	'01	03	1	01	03	01	17	02	Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan	
1	'01	03	1	01	03	01	18		Program rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
1	'01	03	1	01	03	01	18	01	Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	
1	'01	03	1	01	03	01	18	02	Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam kota	
1	'01	03	1	01	03	01	18	03	Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	
1	'01	03	1	01	03	01	22		Program Sistim Informasi / Data Base Jalan Jembatan	
1	'01	03	1	01	03	01	22	03	Leger Jalan Kota Bukittinggi	
1	'01	03	1	01	03	01	23		Program peningkatan sarana dan prasarana Kebinamargaan	
1	'01	03	1	01	03	01	23	01	Pengadaan alat-alat berat	
1	'01	03	1	01	03	01	23	02	Pemeliharaan Alat Berat	
1	'01	03	1	01	03	01	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan	

									Pengairan Lainnya	
1	'01	03	1	01	03	01	24	02	Rehab/ peningkatan Saluran Irigasi	
1	'01	03	1	01	03	01	24	03	Pemeliharaan Rutin Irigasi	
1	'01	03	1	01	03	01	24	04	Perencanaan DAK Irigasi	
1	'01	03	1	01	03	01	26		Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya	
1	'01	03	1	01	03	01	26	01	Normalisasi Sungai	
1	'01	03	1	01	03	01	27		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	
1	'01	03	1	01	03	01	27	11	Pembangunan Toilet Umum	
1	'01	03	1	01	03	01	27	11	Pembuatan Sumur Bor	
									Pemasangan pipa dan penampungan air (Pokir)	
1	'01	03	1	01	03	01	28		Program Pengendalian Banjir	
1	'01	03	1	01	03	01	28	01	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	
1	'01	03	1	01	03	01	31		Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	
1	'01	03	1	01	03	01	31	01	Event-Event Daerah dan Nasional	
1	'01	03	1	01	03	01	31	02	Pembangunan Kantor Lurah	
1	'01	03	1	01	03	01	31	03	Rehab Kantor Lurah	
1	'01	03	1	01	03	01	31	32	Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi (Lanjutan)	
1	'01	03	1	01	03	01	31	34	Rehab Gedung parkir Eks Gloria (Lanjutan)	
1	'01	03	1	01	03	01	31	35	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun I (Pertama)	
1	'01	03	1	01	03	01	31	35	Pembangunan Gapura	

1	'01	03	1	01	03	01	32		Program Pengelolaan Pembangunan Gedung	
1	'01	03	1	01	03	01	32	01	Operasionalisasi Perda Bangunan gedung	
1	'01	03	1	01	03	01	33		Program Pengelolaan Penerangan Lampu Jalan	
1	'01	03	1	01	03	01	33	01	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	
1	'01	03	1	01	03	01	33	02	Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	
1	'01	03	1	01	03	01	33	03	Revitalisasi Penerangan Jalan Umum	
1	'01	03	1	01	03	01	33	04	Pembayaran Listrik Rekening PJU	
1	'01	03	1	01	03	01	34		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	
1	'01	03	1	01	03	01	34	03	Pembinaan Jasa Konstruksi	
1	'01	03	1	01	03	01	34	04	Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	
				01	03	01	34	04	Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	
1	'01	03	1	01	03	01	36		Program Perencanaan Tata Ruang	
1	'01	03	1	01	03	01	36		Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi	
1	'01	03	1	01	03	01	36		Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi	
1	'01	03	1	01	03	01	36		Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	
1	'01	03	1	01	03	01	36	05	Pengadaan cetak peta tata ruang	
1	'01	03	1	01	03	01	36	06	Pendataan Bangunan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	
1	'01	03	1	01	03	01	36	07	Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang	
1	'01	03	1	01	03	01	36	04	RTBL Kawasan Strategis	

1	'01	03	1	01	03	01	36	13	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	
1	'01	03	1	01	03	01	36	14	Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	
1	'01	03	1	01	03	01	36		Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang	
1	'01	03	1	01	03	01	36		Identifikasi dan pemetaan kawasan ngarai sianok	
1	'01	03	1	01	03	01	37		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
1	'01	03	1	01	03	01	37	01	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	
1	'01	03	1	01	03	01	36		Audit Pemanfaatan Ruang	
1	'01	03	1	01	03	01	36		Pembuatan Billboard peruntukan ruang perkawasan	
1	'02	04	1	01	03	01	16		Program Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	
1	'02	04	1	01	03	01	16	01	Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	
1	'02	04	1	01	03	01	16		Sosialisasi Pengadaan Tanah	
1	'02	04	1	01	03	01	16	02	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	
1	'02	04	1	01	03	01	17		Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	
1	'02	04	1	01	03	01	17	01	Kegiatan Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass dan Masalah Tanah Masyarakat lainnya	
1	'02	04	1	01	03	01	18		Program Pengembangan Sistim Informasi Pertanahan	
1	'02	04	1	01	03	01	18		Kegiatan Pembuatan Sistim Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	Terlaksananya Pembuatan Aplikasi dan GIS Tanah dan Bangunan
1	'02	04	1	01	03	01	18	01	Kegiatan Pembuatan Arsip Elektronik	Arsip Elektronik

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.

Tinjauan SPM (Standar Pelayanan Minimal)

1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2014-2019

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Standar, SPM merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dengan pertimbangan beberapa indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 sulit diimplementasikan dan diukur maka telah dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014

Berdasarkan lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tingkat Kabupaten/Kota meliputi jenis pelayanan dasar Sumber Daya Air, Jalan, Cipta karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang dengan batas waktu pencapaian Tahun 2019 sebagaimana tabel 3.1 berikut;

Tabel 3.1
SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tingkat Kabupaten/Kota
(lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014)

No.	Jenis Pel. Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2019
A.	Sub Bidang Sumber Daya Air				
	1. Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	a. persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	%	100%
			b. persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	%	70%
B.	Sub Bidang Jalan				
	1. Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan jalan Kab/Kota	persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	%	60%
	2. Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Tersedianya konektivitas wilayah Kab/ Kota	persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota	%	100%
C.	Sub Bidang Cipta Karya				
	1. Penyediaan air minum	Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	81,77%
	2. Penyediaan sanitasi	Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase)	a. persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	% Penduduk	60%

No.	Jenis Pel. Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2019
		permukiman perkotaan			
			b. persentase pengurangan sampah di perkotaan	% Penduduk	20%
			c. persentase pengangkutan sampah	% Penduduk	70%
			d. persentase pengoperasian TPA	% pengope. TPA	60%
			e. persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	% penduduk	50%
	3. Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung	persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	IMB	60%
	4. Penangan Pemukiman Kumuh Perkotaan	Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan	persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Ha	10%
C. Sub Bidang Jasa Konstruksi					
	1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	%	60%
	2. Izin Usaha Jasa konstruksi	Meningkatnya kualitas layanan perizinan usaha jasa konstruksi	persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	%	100%
D. Sub Bidang Tata Ruang					
	Informasi Penataan Ruang	Meningkatnya ketersediaan informasi tata ruang	persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	100%
	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Meningkatnya ketersediaan RTH	persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	50%

2. Bidang Perumahan Rakyat

Terkait Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan SOPD (Satuan Organisasi Perangkat Daerah) baru sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah maka kewenangan Bidang Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tinjauan Kebijakan 100-0-100.

Target 100-0-100 yang mulai dikenalkan oleh Kementerian PU adalah target yang tercantum dalam rancangan RPJMN 2015-2019 dimana target tersebut adalah 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Target tersebut secara bersama-sama baik program dan kegiatan maupun pendanaannya menjadi prioritas baik dipusat

maupun di daerah sebagai bentuk sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Hal ini telah disikapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dengan menjadikan target adalah 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak tersebut menjadi indikator kinerja utama RPJMD yang pelaksanaannya dijabarkan dalam renstra dan renja SKPD termasuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021.

Penyusunan rencana kerja SOPD Tahun 2017 merupakan Tahun kedua perencanaan dalam periodisasi RPJMD Tahun 2016-2021, dimana RPJMD Kota Bukittinggi dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi acuan masih dalam proses penyusunan.

▪ *Tinjauan Visi dan Misi serta Rancangan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021.*

Visi Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi terpilih periode 2016-2021 yaitu “TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA , PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA”.

Visi tersebut ditunjang dengan 5 (lima) misi yaitu:

1. Mengembangkan dan Memberdayakan Partisipasi Berbagai Potensi Pemangku Kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat);
2. Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan ;
3. *Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan ;*
4. Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat;

Sedangkan prioritas pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik;
3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Penanggulangan Kemiskinan;
6. Pelestarian lingkungan hidup;
7. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur;
9. Pengembangan Pariwisata;

Dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tersebut yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang adalah menunjang pelaksanaan misi 3 yaitu “*Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan ;* dengan prioritas pembangunan “Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur”.

▪ *Tinjauan Rancangan Renstra DPU 2016-2021.*

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut maka Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi telah merumuskan rancangan renstra dengan visi : “Terwujudnya Infrastruktur Kota dalam rangka mendukung Bukittinggi sebagai kota tujuan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa berlandaskan nilai-nilai agama, budaya dan berwawasan lingkungan”.

Visi tersebut didukung dengan misi:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan peralatan ke PU an;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur kota untuk mendukung pelayanan publik;
3. Meningkatkan Penataan Ruang Kota serta mengendalikan dan mengarahkan perkembangan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota;
4. Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka penyediaan informasi, pengadaan, dan penyelesaian masalah pertanahan untuk kepentingan umum dan pembangunan.

Tabel 3.3
**Rancangan Misi, Tujuan, Sasaran dan Program
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016-2021**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
1.	MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan peralatan ke PU an					
	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan internal dan eksternal PU	1. Lancarnya pelayanan internal dan eksternal dinas	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi kantor		Program pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran tiap tahunnya
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik/komunikasi yang yang dibayar
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak/penggandaan yang dilaksanakan
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kantor yang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman kantor yang dibeli

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
					Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat/koordinasi yang diikuti/dihadiri
					Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS dibayar
					Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Jasa pengamanan kantor yang dilaksanakan
					Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket yang di proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
					Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Jumlah paket yang ditunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek
					Penunjang Operasional Kegiatan Ke PU an	Jumlah kegiatan lapangan yang dibayarkan honor/lembur
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketsediaan bangunan dan parsarana pendukung
					Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan
					Pengadaan Peralatan Kantor	terlaksananya pengadaan peralatan kantor
					Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan
					Pemeliharaan berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor dan Lanscape
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat ketsediaan pakaian dinas
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan laporam dan dokumen perencanaan SKPD/dinas
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun
					Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Jenis dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya
					Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Keuangan SKPD
					Fasilitasi kegiatan DAK bidang ke PU an	Jumlah bidang DAK yang difasilitasi
		2. Meningkatnya ketersediaan peralatan dan sarana penunjang	Tingkat ketersediaan alat berat dan sarana/prasarana ke PU an		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase pemenuhan alat berat Kebinamargaan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
					Pengadaan alat-alat berat	Jumlah alat berat yang diadakan/ dibeli
					Pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat berat yang dipelihara
2. MISI 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur kota untuk mendukung pelayanan publik						
	1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur Jalan dan penunjangnya dalam mendukung pelayanan lalin dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu	1. Meningkatnya ketersediaan (kuantitas) serta kualitas jalan dan jembatan bangunan pelengkap	Persentase tingkat kondisi jalan dan jembatan dengan kondisi baik/ sedang		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota dengan kondisi baik
					Peningkatan Trotoar	Panjang Trotoar yang ditingkatkan
					Pembangunan Trotoar	Panjang Trotoar yang dibangun
					Peningkatan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang ditingkatkan
					Pembangunan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang dibangun
					Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun
					Rehabilitasi Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang direhab
					Pembangunan Box Culvert Pengecoran bahu/ badan jalan Penyusunan DED Jalan 2 Jalur Jl. Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta Pembangunan Jalan 2 Jalur Jl. Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta Perencanaan DAK Jalan	Jumlah box culvert yang dibangun Jumlah bahu/ badan jalan yang dicor Jumlah DED yang disusun Jalan 2 jalur yang dibangun Jumlah perencanaan Dak jalan yang dikerjakan
					Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase peningkatan kualitas jalan dari pemeliharaan
					Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Panjang Jalan Dalam Kota yang di rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin
					Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	Panjang Jembatan Dalam Kota yang di rehabilitasi/ Pemeliharaan
					Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Panjang Jalan trotoar yang di rehabilitasi/ pemeliharaan Rutin
					Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase wilayah/ jalan dengan penerangan jalan lengkap
					Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum yang dipelihara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
					Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah/ direvitalisasi
					Revitalisasi Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah/ direvitalisasi
					Pembayaran Listrik Rekening PJU	Rekening Listrik PJU yang dibayar
					Program Sistim Informasi / Database Jalan Jembatan	Tingkat ketersediaan informasi/data base jalan
					Leger Jalan Kota Bukittinggi	Jumlah Dokumen leger Jalan Kota Bukittinggi
	2. Memberikan rasa aman terhadap bahaya banjir dan genangan	1. Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan /banjir	Penurunan Jumlah wilayah/titik yang terkena dampak genangan/ banjir		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik
					Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun
					Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dipelihara
					Peningkatan Drainase	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang ditingkatkan
					Pengembangan model dralingmas (Drainase lingkungan berbasis masyarakat)	Terlaksanannya Pengembangan model dralingmas (Drainase lingkungan berbasis masyarakat)
					Program Pengendalian Banjir	Persentase Pengurangan titik genangan
					Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali	Panjang Pengerukan Sungai / Kali
					Pembuatan Sumur Resapan	Jumlah sumur resapan yang dibuat
					Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya	Persentase sungai yang terpelihara/ normalisasi
					Normalisasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi
					Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pengamanan titik bahaya longsor
					Pemasangan Batu Bronjong/Dam bangunan	Panjang Batu Bronjong/Dam bangunan dibangun
					Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan	Panjang Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan
					Pembangunan Infrastruktur Kaw. Rawan Bencana	Pembangunan Infrastruktur Kaw. Rawan Bencana

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
	3. Meningkatkan sarana dan prasarana irigasi dan sungai	1. Meningkatnya cakupan air irigasi untuk pertanian rakyat	persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase DI yang beririgasi teknis
					Pembangunan Saluran Irigasi	Panjang Saluran Irigasi yang dibangun
					Rehab/ peningkatan Jaringan Irigasi	Panjang saluran irigasi yang di Rehab/ peningkatan
					Pemeliharaan Rutin Irigasi	Irigasi yang dipelihara
					Perencanaan DAK Irigasi	Jumlah perencanaan DAK irigasi yang dikerjakan
	4. Meningkatkan pengelolaan pembangunan gedung.	1. Meningkatnya pemeliharaan teknis bangunan publik/ gedung pemerintah	Jumlah gedung yang layak fungsi		Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	jumlah pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum
					Pembangunan Kantor Lurah	Jumlah kantor lurah yang dibangun
					Rehab Kantor Lurah	Jumlah kantor lurah yang direhab
					Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi	Jumlah Kantor DPRD Kota Bukittinggi yang dibangun
					Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi	Jumlah rumah dinas Walikota Bukittinggi yang dibangun kembali
					Rehab Gedung Parkir Ex Gloria	Jumlah gedung parkir Ex Gloria yang direhab
					Rehab Balai Pemuda	Jumlah balai pemuda yang direhab
					Program Pengelolaan Pembangunan Gedung	Persentase gedung negara dan swasta yang laik fungsi
					Operasionalisasi Perda Bangunan gedung	Terlaksananya Operasionalisasi Perda Bangunan gedung
	5. Menyelenggarakan keterpaduan/ sinergi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum	1. Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi	persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi
					Pembinaan Jasa Konstruksi	Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan
					Pembangunan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Jumlah SIM yang dibangun/ di update
					Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	Paket perencanaan pekerjaan fisik SKPD dengan nilai kecil dari 100.000.000 tersusun
					Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Jumlah dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBGN) Kota Bukittinggi yang tersusun

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE			URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	
	6. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan	1. Pemenuhan target universal access (sanitasi dan air bersih)	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman.				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	
			persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai					persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	
							Pembuatan Sumur Bor	Jumlah sumur bor yang dibuat	
							Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Air Minum	Jumlah Sarana Air Minum yang dibangun dan direvitalisasi	
							Pemeliharaan Sarana Air Minum	Jumlah sarana air minum yang dipelihara	
							Pembangunan Sarana Sanitasi	Jumlah Sarana Sanitasi yang dibangun	
							Pemeliharaan dan Revitalisasi Sarana Sanitasi	Jumlah Sarana Sanitasi yang dipelihara di direvitalisasi	
							Pemberdayaan Sanitasi	Terlaksanannya Pemberdayaan Sanitasi	
							Pembangunan toilet umum	Jumlah toilet umum yang dibangun	
							Pembangunan iPLT dan IPAL	Jumlah IPLT dan IPAL yang dibangun	
							Bantuan Pengujian Kualitas Air Baku Masyarakat	Jumlah Bantuan Pengujian Kualitas Air Baku Masyarakat yang terlaksana	
							Pemipaan (SR) Masyarakat	Jumlah Pemipaan (SR) Masyarakat	
							Operasi dan Pemeliharaan SPAM Panorama Baru	Terlaksanannya Operasi dan Pemeliharaan SPAM Panorama Baru	
							Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kayu Kubu	Terlaksanannya Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kayu Kubu	
							Operasi dan Pemeliharaan SPAM Labuah Batu (Bukit Apit)	Terlaksanannya Operasi dan Pemeliharaan SPAM Labuah Batu (Bukit Apit)	
							Pamsimas	Terlaksanannya Pamsimas	
3.	MISI 3 : Meningkatkan penataan ruang kota serta mengendalikan dan mengarahkan perkembangan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota								
	1. Peningkatan penataan ruang (ketaatan terhadap dokumen tata ruang).	1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas serta pengelolaan Ruang Publik dan Terbuka Hijau	persentase penyediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah				Program Perencanaan Tata Ruang	persentase penyediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	
								Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Terlaksanannya Pembuatan Keterangan Rencana Kota
								Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Jumlah Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak
								Pendamping Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Jumlah Perda RDTR tersusun

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
					Sosialisasi Perda RDTR Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda RDTR Kota Bukittinggi terlaksana
					Sosilaisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi terlaksana
					Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi terlaksana
					Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Jumlah penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi dilanjutkan
					Pengadaan cetak peta tata ruang	Tersedianya peta tata ruang
					Pendataan Bangunan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Terlaksanannya Pendataan Bangunan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
					Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang	Terlaksanannya Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang
					RTBL Kawasan Strategis	Jumlah RTBL kawasan strategis tersusun
					Studi penataan ruang daerah	Studi komparasi penataan ruang daerah yang dilaksanakan
					Penyusunan dan Pendataan Arsip – Arsip Tata ruang serta Digitalisasi Data	Jumlah Arsip dan digitalisasi data tata ruang yang tersusun dan terdata
					Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok	Jumlah kawasan Ngarai Sianok yang diidentifikasi dan dipetakan
					Sistem Informasi Tata ruang	Tersedianya sitem informasi tata ruang
		2. Meningkatnya ketaatan terhadap dokumen tata ruang	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap tata ruang	
					Pengawasan dan pengawasan/ pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	Jumlah kegiatan pengawasan/ pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan
					Audit Pemanfaatan Ruang	Jumlah audit pemanfaatan ruang yang disusun
					Pembuatan Billboard Tata Ruang	Jumlah billboard yang dibuat
					Verifikasi dan penyelesain pengaduan masyarakat masalah bangunan	Jumlah Verifikasi dan penyelesain pengaduan masyarakat masalah bangunan
4.	Misi 4 : Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka penyediaan informasi, penyelesaian masalah pertanahan , dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan					
	1. Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan	1. Terciptanya pelayanan pelayanan pertanahan yang berkualitas	Persentase ketersediaan informasi pertanahan		Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase ketersediaan informasi pertanahan
					Pembuatan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	Terlaksananya pembuatan aplikasi dan GIS tanah dan bangunan
					Kegiatan Pembuatan Arsip Elektronik	Tersedianya arsip elektronik pertanahan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
		2. Selesaiannya konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah	Jumlah konflik pertanahan pemerintah daerah yang diselesaikan		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Kepastian hukum atas tanah aset daerah
					Kegiatan Penyelesaian Tanah Konsolidasi By Pass dan Masalah Tanah Masyarakat Lainnya	Masalah konsolidasi tanah by pass dan masalah tanah masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan
	2. Meningkatkan ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	1. Terlaksananya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum		Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase optimalisasi penataan, penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah
					Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Jumlah sertifikat tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan/ diterbitkan
					Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	tersedianya tanah untuk kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi
					Sosialisasi Pengadaan Tanah	Terlaksananya sosialisasi pengadaan tanah

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017.

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang berdasarkan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang secara substansi merupakan usaha untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Bukittinggi menjadi masyarakat yang berekonomi mapan. Berdasarkan hal tersebut maka pada umumnya program dan kegiatan yang akan diselenggarakan adalah kegiatan-kegiatan dalam upaya memberikan akses dan penunjang untuk peningkatan perekonomian tersebut, seperti peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan, drainase dan lain-lain.

Namun selain berdasarkan upaya untuk pencapaian visi kepala daerah tersebut, kegiatan dan program yang akan diselenggarakan merupakan penjabaran dari beberapa dokumen perencanaan yang ada seperti RTRW, RPIJM, Master Plan Drainase, Dokumen RP4D, maupun dokumen perencanaan lainnya. Namun hal yang paling penting adalah kegiatan dan program ini merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016-2021 sebagai acuan pelayanan dalam jangka menengah (lima tahun).

Sebagai penyelenggaraan urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan, program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan strategis yang sebagian besar berdasarkan kegiatan bottom up sesuai usulan kegiatan dari masyarakat melalui musrenbang tahun 2017 pada tataran kelurahan, kecamatan dan penyaringan melalui musrenbang kota yang diselenggarakan dengan usulan dari SKPD dan usulan strategis lainnya serta mensinergikan dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Penyelenggaraan urusan ini akan disesuaikan kembali dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang tersebut diamanatkan bahwa terkait dengan urusan wajib pekerjaan umum dan

penataan ruang nomenklaturnya berubah menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berupa urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Namun karena operasional aturan terkait belum tersedia berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, maka dalam dokumen perencanaan ini masih memakai nomenklatur lama.

Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi, direncanakan akan memuat 17 program strategis, yang terangkum dalam 2 urusan yaitu, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan, dengan akumulasi program dan kegiatan yang ditampung dalam renja sebagaimana tabel berikut;

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2018 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat evaluasi pelaksanaan Tahun 2016 dan perkiraan Tahun 2017 serta Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 terkait urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Pertanahan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta bersinergi dengan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 serta Rancangan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum 2016 – 2021 disamping mensinkronkan dengan kebijakan nasional dan provinsi.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2018 telah dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan menjadi bahan pembahasan Musrenbang Kota dengan mengkompilasikan 4 (empat) pendekatan perencanaan yaitu teknoratis, politis, partisipatif serta top down dan bottom up. Untuk itu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2018 ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam penyusunan anggaran (DPA) Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2018 sebagai pedoman program kegiatan serta kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan pertanahan yang taat azas sesuai konsep penataan ruang dalam menunjang Bukittinggi sebagai kota wisata, pendidikan, perdagangan dan jasa.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI**

dto

Ir. OKTAVIANUS, MT
Nip. 19631030 199202 1 001

MATRIK RANCANGAN PROGRAM & KEGIATAN PRIORITAS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019

KODE									URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			Lokasi	Target	kebutuhan dana	Sumber dana		Lokasi	Target	Kebutuhan dana	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																			
Misi 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan peralatan ke PU an.														3,183,709,040				3,502,079,944	
1	'01	03	1	01	03	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran			2,999,209,040		-	Bukittinggi	100%	3,299,129,944	
1	'01	03	1	01	03	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat	Bukittinggi	5 Jenis	6,050,000	APBD	-	Bukittinggi	100%	6,655,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening belanja jasa kantor	Bukittinggi	12 rekening Telepon, 12 rekening Air, 12 rekening listrik, 12 rekening Internet	236,000,000	APBD	-	Bukittinggi	100%	259,600,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	01	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	Bukittinggi	2 unit minibus, 9 unit pick up, 6 unit truck, 24 sepeda motor	405,000,000	APBD	-	Bukittinggi	100%	445,500,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	01	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan alat kebersihan dan jasa kebersihan	Bukittinggi	9 item, 1 paket jasa kebersihan (4 orang) 3 item 6 jenis	182,799,600	APBD	-	Bukittinggi	100%	201,079,560	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	01	005	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara	Bukittinggi	3 item, 6 jenis	21,242,500	APBD	-	Bukittinggi	100%	23,366,750	APBD

1	'01	03	1	01	03	01	01	006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang dibeli	Bukittinggi	59 Jenis	41,316,440	APBD	-	Bukittinggi	100%	45,448,084	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	01	007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan penggandaan yang dilaksanakan	Bukittinggi	16 jenis, 126.310 lembar fotocopy	46,290,850	APBD	-	Bukittinggi	100%	50,919,935	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	01	008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor yang dibeli	Bukittinggi	13 jenis	8,998,840	APBD	-	Bukittinggi	100%	9,898,724	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	01	009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman kantor yang dibeli	Bukittinggi	874 bungkus nasi, 700 bungkus snack, makan minum tamu	28,950,000	APBD	-	Bukittinggi	100%	31,845,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	01	010	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat-Rapat / Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi yang diikuti dan dihadiri	Bukittinggi	12 bulan	187,000,000	APBD	-	Bukittinggi	100%	205,700,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	01	011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Pegawai Non PNS dibayar	Bukittinggi	41 orang	1,108,003,700	APBD	-	Bukittinggi	100%	1,218,804,070	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	01	012	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor yang disediakan	Bukittinggi	1 paket (6 orang)	197,000,000	APBD	-	Bukittinggi	100%	216,700,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	01	013	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Paket Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bukittinggi	126 Paket	380,435,900	APBD	-	Bukittinggi	100%	418,479,490	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	01	019	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Paket Honor Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Bukittinggi	126 Paket	150,121,210	APBD	-	Bukittinggi	100%	165,133,331	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur			100,000,000					110,000,000	
1	'01	03	1	01	03	01	02	006	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor yang dilaksanakan	Bukittinggi	1 gedung	100,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	110,000,000	APBD

006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang dibeli	Bukittinggi	59 Jenis	41,316,440	APBD	-	Bukittinggi	100%	45,448,084	APBD
007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan penggandaan yang dilaksanakan	Bukittinggi	16 jenis, 126.310 lembar fotocopy	46,290,850	APBD	-	Bukittinggi	100%	50,919,935	APBD
008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor yang dibeli	Bukittinggi	13 jenis	8,998,840	APBD	-	Bukittinggi	100%	9,898,724	APBD
009	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman kantor yang dibeli	Bukittinggi	874 bungkus nasi, 700 bungkus snack, makan minum tamu	28,950,000	APBD	-	Bukittinggi	100%	31,845,000	APBD
010	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat-Rapat / Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi yang diikuti dan dihadiri	Bukittinggi	12 bulan	187,000,000	APBD	-	Bukittinggi	100%	205,700,000	APBD
011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Pegawai Non PNS dibayar	Bukittinggi	41 orang	1,108,003,700	APBD	-	Bukittinggi	100%	1,218,804,070	APBD
012	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor yang disediakan	Bukittinggi	1 paket (6 orang)	197,000,000	APBD	-	Bukittinggi	100%	216,700,000	APBD
013	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Paket Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bukittinggi	126 Paket	380,435,900	APBD	-	Bukittinggi	100%	418,479,490	APBD
019	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Paket Honor Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Bukittinggi	126 Paket	150,121,210	APBD	-	Bukittinggi	100%	165,133,331	APBD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur			100,000,000					110,000,000	
006	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor yang dilaksanakan	Bukittinggi	1 gedung	100,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	110,000,000	APBD

1	'01	03	1	01	03	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat ketersediaan SDM sesuai bidang keahlian			84,500,000		-			92,950,000	
1	'01	03	1	01	03	01	05	003	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Peserta yang mengikuti bimtek/diklat ke Puan	Bukittinggi	15 orang	84,500,000	APBD	-	Bukittinggi	100%	92,950,000	APBD
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																			
Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur kota untuk mendukung pelayanan publik													108,659,073,555					119,524,980,911	
1	'01	03	1	01	03	01	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan Kota yang berkondisi baik			12,362,276,590	APBD				13,598,504,249	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	15	001	Peningkatan Trotoar	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, trotoar yang ditingkatkan	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 2 paket	740,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	814,000,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	15	002	Peningkatan Jalan Dalam Kota	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jalan yang ditingkatkan	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 14 paket	8,076,419,550	APBD		Bukittinggi	100%	8,884,061,505	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	15	003	Pembangunan Jalan Dalam Kota	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jalan yang dibangun	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 2 paket	1,459,224,550	APBD		Bukittinggi	100%	1,605,147,005	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	15	004	Pembangunan Jembatan P4B	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan,	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan	95,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	104,500,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	15	006	Pembangunan Trotoar	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, trotoar yang dibangun	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 5 paket	1,991,632,490	APBD		Bukittinggi	100%	2,190,795,739	APBD

1	'01	03	1	01	03	01	15	003	Pembangunan Jalan Dalam Kota	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jalan yang dibangun	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 2 paket	1,459,224,550	APBD		Bukittinggi	100%	1,605,147,005	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	15	004	Pembangunan Jembatan P4B	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jembatan yang dibangun	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1	95,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	104,500,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	15	006	Pembangunan Trotoar	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, trotoar yang dibangun	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 5 paket	1,991,632,490	APBD		Bukittinggi	100%	2,190,795,739	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	16		Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik			2,986,548,360	APBD				3,285,203,196	
1	'01	03	1	01	03	01	16	001	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 11 paket	1,833,552,360	APBD		Bukittinggi	100%	2,016,907,596	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	16	003	Peningkatan Drainase	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 4 paket	1,152,996,000	APBD		Bukittinggi	100%	1,268,295,600	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	17		Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	Persentase titik pengamanan bahaya longsor			1,131,150,300					1,244,265,330	
1	'01	03	1	01	03	01	17	001	Pemasangan Batu Bronjong/Dam Bangunan	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, batu bronjong/ dam bangunan dibangun	Bukittinggi	4 dokumen perencanaan, 4 laporan pengawasan, 4 paket	1,081,150,300	APBD		Bukittinggi	100%	1,189,265,330	APBD

1	'01	03	1	01	03	01	17	00	Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, batu bronjong/ dam jalan dibangun	Bukittinggi	1 paket	50,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	55,000,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	18		Program rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan jembatan yang Berkondisi Baik			14,339,202,860					15,773,123,146	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	18	00	Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Pemeliharaan Jalan Dalam Kota	Bukittinggi	12 Bulan	744,156,235	APBD		Bukittinggi	100%	818,571,859	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	18	00	Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam kota	Jembatan Dalam Kota yang direhab dan dipelihara	Bukittinggi	12 Bulan	364,656,350	APBD		Bukittinggi	100%	401,121,985	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	18	00	Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Pemeliharaan Trotoar Dalam Kota	Bukittinggi	12 Bulan	284,390,275	APBD		Bukittinggi	100%	312,829,303	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	18	00	Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Pendukung Konektifitas 2018)	Lap. Pengawasan, Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Pendukung Konektifitas 2018), Peta GIS dan Data Base	Bukittinggi	1 Lap. Pengawasan, 1 Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Pendukung Konektifitas 2018), 1	12,946,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	14,240,600,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	20		Program peningkatan sarana dan prasarana Kebinarmargaan	Persentase pemenuhan alat berat ke PU an / Kebinarmargaan			547,150,000					601,865,000	
1	'01	03	1	01	03	01	20	00	Pemeliharaan Alat Berat	Alat berat yang dipelihara	Bukittinggi	12 unit	547,150,000	APBD		Bukittinggi	100%	601,865,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	21		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan	Persentase daerah irigasi yang beririgasi teknis dengan kondisi			1,891,117,275					2,080,229,003	
1	'01	03	1	01	03	01	21	00	Rehab/ peningkatan Saluran Irigasi	dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran irigasi yang direhab/ ditingkatkan	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 6 paket	1,538,798,000	APBD		Bukittinggi	100%	1,692,677,800	APBD

1	'01	03	1	01	03	01	21	002	Pemeliharaan Rutin Irigasi	Pekerjaan Pemeliharaan Irigasi Dalam Kota	Bukittinggi	12 Bulan	297,319,275	APBD		Bukittinggi	100%	327,051,203	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	21	004	Lanjutan Irigasi Banda Taruko Tabek Gadang Aur Kuning	Panjang saluran Irigasi yang di rehab	Bukittinggi	65 m	55,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	60,500,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	23		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase daerah irigasi yang beririgasi teknis dengan kondisi baik			1,502,000,000					1,652,200,000	
1	'01	03	1	01	03	01	23	001	Pembangunan Toilet Umum	dokumen perencanaan, laporan pengawasan, toilet umum	Bukittinggi	2 dokumen perencanaan, 2 laporan pengawasan, 2 unit toilet	1,000,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	1,100,000,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	23	002	Pembuatan Sumur Bor	Sumur bor yang dibuat	Bukittinggi	1 paket	30,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	33,000,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	23	004	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Air Minum (DAK Air Minum 2018)	Dokumen perencanaan, Dokumen pengawasan, Jaringan SPAM	Bukittinggi	1 Dokumen perencanaan, 1 Dokumen pengawasan, 2 Jaringan SPAM	442,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	486,200,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	23	005	Pembangunan Bak Penampungan Air	Bak penampungan air	Bukittinggi	1 bak penampungan air	30,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	33,000,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	24		Program Pengendalian Banjir	Persentase daerah irigasi yang beririgasi teknis dengan kondisi baik			348,221,650					383,043,815	
1	'01	03	1	01	03	01	24	001	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	kali/sungai yang dibersihkan dan dikeruk	Bukittinggi	2000 m	223,221,650	APBD		Bukittinggi	100%	245,543,815	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	24	002	Pembuatan Bak Resapan Penanggulangan Banjir	Dokumen perencanaan, dokumen pengawasan, bak resapan	Bukittinggi	1 Dokumen perencanaan, 1 dokumen pengawasan, 1 bak resapan	125,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	137,500,000	APBD

01	03	01	25		Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum			68,399,786,305					75,239,764,936	
01	03	01	25	001	Event-Event Daerah dan Nasional	jumlah event daerah yang dilaksanakan	Bukittinggi	5 even	87,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	95,700,000	APBD
01	03	01	25	002	Pembangunan Kantor Lurah	dokumen perencanaan, laporan pengawasan, kantor lurah yang	Bukittinggi	3 dokumen perencanaan, 3 laporan pengawasan, 3 paket	4,100,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	4,510,000,000	APBD
01	03	01	25	003	Rehab Kantor Lurah	Jumlah Kantor lurah yang direhab	Bukittinggi	1 paket	70,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	77,000,000	APBD
01	03	01	25	004	Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi (Lanjutan)	Laporan pengawasan, bangunan rumah dinas (lanjutan)	Bukittinggi	1 laporan pengawasan, 1 unit Bangunan (lanjutan)	4,432,700,575	APBD		Bukittinggi	100%	4,875,970,633	APBD
01	03	01	25	006	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun I (Pertama)	Dokumen manajemen konstruksi, bangunan kantor DPRD Kota	Bukittinggi	1 dokumen manajemen konstruksi, 1 unit bangunan kantor DPRD	28,245,085,730	APBD		Bukittinggi	100%	31,069,594,303	APBD
01	03	01	25	008	Pembangunan Gapura	dokumen perencanaan, laporan pengawasan, gapura yang dibangun	Bukittinggi	2 dokumen perencanaan, 2 laporan pengawasan, 2 unit	300,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	330,000,000	APBD
01	03	01	25	009	Rehabilitasi/Pembangunan Kembali Pasar Atas	Dokumen DED, Amdal, Amdal Lalin, Managemen Konstruksi	Bukittinggi	Dok. Revisi MP & DED, 2 Dok Amdal, 1 Dok MK	6,165,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	6,781,500,000	APBD
01	03	01	25	010	Rehabilitasi Kawasan Jam Gadang	Pengawasan berkala, laporan pengawasan, revitalisasi kawasan jam gadang	Bukittinggi	1 Pengawasan berkala, 1 lap. pengawasan, 1 revitalisasi kawasan jam gadang	25,000,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	27,500,000,000	APBD

1	'01	03	1	01	03	01	26		Program Pengelolaan Pembangunan Gedung	Persentase Gedung negara dan swasta yang laik fungsi			131,898,350					145,088,185	
1	'01	03	1	01	03	01	26	001	Operasionalisasi Perda Bangunan gedung	Jumlah Kegiatan Operasionalisasi terlaksana	Bukittinggi	9 kali sidang, 18 SLF	131,898,350	APBD		Bukittinggi	100%	145,088,185	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	27		Program Pengelolaan Penerangan Lampu Jalan	Persentase wilayah/ jalan dengan penerangan jalan lengkap			4,881,930,365					5,370,123,402	
1	'01	03	1	01	03	01	27	001	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Pekerjaan Pemeliharaan Lampu PJU	Bukittinggi	12 bulan	374,095,630	APBD		Bukittinggi	100%	411,505,193	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	27	002	Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jaringan JPU	Bukittinggi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 11 paket	877,834,735	APBD		Bukittinggi	100%	965,618,209	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	27	003	Pembayaran Listrik Rekening PJU	Pembayaran rekening PJU	Bukittinggi	12 bulan	3,630,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	3,993,000,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	28		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada			137,791,500					151,570,650	

1	'01	03	1	01	03	01	28	001	Pembinaan Jasa Konstruksi	peserta lokakarya/diseminasi dan bimtek	Bukittinggi	120 orang	73,672,500	APBD		Bukittinggi	100%	81,039,750	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	28	002	Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	Dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	Bukittinggi	44 dokumen	47,824,000	APBD		Bukittinggi	100%	52,606,400	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	28	003	Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Dokumen Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi yang disusun	Bukittinggi	4 dokumen	16,295,000	APBD		Bukittinggi	100%	17,924,500	APBD
Misi 3. Meningkatkan Penataan Ruang Kota serta mengendalikan dan mengarahkan perkembangan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota													1,096,765,170					1,206,441,687	
1	'01	03	1	01	03	01	30		Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya kesesuaian pola ruang			670,319,585			Bukittinggi	100%	737,351,544	
1	'01	03	1	01	03	01	30	001	Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi	Jumlah peserta sosialisasi	Bukittinggi	960 orang, 24 kelurahan	131,505,500	APBD		Bukittinggi	100%	144,656,050	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	30	002	Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi	Jumlah peserta sosialisasi	Bukittinggi	630 Orang	78,534,000	APBD		Bukittinggi	100%	86,387,400	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	30	003	Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Terlaksananya lanjutan penyusunan perda RDTR Kota Bukittinggi, FGD	Bukittinggi	475 orang	170,897,830	APBD		Bukittinggi	100%	187,987,613	APBD

Misi 3. Meningkatkan Penataan Ruang Kota serta mengendalikan dan mengarahkan perkembangan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota													1,096,765,170					1,206,441,687	
1	'01	03	1	01	03	01	30		Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya kesesuaian pola ruang			670,319,585			Bukittinggi	100%	737,351,544	
1	'01	03	1	01	03	01	30	001	Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi	Jumlah peserta sosialisasi	Bukittinggi	960 orang, 24 kelurahan	131,505,500	APBD		Bukittinggi	100%	144,656,050	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	30	002	Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi	Jumlah peserta sosialisasi	Bukittinggi	630 Orang	78,534,000	APBD		Bukittinggi	100%	86,387,400	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	30	003	Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Terlaksananya lanjutan penyusunan perda RDTR Kota Bukittinggi, FGD	Bukittinggi	475 orang	170,897,830	APBD		Bukittinggi	100%	187,987,613	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	30	004	Pengadaan cetak peta tata ruang	Tersedianya peta tata ruang	Bukittinggi	40 Unit	26,250,000	APBD		Bukittinggi	100%	28,875,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	30	006	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Bukittinggi	300 KRK	60,156,625	APBD		Bukittinggi	100%	66,172,288	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	30	007	Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Bukittinggi	20 Sertifikat	82,308,770	APBD		Bukittinggi	100%	90,539,647	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	30	008	Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang	Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata	Bukittinggi	1 Dokumen	106,300,450	APBD		Bukittinggi	100%	116,930,495	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	30	009	Identifikasi dan pemetaan kawasan ngarai sianok	Identifikasi dan pemetaan kawasan ngarai sianok	Bukittinggi	1 kegiatan	14,366,410	APBD		Bukittinggi	100%	15,803,051	APBD

1	'01	03	1	01	03	01	31		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan			426,445,585					469,090,144	
1	'01	03	1	01	03	01	31	001	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	Jumlah Razia Bangunan	Bukittinggi	12 bulan	130,626,285	APBD				143,688,914	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	31	002	Audit Pemanfaatan Ruang	Dokumen Audit Pemanfaatan Ruang yang tersusun	Bukittinggi	1 Dokumen	53,945,800	APBD		Bukittinggi	100%	59,340,380	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	31	003	Pembuatan Billboard peruntukan ruang perkawasan	Billboard yang dibuat	Bukittinggi	3 Unit	200,000,000	APBD		Bukittinggi	100%	220,000,000	APBD
1	'01	03	1	01	03	01	31	004	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Laporan Koordinasi yang Intensif terhadap Penataan Ruang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018	Bukittinggi		41,873,500	APBD		Bukittinggi	100%	46,060,850	APBD
URUSAN PERTANAHAN																			
Misi 4. Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka penyediaan informasi, pengadaan, dan penyelesaian masalah pertanahan untuk kepentingan umum dan pembangunan													17,628,278,840					19,391,106,724	
1	'02	04	1	01	03	01	15		Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Tingkat ketersediaan informasi pertanahan			65,252,040					71,777,244	
1	'02	04	1	01	03	01	15	001	Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	Pembuatan aplikasi GIS dan penginputan data	Bukittinggi	data tanah dan bangunan konsolidasi by pass	65,252,040	APBD		Bukittinggi	100%	71,777,244	APBD
1	'02	04	1	01	03	01	16		Program Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase kepastian hukum atas tanah asset daerah			17,131,867,790					18,845,054,569	

1	'02	04	1	01	03	01	15	00	Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	Pembuatan aplikasi GIS dan penginputan data	Bukittinggi	data tanah dan bangunan konsolidasi by pass	65,252,040	APBD	Bukittinggi	100%	71,777,244	APBD
1	'02	04	1	01	03	01	16		Program Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase kepastian hukum atas tanah asset daerah			17,131,867,790				18,845,054,569	
1	'02	04	1	01	03	01	16	00	Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah yang	Bukittinggi	5 sertifikat	149,155,450	APBD	Bukittinggi	100%	164,070,995	APBD
1	'02	04	1	01	03	01	16	00	Sosialisasi Pengadaan Tanah	Sosialisasi UU no. 2 tahun 2012 dan aturan turunannya	Bukittinggi	55 orang 1 hari	19,212,400	APBD	Bukittinggi	100%	21,133,640	APBD
1	'02	04	1	01	03	01	16	00	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kota	Bukittinggi	2 paket	16,963,499,940	APBD	Bukittinggi	100%	18,659,849,934	APBD
1	'02	04	1	01	03	01	17		Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase optimalisasi penataan penguasaan pemilikan dan pengguna tanah			431,159,010				474,274,911	
1	'02	04	1	01	03	01	17	00	Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass dan Masalah Tanah Masyarakat lainnya	Masalah Tanah Konsolidasi By.Pass dan Tanah Masyarakat lainnya yang dapat	Bukittinggi	1 kegiatan	431,159,010	APBD	Bukittinggi	100%	474,274,911	APBD
													130,567,826,605				143,624,609,266	

Bukittinggi, Desember 2017
ALA DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RU/
KOTA BUKITTINGGI

dto.

Ir. OKTAVAINUS, MT
NIP.19631030 199202 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Disamping itu dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka peranan Renstra ini menjadi sangat penting.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional Rencana Strategis (Renstra) Satuan Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dan rencana tindak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat gambaran umum pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Isu-isu strategis, visi, misi, sasaran dan strategi kebijaksanaan pembangunan, serta program, kegiatan dan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 dilakukan melalui pengolahan data dan informasi terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan dengan mensinergikan dengan konsep penataan ruang kota. Disamping itu dilakukan telaahaan kondisi infrastruktur daerah yang dilanjutkan dengan proses analisis terhadap variabel potensi kinerja dan faktor-faktor eksternalitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, arahan RPJMD 2016-2021, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat pekerjaan Umum yang terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Menteri No.01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat ditur dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M.2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Melalui rangkaian proses kompilasi dan analisis data ini diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap penentuan arah dan kebijakan strategis dan konstruktif untuk pelaksanaan program pemenuhan sarana dan prasarana publik secara simultan selama periode Renstra tahun 2018 – 2021 sehingga menjadi perencanaan yang bersifat implementatif (action plan) dan memiliki hubungan yang sinergis dengan kebijakan program Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menunjang pencapaian Visi Daerah “TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA , PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA”

1.2. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar DalamLingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara)
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor)
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum;
- r. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M.2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
- s. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
- t. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
- u. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
- v. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2012-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 tahun 2011);
- w. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
- x. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
- y. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- z. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor:188.45-233-2016 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021
- aa. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor : 180/6/Huk-E/2017 tentang Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Disertai Indikasi Pendanaan Tahun 2016-2021

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah untuk menjabarkan kebijaksanaan pembangunan daerah dibidang ke PU-an yang terdapat pada RPJMD tahun 2018 -2021 terkait urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pertanahan sebagai salah satu sektor pendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi agar dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Tahunan yang berorientasi pada program dan kegiatan.

Secara khusus Renstra ini mempunyai Tujuan sebagai berikut:

1. Memantapkan keberadaan, posisi serta peranan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tahun 2018 - 2021 sebagai salah satu institusi kelembagaan dalam lingkup Pemerintah Kota Bukittinggi (SKPD) yang mengemban fungsi yang lebih profesional, arif dalam menyikapi perubahan internal maupun eksternal dan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan infrastruktur Kota.
2. Mengendalikan proses pembangunan sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun kedepan. Program pembangunan dalam jangka waktu lima tahun ini sebagai bagian dari program pembangunan jangka panjang, sehingga dapat diperhatikan keterkaitan antar ruang, waktu dan anggaran.
3. Memberi masukan bagi masyarakat dalam menyusun daftar usulan pembangunan melalui mekanisme perencanaan daerah secara berjenjang.
4. Memberikan pedoman dalam menetapkan kebijakan operasional bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan urusannya dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis
5. Sebagai pedoman untuk meningkatkan Kinerja dan pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi;
6. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah tentang upaya-upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dalam peningkatan infrastruktur pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan serta upaya penataan ruang kota selama kurun waktu lima tahun kedepan.
7. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dalam mengalokasikan anggaran pembangunan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyampaian dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 mulai dari pengolahan data/ informasi, analisis dan perumusan dalam bentuk dokumen mengacu kepada Lampiran 4 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Penyajian Rencana Strategis (Renstra) dimaksud , disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 2.5. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi
- 3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.
- 3.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi dan KLHS
- 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 2.6. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi
- 2.7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi
- 2.8. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi

BAB V RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Secara umum penetapan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam mendukung kebijakan pimpinan daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan Teknis di bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan administrasi dinas
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

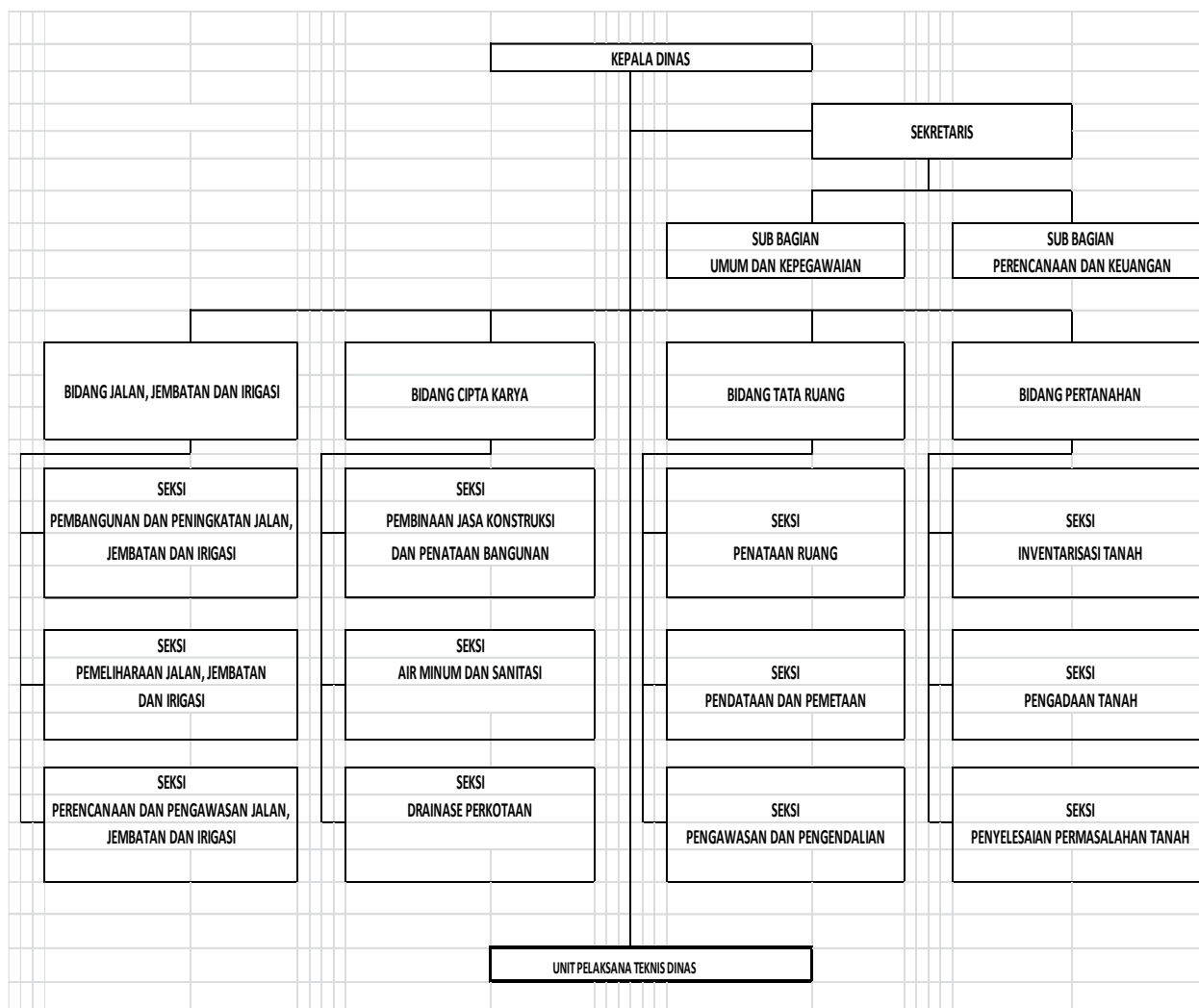
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktural tersebut mengacu kepada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi, sebagai berikut:

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan rencana strategis (Renstra) , rencana kerja (Renja) dan penetapan kinerja Dinas;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan ;
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang

- dan pertanahan;
- d. Pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan;
 - e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (AKIP);
 - f. Pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan aset
 - b. Pengkoordinasian perencanaan, serta pelaporan program dan kegiatan dinas;
 - c. Perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra dinas;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran dinas;
 - e. Pengelolaan anggaran dan keuangan dinas;
 - f. Penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup dinas; dan

- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1 Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas, perencanaan dan evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas- tugas urusan umum, kepegawaian dan perencanaan;
 - c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - d. Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
 - e. Pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, pemberian informasi dan komunikasi, pengetikan/ penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokol;
 - f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/ prasarana, keamanan serta kebersihan kantor dan lingkungan;
 - g. Pengelolaan aset di lingkungan dinas;
 - h. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/ sarana kerja; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Rincian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengelolaan keuangan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Dinas;
 - b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas- tugas urusan perencanaan dan keuangan;
 - c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - e. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
 - f. Penyiapan berkas- berkas perencanaan dan keuangan serta pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkup Dinas;
 - g. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Dinas; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Jalan ,Jembatan dan Irigasi

- (1) Bidang Jalan, Jembatan dan Irigasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang prasarana jalan, jembatan, dan irigasi dengan optimal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Jalan, Jembatan dan Irigasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan bidang jalan, jembatan dan irigasi sesuai renstra dan renja agar kegiatan relevan dengan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah;
 - b. Pembagian tugas kepada masing-masing kepala seksi di bidang agr pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Pemberian petunjuk dan bimbingan kepada kepala seksi agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. Pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah;
 - e. Pembuatan laporan kegiatan bidang sebagai bahan pertanggungjawaban dan penilaian atasan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.1 Tugas Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan dan Irigasi

- (1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan dan Irigasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi;
 - b. Penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan urusan seksi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi;
 - c. Pembagian tugas kepada staf di seksi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. Pemberian petunjuk dan bimbingan kepada staf agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. Penyusunan konsep rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
 - f. Pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.2 Rician Tugas Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi;
 - b. Penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan urusan seksi pemeliharaan jalan, jembatan

- dan irigasi;
- c. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh lampu penerangan pada jalan dan jembatan;
- d. Pembagian tugas kepada staf di seksi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- e. Pemberian petunjuk dan bimbingan kepada staf agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. Penyusunan konsep rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
- g. Pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.3 Rincian Tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan, Jembatan dan Irigasi

- (1) Seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi;
 - b. Penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan urusan seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi;
 - c. Pembagian tugas kepada staf di seksi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. Pemberian petunjuk dan bimbingan kepada staf agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. Penyusunan konsep rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
 - f. Pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG CIPTA KARYA

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang keciptakaryaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang cipta karya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan teknis dan program penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan sanitasi dan drainase perkotaan;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan teknis penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan sanitasi dan drainase perkotaan;
 - c. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan serta rumah negara, prasarana dan sarana air minum dan sanitasi perkotaan dan drainase perkotaan;
 - d. Pemberian pembagian tugas, memimpin, memberi petunjuk dan pendayagunaan dalam pelaksanaan tugas seksi penataan bangunan, seksi air minum dan sanitasi

- dan seksi drainase perkotaan;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah- langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.1 Rincian Tugas Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Penataan Bangunan

- (1) Seksi pembinaan jasa konstruksi dan penataan bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan jasa konstruksi dan penataan bangunan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pembinaan jasa konstruksi dan penataan bangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan penyusunan program dan perencanaan teknis penataan bangunan;
 - b. Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan teknis pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah;
 - c. Pemberian bantuan teknis pembangunan gedung negara;
 - d. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL);
 - e. Perumusan penetapan kebijakan dan strategi daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
 - f. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran bangunagedung negara;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan tim ahli bangunan gedung (TABG);
 - h. Pelaksanaan pengelolaan pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan;
 - i. Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi;
 - j. Penghimpun, pengkajian dan pelaksanaan diseminasi aturan dan kebijakan usaha jasa konstruksi;
 - k. Pengembangan sumberdaya jasa konstruksi melalui pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dan bentuk lainnya;
 - l. Penertiban dan pemberian rekomendasi terhadap penerbitan izin usaha jasa konstruksi;
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.2 Rincian Tugas Seksi Air Minum dan Sanitasi

- (1) Seksi air minum dan sanitasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang air minum dan sanitasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi air minum dan sanitasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan penyusunan program dan perencanaan teknis prasarana sarana air minum dan air limbah/ sanitasi tingkat perkotaan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - c. Pelaksanaan pembangunan dan pengawasan penyediaan prasarana sarana air minum dan air limbah/ sanitasi tingkat perkotaan;

- d. Pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum termasuk kepada badan usaha milik daerah (operator); dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.3 Rincian Tugas Seksi Drainase Perkotaan

- (1) Seksi drainase perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi serta pelaksanaan kegiatan di bidang drainase perkotaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi drainase perkotaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan penyusunan program dan perencanaan teknis prasarana drainase tingkat perkotaan diluar drainase yang berada pada ruang milik jalan (RMJ);
 - b. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan drainase tingkat perkotaan diluar drainase yang berada pada ruang milik jalan (RMJ);
 - c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir diluar drainase yang berada pada ruang milik jalan (RMJ); dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG TATA RUANG

- (1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pendataan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan pelaksanaan dan pengkoordinasi kebijakan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sesuai bidang tata ruang urusan/ kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. Perumusan, pelaksanaan serta pengkoordinasian kebijakan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sesuai urusan/ kewenangan Pemerintah Daerah bidang tata ruang kota;
 - c. Perumusan, pelaksanaan serta pengkoordinasian kebijakan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi penyelenggaraan operasi lapangan bidang teknis tata ruang kota;
 - d. Pengumpulan data, sebagai bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama bidang tata ruang kota sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. Perumusan, penganalisaan, evaluasi dan pelaporan program tata ruang;
 - f. Pelaksanaan, pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang tata ruang;
 - g. Bertanggungjawab atas pelaksanaan serta pencapaian target program dan atau kegiatan/ tugas bidang tata ruang;
 - h. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.1 Rincian Tugas Seksi Penataan Ruang

- (1) Seksi Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan,

perumusan kebijakan teknis, pembinaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata ruang.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penataan ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana umum dan rinci tata ruang kota;
 - b. Penyusunan bahan peraturan zonasi (zoning map dan zoning teks) sebagai penjabaran dari rencana detail tata ruang (RDTR)
 - c. Penyiapan bahan legislasi untuk produk rencana tata ruang;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/ kota;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dibidang penataan ruang;
 - g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
 - h. Penyiapan bahan penerbitan keterangan atau rekomendasi teknis dalam rangka pemanfaatan tata ruang kota;
 - i. Penyiapan surat keterangan rencana kota yang mengatur tentang penggunaan lahan, intensitas ruang dan ketentuan lainnya;
 - j. Pelaksanaan kegiatan pengidentifikasian terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana kota;
 - k. Melaksanakan monitoring dan pengendalian bangunan sesuai dengan rencana detail tata ruang kota (RDTRK), rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL);
 - l. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
 - m. Penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kesadaran, tanggungjawab, dan peran serta masyarakat dalam perencanaan penataan ruang;
 - n. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang; dan
 - o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.2 Rincian Tugas Seksi Pendataan dan Pemetaan

- (1) Seksi Pendataan dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendatan dibidang tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pendataan dan Pemetaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan pemetaan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pendataan, pengukuran dan pemetaan pemanfaatan ruang;
 - c. Pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporanlingkup pendataan dan pengukuran;
 - d. Pelaksanaan pembinaan lingkup pelaksanaan orientasi lapangan, pengukuran dan pemetaan, serta pengelolaan peta dasar;
 - e. Pelaksanaan pembuatan usulan teknis perencanaan peletakan bangunan untuk keterangan rencana kota (KRK);
 - f. Pelaksanaan pendataan bangunan dan pemanfaatan ruang;
 - g. Pengelolaan data, dokumentasi dan peta tata ruang;
 - h. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi pendataan bangunan dan

- pemanfaatan ruang kota; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.3 Rincian Tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pendataan terhadap pemanfaatan ruang dan bangunan, serta penanganan, penertiban, penyegehan, pembongkaran terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengecekan kesesuaian tata ruang dan kesesuaian persyaratan teknis bangunan;
 - b. Pendataan penyelenggaraan tata ruang dan bangunan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam rangka pengawasan sebagai tindak lanjut atas terdapatnya indikasi pelanggaran peraturan daerah dan / atau peraturan walikota;
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan tata ruang dan bangunan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan pelaporan pengawasan tata ruang dan bangunan;
 - f. Pelaksanaan kegiatan penyegehan bangunan yang tidak sesuai dengan dokumen rencana tata ruang;
 - g. Pelaksanaan kegiatan pembongkaran bangunan yang tidak sesuai dengan dokumen rencana tata ruang;
 - h. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan yang melakukan eksplorasi sumber daya alam yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota terutama kawasan lindung, agro wisata, jalur hijau, sungai dan perbukitan yang memiliki kemiringan tidak layak bangun;
 - i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan sarana prasarana dan utilitas kota;
 - j. Pelaksanaan pengawasan terhadap kawasan/ lahan yang belum dimanfaatkan yang mengakibatkan terganggunya kebersihan dan keindahan kota dan/ atau menimbulkan gangguan terhadap lingkungan;
 - k. Pelaksanaan evaluasi terhadap pengawasan pemanfaatan ruang dan memberikan pertimbangan untuk melakukan revisi rencana tata ruang;
 - l. Penyelenggaraan penertiban terhadap kegiatan membangun bangunan gedung maupun bangunan bukan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan sesuai dengan hirarki pelaksanaan penertiban berdasarkan peraturan bangunan dan petunjuk pelaksanaannya;
 - m. Pengumpulan bahan untuk dilakukan koordinasi penertiban bangunan dengan instansi terkait; dan
 - n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG PERTANAHAN

- (1) Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pelayanan dan penyelenggaraan di bidang

pertanahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pertanahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data base di bidang pertanahan;
 - b. Pelaksanaan inventarisasi tanah;
 - c. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian;
 - d. Pelaksanaan pengurusan sertifikat tanah aset pemerintah daerah;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pertanahan;
 - f. Pelaksanaan tukar menukar tanah aset pemerintah daerah;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
 - h. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6.1 Rincian Tugas Seksi Inventarisasi Tanah

- (1) Seksi Inventarisasi Tanah mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan, pengumpulan dan pengelolaan data informasi, inventarisasi, pemberian sosialisasi di bidang inventarisasi tanah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi inventarisasi tanah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan perencanaan teknis inventarisasi tanah;
 - b. Pelaksanaan inventarisasi aset tanah Pemerintah Daerah;
 - c. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan tanah dari satuan kerja untuk kepentingan pembangunan;
 - d. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi tanah kosong dan tanah ulayat;
 - e. Pelaksanaan kompilasi data dan informasi peta pola penggunaan tanah, peta wilayah tanah usaha, peta persediaan tanah, RT, RW dan rencana pembangunan;
 - f. Pelaksanaan penyusunan draft final rencana kegiatan penggunaan tanah;
 - g. Pelaksanaan koordinasi terhadap draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait;
 - h. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi pertanahan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6.2 Rincian Tugas Seksi Pengadaan Tanah

- (1) Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan, pengumpulan dan pengelolaan data informasi, inventarisasi, pemberian sosialisasi di bidang pengadaan tanah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan perencanaan teknis inventarisasi tanah;
 - b. Pelaksanaan proses kegiatan pengadaan/ pembebasan tanah dan proses sertifikasi untuk aset daerah;
 - c. Pelaksanaan proses pengadaan tanah dan proses sertifikasi untuk kepentingan/ fasilitas umum;
 - d. Pelaksanaan proses administrasi serah terima pengadaan tanah;
 - e. Pelaksanaan proses penerbitan surat keputusan subyek dan obyek retribusi tanah

- serta ganti rugi;
- f. Pelaksanaan proses tukar menukar aset pemerintah daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6.3 Rincian Tugas Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah

- (1) Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan, pengumpulan dan pengelolaan data informasi, inventarisasi, pemberian sosialisasi di bidang penyelesaian permasalahan tanah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan perencanaan teknis penyelesaian permasalahan tanah;
 - b. Penerima, peneliti, dan pengkaji laporan pengaduan konflik/ sengketa tanah dan permasalahan tanah;
 - c. Pencegahan meluasnya dampak konflik/ sengketa tanah dan permasalahan tanah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan penetapan langkah-langkah penanganan penyelesaian konflik/ sengketa tanah dan permasalahan tanah;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan perundangan pertanahan;
 - g. Pelaksanaan pembentukan tim pengawasan dan pengendalian pertanahan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum keadaan per 30 April 2017 adalah sebanyak 112 orang yang dibagi atas personil yang menduduki eselon dan staf, dimana PNS yang memiliki eselon terdiri atas 25 orang dan 61 orang staf serta didukung oleh 41 orang tenaga honorer.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 31 Des 2015 (orang)	Porsentase (%)
IV	3	2,68
III	37	33,03
II	27	24,11
I	4	3,57
Honor	41	36,61
Jumlah	112	100%

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian DPUPR Bukittinggi, April 2017

Komposisi Pegawai pada Dinas PUPR per April Tahun 2017 didominasi oleh tenaga PNS dari golongan I, II, III dan IV yaitu sebanyak 63,39 % dengan komposisi paling besar diisi oleh

golongan III, sedangkan paling sedikit diisi oleh PNS golongan IV. Dari 71 personil PNS di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi secara dominan diisi oleh PNS berpendidikan S1 yaitu sebanyak 39,44% dan berpendidikan SLTA sebanyak 38,03% sedangkan paling sedikit berpendidikan SLTP dengan persentase 2,82% dan SD dengan persentase yang sama sebesar 2,82%. Untuk peningkatan kompetensi dan Kualitas SDM Aparatur DPUPR perlu peningkatan penjejaran pendidikan minimal setara S1 dan pengoptimalisasi dalam mengikuti diklat dan pelatihan teknis ke PU an dalam peningkatan kemampuan aparatur dalam upaya pelayanan infrastruktur padamasyarakat.

Tabel 2.1
Komposisi PNS DPUPR berdasarkan latar belakang pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Porsentase (%)
S3	0	0,0%
S2	5	7,04%
S1	28	39,44%
D III	7	9,86%
D II	0	0,0%
D I	0	0,0%
SLTA	27	38,03%
SLTP	2	2,82%
SD	2	2,82%
JUMLAH	71	100,0%

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian DPUPR Bukittinggi, April 2017

2.2.2 Sarana Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Disamping sumber daya manusia (man) yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana (machine) merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dan menyelenggarakan urusan wajib pekerjaan umum, urusan penataan ruang, pertanahan dan urusan-urusan lainnya

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengelola aset yang cukup banyak, begitu juga dengan aset yang termasuk sarana dan prasarana pendukung dalam peningkatan kinerja organisasi peralatan dan mesin serta gedung yang digunakan sebagai peralatan pendukung urusan pekerjaan umum dalam rangka membangun fasilitas dan dalam upaya memberikan pelayanan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bukittinggi.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Mempedomani Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2010 direvisi dengan Peraturan Menteri No.01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M.2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terdapat beberapa fokus layanan yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diantaranya Pelayanan Sumber Daya Air ; Pelayanan Jalan; Pelayanan Air Minum; Pelayanan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan); Penataan Bangunan dan Lingkungan; Jasa Konstruksi; Penataan Ruang; Rumah Layak Huni dan Terjangkau; Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s/d Tahun 2015 yang dikompilasikan dengan Laporan SPM Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Pelayanan Sumber Daya Air;.

▪ Air Minum

Kapasitas sumber daya air yang dimiliki PDAM Kota Bukittinggi Tahun 2012 untuk melayani 80% jumlah penduduk administratif sebagaimana target MDGs yaitu 90.855 jiwa, adalah sebesar 199 lt/detik. Sedangkan kapasitas sumber daya air yang seharusnya dimiliki untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduk adalah 274 lt/detik

▪ Irigasi

Untuk ketersediaan air irigasi sampai tahun 2014 sebesar 458 lt/dtk atau 99,56% dengan target 100%, dimana kondisi saat ini panjang irigasi 775,75 M' dengan kondisi baik 90% dengan Panjang saluran irigasi ½ teknis pada tahun 2016 sepanjang 36473 M'

2. Kinerja Pelayanan Jalan;

▪ Jalan;

Sampai dengan tahun 2016, tidak ada penambahan ruas jalan baru. Panjang jalan eksisting yang ada hingga tahun 2016 ini sepanjang 160,71 kilometer yang terdiri dari 375 ruas dengan 9,86 Km Jalan Nasional, 5,145 Km Jalan Provinsi dan 145,71 Km Jalan Kota.

Tabel 2.3
Data Jalan Kota Bukittinggi

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
1	Jln. Sudirman	1,772	P	ABTB	12,00	Aspal	B
2	Jln. Birugo Puhun	0,461	K	ABTB	4,00	Aspal	B
3	Jln. Birugo Puhun I	0,422	K	ABTB	4,00	Aspal	B
4	Jln. H.Burhan	0,365	K	ABTB	4,00	Aspal	S
5	Jln. H.Burhan I	0,098	K	ABTB	4,00	Aspal	S
6	Jln. H.Burhan II	0,177	K	ABTB	4,00	Aspal	S
7	Jln. Adinegoro	0,389	K	ABTB	5,50	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
8	Jln. Adinegoro - M. Yamin	0,618	K	ABTB	5,50	Aspal	S
9	Jln. Adinegoro dari M. Yamin ke By Pass	0,198	K	ABTB	5,50	Aspal	S
10	Jln. Adinegoro I	0,325	K	ABTB	3,00	Aspal	S
11	Jln. Adinegoro II	0,379	K	ABTB	3,00	Aspal	S
12	Jln. Samping Mesjid Jamiak Aur Kuning	0,124	K	ABTB	3,00	Aspal	S
13	Jln. Belakang Mesjid Jamiak Aur Kuning	0,129	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
14	Jln. Birugo Bungo	0,404	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
15	Jln. Komplek Sungai Puar	0,149	K	ABTB	3,00	Aspal	B
16	Jln. Abd. Hafid Jalil	1,274	K	ABTB	6,00	Aspal	S
17	Jln. Samping SD Masyitah	0,131	K	ABTB	3,00	Aspal	S
18	Jln. Hakam Kari Sulaiman	0,386	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
19	Jln. Hakam Kari Sulaiman I	0,097	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
20	Jln. Hakam Kari Sulaiman II	0,052	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
21	Jln. Banda Kubu	0,153	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
22	Jln. Lubuk Gadang	0,104	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
23	Jln. Lubuk Tengah	0,091	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
24	Jln. Surau Ketek Kuning	0,093	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
25	Jln. Kesemek	0,101	K	ABTB	3,00	Aspal	S
26	Jln. Tangah Jua	0,517	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
27	Jln. Tangah Jua I	0,388	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
28	Jln. Tangah Jua II	0,353	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
29	Jln. Alpukat	0,131	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
30	Jln. Birugo Indah	0,338	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
31	Jln. Birugo Indah I	0,162	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
32	Jln. Birugo Indah II	0,095	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
33	Jln. Komplek PU	0,156	K	ABTB	4,00	Aspal	S
34	Jln. Jambu Mente	0,219	K	ABTB	3,00	Aspal	S
35	Jln. Rambutan	0,172	K	ABTB	3,00	Aspal	S
36	Jln. Apel	0,143	K	ABTB	3,00	Aspal	S
37	Jln. Belakang RRI	0,138	K	ABTB	3,00	Aspal	S
38	Jln. Durian	0,598	K	ABTB	3,00	Aspal	S
39	Jln. Jeruk	0,076	K	ABTB	3,00	Aspal	S
40	Jln. Salak	0,152	K	ABTB	4,00	Aspal	S
41	Jln. Anggur	0,077	K	ABTB	3,00	Aspal	S
42	Jln. Duku	0,132	K	ABTB	3,00	Aspal	S
43	Jln. Mangga	0,146	K	ABTB	3,00	Aspal	S
44	Jln. Manggis	0,097	K	ABTB	3,00	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
45	Jln. Markisa	0,092	K	ABTB	3,00	Aspal	S
46	Jln. Pepaya	0,228	K	ABTB	3,00	Aspal	S
47	Jln. Saos	0,104	K	ABTB	3,00	Aspal	S
48	Jln. Nangka	0,193	K	ABTB	3,00	Aspal	S
49	Jln. Sawo	0,084	K	ABTB	3,00	Aspal	S
50	Jln. Kelapa	0,080	K	ABTB	3,00	Aspal	S
51	Jln. Tomat	0,424	K	ABTB	3,00	Aspal	S
52	Jln. Sukun	0,259	K	ABTB	3,00	Aspal	S
53	Jln. Belimbing	0,260	K	ABTB	3,00	Aspal	S
54	Jln. Cermai	0,139	K	ABTB	3,00	Aspal	S
55	Jln. Pendidikan	0,545	K	ABTB	4,00	Aspal	B
56	Jln. Panca Budi	0,328	K	ABTB	3,00	Aspal	S
57	Jln. Komplek KOREM	1,951	K	ABTB	4,00	Aspal	B
58	Jln. Sertu Komarudin	0,318	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
59	Jln. Tabek Gadang	0,890	K	ABTB	4,00	Aspal	B
60	Jln. Taruko Tabek Gadang	0,186	K	ABTB	3,00	Aspal	RB
61	Jln. Bukittinggi-By Pass	6,800	N	ABTB	12,00	Aspal	S
62	Jln. Prof. M. Yamin SH	1,254	K	ABTB	7,00	Aspal	S
63	Jln. Samping Bengkel IDI Daya Motor	0,181	K	ABTB	2,50	Aspal	RB
64	Jln. B. St. Rajo Ameh	0,944	K	ABTB	4,00	Aspal	S
65	Jln. Batu Turak	0,440	K	ABTB	3,00	Aspal	S
66	Jln. DKK Aur Kuning	0,163	K	ABTB	3,50	Aspal	RR
67	Jln. Belakang DKK	0,387	K	ABTB	3,50	Aspal	RR
68	Jln. Komplek Shahiral Ilmi	0,174	K	ABTB	3,00	Aspal	S
69	Jln. Komplek Bukittinggi Indah	0,732	K	ABTB	3,00	Aspal	S
70	Jln. Diponegoro	0,681	K	ABTB	6,00	Aspal	B
71	Jln. Tigo Baleh	1,390	K	ABTB	6,00	Aspal	S
72	Jln. Puskesmas 13	0,121	K	ABTB	4,00	Aspal	B
73	Jln. Koto Katiak	0,559	K	ABTB	4,000	Aspal	B
74	Jln. Parit Antang	0,289	K	ABTB	4,00	Aspal	B
75	Jln. Ladang Cakiah	0,630	K	ABTB	3,00	Aspal	S
76	Jln. Kubu Tanjung	1,012	K	ABTB	6,00	Aspal	B
77	Jln. Sumur	1,300	K	ABTB	3,50	Aspal	B
78	Jln. Daujung (PDRI)	1,216	K	ABTB	3,00	Aspal	B
79	Jln. Pabeloan	0,480	K	ABTB	3,50	Aspal	B
80	Jln. Kurai	1,106	K	ABTB	4,00	Aspal	B
81	Jln. Lingkung By Pass Aur Kuning	2,106	K	ABTB	3,00	Aspal	RB

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
82	Jln. Batang Masang	0,435	K	ABTB	5,00	Aspal	S
83	Jln. Komplek UNP	0,075	K	ABTB	4,00	Aspal	S
84	Jln. Bayangkara I	0,320	K	ABTB	3,00	Aspal	S
85	Jln. Bayangkara II	0,242	K	ABTB	3,00	Aspal	S
86	Jln. Bayangkara III	0,159	K	ABTB	4,00	Aspal	S
87	Jln. Komplek RSUP	0,280	K	ABTB	3,00	Aspal	RB
88	Jln. Manunggal Belakang Balok	0,121	K	ABTB	3,00	Aspal	S
89	Jln. Kehakiman	0,714	K	ABTB	3,00	Aspal	B
90	Jln. Kehakiman I	0,094	K	ABTB	3,00	Aspal	S
91	Jln. Kehakiman II	0,094	K	ABTB	3,00	Aspal	S
92	Jln. Perwira	0,546	K	ABTB	12,00	Aspal	B
93	Jln. Perwira I	0,202	K	ABTB	3,00	Aspal	B
94	Jln. Perwira II	0,197	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
95	Jln. Perwira III	0,152	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
96	Jln. Perwira I Dalam	0,056	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
97	Jln. Perwira Ujung	0,097	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
98	Jln. Perwira Ujung I	0,050	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
99	Jln. Perwira Ujung II	0,129	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
100	Jln. Perwira Ujung III	0,115	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
101	Jln. Perawat	0,299	K	ABTB	3,00	Aspal	S
102	Jln. Perawat I	0,132	K	ABTB	3,00	Aspal	S
103	Jln. Perawat II	0,159	K	ABTB	3,00	Aspal	S
104	Jln. Perawat III	0,054	K	ABTB	3,00	Aspal	S
105	Jln. Perawat IV	0,088	K	ABTB	3,00	Aspal	S
106	Jln. Perawat V	0,094	K	ABTB	3,00	Aspal	S
107	Jln. Perawat VI	0,128	K	ABTB	3,00	Aspal	S
108	Jln. Perawat VII	0,044	K	ABTB	3,00	Aspal	S
109	Jln. Prof. Hazairin	0,309	K	ABTB	4,00	Aspal	S
110	Jln. Komplek PLN Belakang Balok	0,341	K	ABTB	6,00	Aspal	S
111	Jln. Kejaksaan Belakang Balok	0,217	K	ABTB	4,00	Aspal	S
112	Jln. Kejaksaan Dalam I Belakang Balok	0,086	K	ABTB	4,00	Aspal	S
113	Jln. Kejaksaan Dalam II Belakang Balok	0,082	K	ABTB	4,00	Aspal	S
114	Jln. Kejaksaan Dalam III Belakang Balok	0,166	K	ABTB	4,00	Aspal	S
115	Jln. Guguk Panjang	0,081	K	ABTB	2,00	Aspal	RR
116	Jln. Batang Ombilin	0,306	K	ABTB	6,00	Aspal	B
117	Jln. Batang Ombilin I	0,099	K	ABTB	3,00	Aspal	B
118	Jln. Batang Ombilin II	0,143	K	ABTB	3,00	Aspal	B

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
119	Jln. Batang Ombilin III	0,076	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
120	Jln. Batang Ombilin IV	0,109	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
121	Jln. Batang Agam	0,378	K	ABTB	6,00	Aspal	B
122	Jln. Batang Agam I	0,077	K	ABTB	4,00	Aspal	B
123	Jln. Batang Antokan	0,350	K	GP	3,00	Aspal	B
124	Jln. Bagindo Aziz Chan	0,090	K	GP	3,00	Aspal	B
125	Jln. Tan Malaka	0,264	K	GP	4,00	Aspal	S
126	Jln. Jend. Urip Sumohardjo	0,462	K	GP	9,00	Aspal	B
127	Jln. Nawawi	0,228	K	GP	6,00	Aspal	B
128	Jln. Guru Hamzah	0,158	K	GP	4,00	Aspal	B
129	Jln. Sutan Syahril	1,508	K	GP	8,00	Aspal	B
130	Jln. M. Syafei	0,634	K	GP	8,00	Aspal	B
131	Jln. Melati	0,419	K	GP	3,00	Aspal	RR
132	Jln. Pusri	0,072	K	GP	4,00	Aspal	RR
133	Jln. Imam Bonjol	0,311	K	GP	12,00	Aspal	S
134	Jln. Depan DPRD	0,111	K	GP	7,00	Aspal	S
135	Jln. Panorama	0,910	P	GP	8,00	Aspal	B
136	Jln. H. Agus Salim	0,401	K	GP	6,00	Aspal	B
137	Jln. Setia Budi	0,227	K	GP	4,00	Aspal	B
138	Jln. Tk. Rao	0,184	K	GP	4,00	Aspal	S
139	Jln. Parak Kopi	0,077	K	GP	4,00	Aspal	RR
140	Jln. Tuanku Kurai	0,134	K	GP	4,00	Aspal	S
141	Jln. Binuang	1,087	K	GP	4,00	Aspal	B
142	Jln. Banto Laweh	0,496	K	GP	4,00	Aspal	S
143	Jln. Rabain	0,373	K	GP	4,00	Aspal	RB
144	Jln. Istana	0,274	K	GP	9,00	Aspal	B
145	Jln. Lenggogeni	0,223	K	GP	5,00	Aspal	RR
146	Jln. Yos Sudarso	0,228	K	GP	7,00	Aspal	S
147	Jln. Tengku Nan Renceh	0,217	K	GP	6,00	Aspal	B
148	Jln. Ahmad Karim	0,289	K	GP	6,00	Aspal	B
149	Jln. Teuku Umar	0,217	K	GP	6,00	Aspal	B
150	Jln. Angkatan 45	0,708	K	GP	5,00	Aspal	S
151	Jln. Tarok Tarandam	0,145	K	GP	3,50	Aspal	RR
152	Jln. Pincuran Gaung	0,526	K	GP	3,00	Aspal	RR
153	Jln. Hamka	1,587	K	GP	8,00	Aspal	B
154	Jln. Konsolidasi Batu Hampa	1,146	K	GP	3,00	Aspal	B
155	Jln. I. Teja Sukmana	0,361	K	GP	5,00	Aspal	B
156	Jln. I. Teja Sukmana Menuju SD Depan	0,077	K	GP	3,00	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
	SMK 1						
157	Jln. Komplek STM Negeri Bukittinggi	0,348	K	GP	3,00	Aspal	RR
158	Jln. Komplek Insan Kamil	0,177	K	GP	4,00	Aspal	S
159	Jln. Komplek Pemda Belakang SMK 1 Bukittinggi	0,140	K	GP	3,00	Aspal	S
160	Jln. Parak Kubang	0,334	K	GP	4,00	Aspal	S
161	Jln. Parak Kubang I	0,484	K	GP	4,00	Aspal	RB
162	Jln. Parak Kubang II	0,484	K	GP	4,00	Aspal	RB
163	Jln. AURI	0,167	K	GP	4,00	Aspal	RB
164	Jln. Pasar Aur	0,298	K	GP	4,00	Aspal	RB
165	Jln. Belakang Pasar Sayur	0,250	K	GP	5,00	Aspal	RR
166	Jln. Sumurapak	0,511	K	GP	5,00	Aspal	S
167	Jln. Sumurapak I	0,239	K	GP	4,00	Aspal	RR
168	Jln. Teja Sukmana I	0,241	K	GP	4,00	Aspal	B
169	Jln. Tanjung I	0,142	K	GP	4,00	Aspal	RB
170	Jln. Tanjung II	0,140	K	GP	4,00	Aspal	RB
171	Jln. Tanjung III	0,138	K	GP	4,00	Aspal	RB
172	Jln. Tanjung IV	0,179	K	GP	4,00	Aspal	RB
173	Jln. Tanjung V	0,181	K	GP	4,00	Aspal	RB
174	Jln. Barumbuang I	0,092	K	GP	4,00	Aspal	RB
175	Jln. Barumbuang II	0,119	K	GP	4,00	Aspal	RB
176	Jln. Barumbuang III	0,146	K	GP	4,00	Aspal	RB
177	Jln. Barumbuang IV	0,131	K	GP	4,00	Aspal	RB
178	Jln. Barumbuang V	0,155	K	GP	4,00	Aspal	RB
179	Jln. Bonjo Baru	0,483	K	GP	4,00	Aspal	RB
180	Jln. Ujung Bukit	0,456	K	GP	4,00	Aspal	RR
181	Jln. Anggrek	0,296	K	GP	3,00	Aspal	S
182	Jln. Dahlia	0,191	K	GP	3,00	Aspal	S
183	Jln. Komplek SMK KOSGORO	0,069	K	GP	3,00	Aspal	S
184	Jln. Komplek SMK MUHAMMADIYAH	0,057	K	GP	3,00	Aspal	S
185	Jln. Komplek Az Hadi	0,139	K	GP	3,00	Aspal	S
186	Jln. Darussalam	0,731	K	GP	3,00	Aspal	RR
187	Jln. Syech Ibrahim Musa	0,635	K	GP	5,00	Aspal	B
188	Jln. Syech Ibrahim Musa I	0,251	K	GP	4,00	Aspal	B
189	Jln. Syech Ibrahim Musa II	0,098	K	GP	4,00	Aspal	B
190	Jln. Syech Ibrahim Musa III	0,166	K	GP	4,00	Aspal	B
191	Jln. Syech Ibrahim Musa IV	0,043	K	GP	4,00	Aspal	B
192	Jln. Syech Ibrahim Musa V	0,347	K	GP	4,00	Aspal	B

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
193	Jln. Sijolang	0,131	K	GP	4,00	Aspal	B
194	Jln. Sijolang I	0,110	K	GP	4,00	Aspal	B
195	Jln. Syech Arasulli	0,609	K	GP	6,00	Aspal	B
196	Jln. Perintis Kemerdekaan	0,758	K	GP	12,00	Aspal	S
197	Jln. Mesjid Agung	0,131	K	GP	3,00	Aspal	RB
198	Jln. Umar Gafar	0,204	K	GP	4,00	Aspal	RR
199	Jln. Umar Gafar I T. Sawah	0,672	K	GP	3,00	Aspal	RR
200	Jln. Umar Gafar II T. Sawah	0,091	K	GP	3,00	Aspal	RR
201	Jln. Umar Gafar III T. Sawah	0,180	K	GP	3,00	Aspal	RR
202	Jln. Umar Gafar IV T. Sawah	0,136	K	GP	3,00	Aspal	RR
203	Jln. Umar Gafar V T. Sawah	0,099	K	GP	3,00	Aspal	RR
204	Jln. Mutiara I	0,185	K	GP	3,00	Aspal	RR
205	Jln. Mutiara II	0,113	K	GP	3,00	Aspal	RR
206	Jln. Mutiara III	0,228	K	GP	3,00	Aspal	RR
207	Jln. Mutiara IV	0,059	K	GP	3,00	Aspal	RR
208	Jln. Mutiara V	0,056	K	GP	3,00	Aspal	RR
209	Jln. U. DT Bagindo	0,208	K	GP	4,00	Aspal	RR
210	Jln. U. DT Bagindo I	0,143	K	GP	4,00	Aspal	S
211	Jln. Baitul Ridwan	0,325	K	GP	4,00	Aspal	S
212	Jln. Syech Jamil Jambek	0,529	K	GP	8,00	Aspal	S
213	Jln. K.H Ahmad Dahlan	0,472	K	GP	3,00	Aspal	B
214	Jln. Samping SMA 1	0,330	K	GP	3,00	Aspal	RR
215	Jln. Komplek Pertanian	0,625	K	GP	4,00	Aspal	S
216	Jln. Konsolidasi Belakang Dangau GON Raya Lama	0,415	K	GP	3,00	Aspal	RB
217	Jln. Situpo Raya	0,752	K	GP	4,00	Aspal	B
218	Jln. Parik Natuang	0,903	K	GP	3,00	Aspal	RR
219	Jln. Pramuka	0,111	K	GP	6,00	Aspal	B
220	Jln. Sawah Paduan	1,328	K	GP	3,00	Aspal	B
221	Jln. Ahmad Yani	0,734	K	GP	12,00	Aspal	B
222	Jln. Minangkabau	0,232	K	GP	6,00	Aspal	S
223	Jln. Muka Pasar	0,366	K	GP	2,50	Aspal	B
224	Jln. Kumango	0,162	K	GP	4,00	Aspal	RB
225	Jln. Belakang Pasar	0,181	K	GP	3,00	Aspal	RR
226	Jln. Syech Bantam	0,462	K	GP	6,00	Aspal	RB
227	Jln. Syekh D. Rasyidi	0,309	K	GP	6,00	Aspal	S
228	Jln. Dr. Rivai	0,639	P	GP	8,00	Aspal	B
229	Jln. Lapangan Ateh Ngarai	0,190	K	GP	5,00	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
230	Jln. Belakang Lapangan Ateh Ngarai	0,136	K	GP	2,50	Beton	S
231	Jln. Tentara Pelajar	0,468	K	GP	6,00	Aspal	B
232	Jln. Benteng	0,207	K	GP	4,00	Aspal	S
233	Jln. PMI	0,118	K	GP	5,00	Aspal	B
234	Jln. Bung Tomo	0,334	K	GP	3,50	Aspal	B
235	Jln. Singgalang	0,076	K	GP	3,00	Aspal	B
236	Jln. Sago	0,157	K	GP	3,00	Aspal	S
237	Jln. Talang	0,069	K	GP	3,00	Aspal	S
238	Jln. Pasaman	0,073	K	GP	3,00	Aspal	RR
239	Jln. Tandikat	0,084	K	GP	3,00	Aspal	RR
240	Jln. Cindua Mato	0,464	K	GP	5,00	Aspal	S
241	Jln. Pemuda	0,633	K	GP	10,00	Aspal	B
242	Jln. Sukarno Hatta	3,062	N/K	GP	8,00	Aspal	B
243	Jln. Abu Bakar	0,084	K	GP	4,00	Aspal	S
244	Jln. Kesehatan	0,537	K	GP	10,00	Aspal	B
245	Jln. Veteran	1,824	P	GP	8,00	Aspal	B
246	Jln. Bukit Apit	0,574	K	GP	4,00	Aspal	B
247	Jln. SMP Bukit Apit	0,226		GP	4,00	Aspal	RR
248	Jln. Jambak Dalam	0,705	K	GP	3,00	Aspal	S
249	Jln. Jambak Muko	0,222	K	GP	3,00	Aspal	S
250	Jln. Bukit Sangkut	0,966	K	GP	4,00	Aspal	B
251	Jln. Padat Karya II	0,255	K	GP	2,50	Aspal	B
252	Jln. Merapi	0,152	K	GP	3,00	Aspal	B
253	Jln. Angku Basa	0,359	K	GP	5,50	Aspal	S
254	Jln. Komplek Pemda Angku Basa	0,383	K	GP	3,00	Aspal	RR
255	Jln. Kabun Pulasan	0,880	K	GP	4,00	Aspal	B
256	Jln. Kabun Pulasan Dalam	0,754	K	GP	3,00	Aspal	RR
257	Jln. TDR	0,340	K	GP	4,00	Aspal	B
258	Jln. IKPS	0,220	K	GP	3,00	Aspal	S
259	Jln. Koto Barangai	0,631	K	GP	3,00	Aspal	RR
260	Jln. Panganak	0,300	K	GP	4,00	Aspal	B
261	Jln. SD Negeri 10 Pintu Kabun	0,094	K	GP	3,00	Aspal	S
262	Jln. Ranjau	0,623	K	GP	3,00	Aspal	B
263	Jln. Bukit Cegek	0,547	K	GP	3,50	Aspal	B
264	Jln. Tabek Tuhua	0,671	K	GP	3,00	Aspal	B
265	Jln. Padat Karya IIB	0,520	K	GP	3,00	Aspal	B
266	Jln. Padat Karya IIIA	0,580	K	GP	3,00	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
267	Jln. Kirab Remaja	0,364	K	MKS	3,00	Aspal	S
268	Jln. Jangkak Dalam	0,523	K	MKS	3,00	Aspal	S
269	Jln. Bundo Kandung	0,412	K	MKS	4,00	Aspal	S
270	Jln. Dt. M. B. Nan Kuniang	0,711	K	MKS	4,00	Aspal	B
271	Jln. Kosolidasi Pulai Anak Air	0,689	K	MKS	3,00	Aspal	S
272	Jln. Atas Panganak	0,760	K	MKS	4,00	Aspal	B
273	Jln. Koto Selayan	0,731	K	MKS	4,00	Aspal	S
274	Jln. Dt. Mangkuto Ameh	1,733	K	MKS	4,00	Aspal	S
275	Jln. Parak Tinggi Karatu	0,445	K	MKS	4,00	Aspal	S
276	Jln. Parak Tinggi - Jl. PDRI	0,846	K	MKS	4,00	Aspal	S
277	Jln. Komplek Polisi Gulidiak	1,169	K	MKS	4,00	Aspal	S
278	Jln. Komplek Mahkota Mas	0,728	K	MKS	3,00	Aspal	B
279	Jln. Paninjauan	0,745	K	MKS	4,00	Aspal	B
280	Jln. Samping STAIN	0,229	K	MKS	3,00	Aspal	B
281	Jln. Komplek STAIN	0,239	K	MKS	3,00	Aspal	B
282	Jln. Gulidiak	0,691	K	MKS	3,00	Aspal	S
283	Jln. Saadudin Jambek	0,803	K	MKS	6,00	Aspal	B
284	Jln. Komplek Perumahan Taman Primavera (Parak Kaco)	0,967	K	MKS	3,00	Aspal	B
285	Jln. Koto Dalam	0,274	K	MKS	3,00	Aspal	S
286	Jln. Koto Bawah	0,255	K	MKS	3,00	Aspal	S
287	Jln. Lakuang	0,416	K	MKS	3,00	Aspal	S
288	Jln. Asrama Polisi Pulai	0,463	K	MKS	3,00	Aspal	RR
289	Jln. Manunggal Karya I Pulai Anak Air	0,550	K	MKS	3,00	Aspal	S
290	Jln. Belakang Masjid Manggis Ganting	0,676	K	MKS	3,00	Aspal	S
291	Jln. Bahar kamil	0,344	K	MKS	6,00	Aspal	B
292	Jln. Bahar kamil Menuju Hotel Pusako	0,273	K	MKS	4,00	Aspal	S
293	Jln. Pondok Batu Bata Pulai Anak Air	0,175	K	MKS	3,00	Aspal	S
294	Jln. Sukarno Hatta -Hotel Pusako	0,216	K	MKS	4,00	Aspal	S
295	Jln. Mr Assaat	1,047	K	MKS	6,00	Aspal	S
296	Jln. Sanjai	0,871	K	MKS	3,00	Aspal	S
297	Jln. Banto Darano	0,643	K	MKS	4,00	Aspal	RB
298	Jln. Talao	1,178	K	MKS	4,00	Aspal	S
299	Jln. Komplek Pemda Guguk Bulek	0,374	K	MKS	4,00	Aspal	S
300	Jln. Dr. A.K Gani	0,602	K	MKS	6,00	Aspal	S
301	Jln. Komplek Primavera	0,596	K	MKS	3,00	Aspal	S
302	Jln. Flamboyan	0,326	K	MKS	3,00	Aspal	S
303	Jln. Flamboyan I	0,271	K	MKS	3,00	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
304	Jln. Flamboyan II	0,184	K	MKS	3,00	Aspal	S
305	Jln. Flamboyan III	0,196	K	MKS	3,00	Aspal	S
306	Jln. Flamboyan IV	0,188	K	MKS	3,00	Aspal	S
307	Jln. Kamboja	0,339	K	MKS	3,00	Aspal	S
308	Jln. Kamboja I	0,057	K	MKS	3,00	Aspal	S
309	Jln. Kamboja II	0,095	K	MKS	3,00	Aspal	S
310	Jln. Aster	0,507	K	MKS	3,00	Aspal	S
311	Jln. Anggrek Guguk Bulek	0,230	K	MKS	3,00	Aspal	S
312	Jln. Melati Guguk Bulek	0,228	K	MKS	3,00	Aspal	S
313	Jln. Nusa Indah	0,153	K	MKS	3,00	Aspal	S
314	Jln. Komplek PUSIDO	0,283	K	MKS	3,00	Tanah	S
315	Jln. Sarajo	0,287	K	MKS	4,00	Aspal	S
316	Jln. Jalan Ke SD 18	0,256	K	MKS	2,50	Aspal	B
317	Jln. H. Abdul Manan	1,189	K	MKS	6,00	Aspal	B
318	Jln. Komplek Pesantren Al Munawwarah	0,341	K	MKS	3,00	Aspal	S
319	Jln. Munggu Tarapuang	1,023	K	MKS	3,00	Aspal	RB
320	Jln. GOR Bermawi	0,198	K	MKS	3,00	Aspal	B
321	Jln. Pusido	0,198	K	MKS	3,00	Aspal	RR
322	Jln. Belakang Baitul Jalal	0,715	K	MKS	3,00	Aspal	S
323	Jln. Mandiangin	0,986	K	MKS	6,00	Aspal	B
324	Jln. Swadaya	0,354	K	MKS	3,00	Aspal	B
325	Jln. Samping Mesjid Sukra	0,086	K	MKS	3,00	Aspal	B
326	Jln. Dahlia Depan Mesjid Sukra	0,530	K	MKS	3,00	Aspal	S
327	Jln. Bahder Johan	0,805	K	MKS	3,50	Aspal	S
328	Jln. Pasar Pagi Tembok	0,271	K	MKS	4,50	Aspal	RR
329	Jln. SD Inpres Jangkak	0,141	K	MKS	3,00	Aspal	B
330	Jln. Resevoir	0,084	K	MKS	3,00	Aspal	B
331	Jln. Bukit Mandiangin	1,343	K	MKS	2,50	Aspal	RR
332	Jln. H. Miskin	0,931	K	MKS	6,00	Aspal	B
333	Jln. Kusuma Bhakti	1,447	K	MKS	6,00	Aspal	B
334	Jln. Bukit Gulai bancah	2,032	K	MKS	8,00	Aspal	S
335	Jln. Komplek Gulai Bancah	0,565	K	MKS	3,00	Aspal	S
336	Jln. Komplek Pemda Bukittinggi	0,336	K	MKS	3,00	Aspal	RR
337	Jln. Manunggal Sakato Gulai Bancah	0,272	K	MKS	3,00	Aspal	S
338	Jln. Luak Anyia	0,523	K	MKS	6,00	Aspal	B
339	Jln. Veteran-Kantor Balai Kota Bukittinggi	0,177	K	MKS	8,00	Aspal	S
340	Jln. Ipuah	0,251	K	MKS	3,50	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
341	Jln. Cempaka	0,206	K	MKS	3,00	Aspal	S
342	Jln. Cendana	0,619	K	MKS	3,00	Aspal	S
343	Jln. Cendana I	0,118	K	MKS	3,00	Aspal	S
344	Jln. Lingkar Gulai Bancah	0,355	K	MKS	3,00	Aspal	S
345	Jln. Samping Mesjid Al Wustha	0,207	K	MKS	3,00	Aspal	RR
346	Jln. lingkar Batang Agam	0,281	K	MKS	3,00	Aspal	RR
347	Jln. Guru Tuo	0,560	K	MKS	4,00	Aspal	B
348	Jln. Guru Tuo ke SD 05 Pintu Kabun	0,249	K	MKS	3,00	Aspal	RR
349	Jln. Manunggal I Pintu Kabun	0,345	K	MKS	3,00	Aspal	S
350	Jln. Pintu Kabun	0,495	K	MKS	5,00	Aspal	B
351	Jln. Melati Pintu Kabun	0,106	K	MKS	3,00	Aspal	S
352	Jln. Kemuning Pintu Kabun	0,184	K	MKS	3,00	Aspal	S
353	Jln. Kemuning I Pintu Kabun	0,146	K	MKS	3,00	Aspal	S
354	Jln. Kemuning II Pintu Kabun	0,166	K	MKS	3,00	Aspal	S
355	Jln. Kemuning III Pintu Kabun	0,145	K	MKS	3,00	Aspal	S
356	Jln. Mawar Pintu Kabun	0,177	K	MKS	3,00	Aspal	S
357	Jln. Mawar I Pintu Kabun	0,107	K	MKS	3,00	Aspal	S
358	Jln. Mawar II Pintu Kabun	0,068	K	MKS	3,00	Aspal	S
359	Jln. Mawar III Pintu Kabun	0,131	K	MKS	3,00	Aspal	S
360	Jln. Lubuk Rangkayo	0,400	K	MKS	3,00	Aspal	B
361	Jln. Kinantan	0,950	K	MKS	5,00	Aspal	B
362	Jln. Kubu	0,247	K	MKS	2,50	Aspal	RR
363	Jln. Kubu Ateh	0,617	K	MKS	2,50	Aspal	RR
364	Jln. Padat Karya Gulai Bancah	0,393	K	MKS	2,50	Aspal	S
365	Jln. Padat Karya I a Gulai Bancah	0,723	K	MKS	3,00	Aspal	RR
366	Jln. Gumarang	0,287	K	MKS	3,00	Aspal	S
367	Jln. Bukik Umpang-umpang	0,442	K	MKS	2,50	Aspal	RR
368	Jln. Manunggal Bukik	0,631	K	MKS	2,50	Aspal	S
369	Jln. Pisang	0,478	K	MKS	3,00	Aspal	S
370	Jln. Anggur Atas Panganak	0,211	K	MKS	6,00	Aspal	S
371	Jln. Panorama Baru	3,354	K	MKS	6,00	Aspal	S
372	Jln. Taman Panorama Baru	0,659	K	MKS	5,00	Aspal	S
373	Jln. Kesehatan Gigi	0,168	K	MKS	3,00	Aspal	S
374	Jln. Padat Karya IV	0,800	K	MKS	3,00	Aspal	B
375	Jln. Padat Karya I A	0,580	K	MKS	3,00	Aspal	B
376	Jln. Padat Karya II A	0,630	K	MKS	3,00	Aspal	B
377	Jln. Padat Karya II B	0,625	K	MKS	3,00	Aspal	B

No Ruas	Nama Ruas	Panjang	Status	Termasuk	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
		Ruas	Adm	Kecamatan		Type	Kondisi
378	Jln. Padat Karya III A	0,478	K	MKS	5,00	Aspal	B

Sumber : Data Jalan 2016

Dari keseluruhan panjang jalan kota (yang penanganannya menjadi kewenangan pemerintah Kota Bukittinggi, sebesar 46,10% kondisi sedang, 27,49% kondisi baik, 19,41% kondisi rusak ringan dan 7,00% rusak berat.

▪ Jembatan;

Sampai dengan tahun 2016, terdapat 31 unit jembatan yang melintasi 2 (dua) sungai yaitu Batang Tambuo dan Batang Agam dengan panjang keseluruhan berjumlah 236 M'.

Tabel 2.4
Data Jembatan Kota Bukittinggi

No	Nama Jembatan	Nama Ruas	Panjang (m)	Lebar (m)	Kondisi
	<u>BATANG AGAM</u>				
1	Sianok	Jl. Binuang	24,00	6,00	1
2	Bahder Johan	Jl. Bahder johan	6,00	4,00	1
3	Kp. Tarandam	Jl. Bagindo azischanan	6,00	4,00	1
4	Batang Masang/ Prona	Jl. Prona	5,00	4,00	1
5	St. Syahrir	Jl. Sutan Syahrir	6,00	18,00	1
6	Adinegoro	Jl. Adinegoro	6,00	8,00	1
7	Palolok	Jl. Haji Miskin	9,00	9,00	0
8	Anak Air / Sukarno - Hatta	Jl. Soekarno Hatta	3,00	15,00	0
9	Gulai Bancah	Jl. Kusuma Bhakti	8,00	8,20	1
10	Damar I (Box culvert)	Jl. Syeck Arrasuli	4,00	4,00	1
11	Damar II	Jl. Soekarno Hatta	4,00	12,00	0
12	Melati	Jl. Melati	3,50	4,00	1
13	Syeh Arasuli	Jl. Syeck Arrasuli	4,00	7,50	2
14	Manunggal / By Pass	Jl. Manunggal By Pass	9,00	7,00	1
15	Prof. Hamka	Jl. Prof. Hamka	3,50	13,00	1
16	Pakan Kurai	Jl. Pakan Kurai	6,00	4,70	2
17	Unggek Datuk Bagindo	Jl. Unggek Datuk Bagindo	5,00	4,50	1
	<u>BATANG TAMBUE</u>				
18	Mr. Asaat	Jl. Mr. Assaat	3,50	10,00	2
19	AK. Gani	Jl. AK. Gani	4,50	9,50	1
20	Sanjai Dalam 1	Jl. Sanjai	3,00	5,50	1
21	Garegeh	Jl. Soekarno Hatta	10,00	14,00	1
22	Hajerat I	Jl. Hujerat	3,00	9,00	1
23	Hujerat II	Jl. Hujerat	9,00	9,00	1
24	Tabek Gadang	Jl. Tabek Gadang	9,00	9,00	0

No	Nama Jembatan	Nama Ruas	Panjang (m)	Lebar (m)	Kondisi
25	Tambuo	Jl. Diponegoro	12,50	11,50	1
26	Parit Antang	Jl. Parit Antang	21,00	10,00	1
27	Mangkuto Ameh	Jl. Mangkuto Ameh	12,00	9,00	1
28	Kurai	Jl. Kurai	14,00	10,00	1
29	Koto Selayan	Jl. Koto Selayan	5,00	6,50	1
30	Talao Dalam	Jl. Talao	11,00	7,00	1
31	Sanjai Dalam 2	Jl. Sanjai	6,50	7,50	1

▪ Trotoar

Dari 194,11 kilometer yang terdiri dari 8,85 Km Jalan Nasional, 5,09 Km Jalan Provinsi dan 180,17 Km Jalan Kota, terdapat 68,858 Km jalan telah memiliki trotoar dengan rincian 35,352 Km trotoar pada bagian kiri dan 33,506 Km pada bagian Kanan.

▪ Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).

Jumlah keseluruhan lampu penerangan jalan umum Kota Bukittinggi sampai dengan Tahun 2016 berjumlah 2951 titik yang terbagi dalam 64 panel. Titik PJU dimaksud terdiri dari 1384 lampu mercuri dan 1126 titik lampu TL 40 Watt dan sisa berupa lampu taman, lampu hias, lampu sorot dan jenis lainnya.

3. Pelayanan Air Minum;

Sesuai dengan dokumen SPAM, jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum yang aman pada tahun 2015 adalah 44.621 jiwa 2015 dari jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebesar 120.491 jiwa atau sesuai dengan target 37,64%.

4. Pelayanan Penyehatan Lingkungan (Sanitasi Lingkungan);

Untuk sistem air limbah skala komunitas / kawasan / kota dilaksanakan dengan Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Sanitasi Lingkungan yang dilaksanakan dari tahun 2009 sampai sekarang. Kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan MCK untuk kapasitas 20-25 KK. Sedangkan untuk sistem air limbah skala kawasan atau kota Kota Bukittinggi baru melakukan kegiatan pembangunan pada tahun 2013 yang berlokasi pada kelurahan Belakang Balok;

5. Drainase

Sesuai dengan SPM ditargetkan bahwa sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota dapat mengatasi dampak banjir sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam), dan tidak lebih dari 2 kali setahun.

Sesuai dengan data bidang pengairan dan drainase dari 73339 M' saluran riol/drainase, 50% dalam kondisi baik bahwa kondisi 2016 dengan kondisi genangan sebanyak 7 titik dengan lama genangan 1 s/d 2 jam dengan luas 8000 M2. Untuk mengatasi genangan dimaksud tambahan kebutuhan saluran diestimasi 4365 M'.

Tabel 2.5
Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan

No	Jenis prasarana / Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemel. (kali/thn)
				B	H	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)		(iv)	(vii)	(vi)	(vii)

No	Jenis prasarana / Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemel. (kali/thn)
				B	H	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)		(iv)	(vii)	(vi)	(vii)
I.	<u>Saluran Drainase Primer . A</u>							
1.	Drainase Birugo Puhun ke Rumah Potong	2,892	trapesium	1.60	2.00	Berfungsi	-	12
2.	Drainase Batas Kota ke Tugu Adipura	2,765	Trapesium / U	1.50	1.60	Berfungsi	-	12
3.	Drainase Belakang Ambun Suri ke Tugu Adipura	1,298	trapesium	1.25	1.70	Berfungsi	-	12
4.	Drainase Depan PLN ke Bendung Rumah Potong	961	Trapesium / U	2.80	2.00	Berfungsi	-	12
5.	Drainase Tengah Jua ke Batang Tambuo	5,445	Trapesium / U	1.20	1.50	Berfungsi	-	12
6.	Drainase Samping BPR ke Simp. Jirek	2,900	Trapesium / U	2.00	1.20	Berfungsi	-	12
II.	<u>Saluran Drainase Primer . B</u>							
1.	Drainase Balai Kota / Makam Pahlawan	475	U	0.60	0.90	Berfungsi	-	12
2.	Drainase Samping BRI Aur Kuning ke Bandar Surian	625	Trapesium	1.30	1.60	Berfungsi	-	12
3.	Drainase Samping Balai Kota Gulai Bancah ke Tambuo	950	U / Buis			Berfungsi	-	12
III.	<u>Saluran Drainase Sekunder A.1</u>						-	
1.	Drainase Simpang Banto Laweh (jl. Binuang) ke Ngarai	1,057	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
2.	Drainase Simpang Inkorba Jl. Abdul Manan ke Jl. Bay Pass	1,000	U	1.00	1.50	Berfungsi	-	4
	dan Batang Agam	-						
3.	Drainase Batas Kota Taluak Jl. Hafid Jalil ke Jembatan Besi	1,300	U	1.80	1.00	Berfungsi	-	4
4.	Drainase Depan Mesjid Garegeh ke Batang Tambuo	500	U	0.70	1.00	Berfungsi	-	4
5.	Drainase Batas Kota Kapalo Koto ke Jembatan Parit Antang	1,500	U	0.70	1.00	Berfungsi	-	4
6.	Drainase Bukit Apit ke kabun Palasan	300	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
7.	Drainase Simpang Guguak Bulek ke guguak Randah	600	U	0.70	0.80	Berfungsi	-	4
8.	Drainase Jl. A.K. Gani	200	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
9.	Drainase Jl. Diponegoro s/d Jl. By Pass	162	Buis Ø 80	0.80		Berfungsi	-	4
10.	Drainase simpang Balai Kota Jl. Veteran ke Banda Jirek	425	Trapesium	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
11.	Drainase Jl. Saat Duddin Jambek	650	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
12.	Drainase Jl. Manunggal anak Air ke Saluran Surian	625	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
13.	Drainase Blk. Tk. Garegeh ke Tambuo	950	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
14.	Drinase Jl. Kinantan	950	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
15.	Drainase Jl. Parak Kaco	560	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
16.	Drainase Jl. Soekarno Hatta	2,235	U	0.80	1.00	Berfungsi	-	4
17.	Drainase Jl. Mr. Assaat	400	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
18.	Drainase Pasar Banto - Simpang Mandiangin	590	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
19.	Drainase Simpang Mandiangin ke Simpang Surau Gadang	1,917	U	0.80	0.95	Berfungsi	-	4

No	Jenis prasarana / Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemel. (kali/thn)
				B	H	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)		(iv)	(vii)	(vi)	(vii)
20.	Drainase Komplek Pasar Banto	400	U	0.80	1.00	Berfungsi	-	4
21.	Drainase Komplek Pasar Bawah	600	U	0.80	1.00	Berfungsi	-	4
22.	Drainase Nawawi ke Depan Stasiun	400	U	0.80	1.00	Berfungsi	-	4
23.	Drainase Simpang Jirek ke Jembatan Palolok	280	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
24.	Drainase Jembatan Palolok ke Jembatan Gulai Bancah	1,008	Buis Beton Ø 80	0.80	0.80	Berfungsi	-	4
26.	Drainase Simpang Aur Kuning ke Simpang Tarok	520	U	0.60	0.90	Berfungsi	-	4
27.	Drainase ke Belakang Pos Siskamling Jl. Perawat Blok E	35	U	0.40	0.60	Berfungsi	-	4
	Belakang Balok	-						
28.	Drainase Sawah Paduan ke Pustaka Indonesia	500	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
29.	Drainase Komplek Pasar Aur Kuning	450	U	1.00	1.00	Berfungsi	-	4
30.	Drainase Jl. Mr. Assaat di RW I	400	U	0.80	1.00	Berfungsi	-	4
31.	Drainase Jl. Barumbuang III - Jl. Mandailing	132	U	0.60	0.70	Berfungsi	-	4
32.	Drainase TK Kutilang - Jl. Melati Stasiun	181	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
33.	Drainase Pasar Atas ke Pasar Lereng	300	U	0.50	1.00	Berfungsi	-	
34.	Drainase Samping Bank BPD ke Simpang Tembok	635	U	0.60	0.70	Berfungsi	-	
35.	Drainase Air Limbah Perumahan Belakang TMSBK ke Jl. A. Yani	150	U	0.60	0.70	Berfungsi	-	
36.	Drainase Smp. Tarok Dipo ke Simp Mesjid Nurul hak	195	U	0.40	0.60	Berfungsi	-	
37.	Drainase Simp. Nurul Haq ke Simp. Tembok	440	U	0.70	0.90	Berfungsi	-	
IV.	<u>Saluran Drainase Sekunder A.2</u>						-	
1.	Drainase Samping DPR ke Jl. Cindua Mato	2,475	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
2.	Drainase Depan PGSD Jl. Batang Masang - Jl. Ombilin	600	Trapezium / U	0.60	0.90	Berfungsi	-	4
3.	Drainase Jl. Parak Kubang - Jl. By Pass ke Bandar Surian	1,400	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
4.	Drainase Samping Pengadilan ke Batang Agam	510	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
5.	Drainase Birugo Puhun ke ladang Kubu	500	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
6.	Drainase Simpang Inkorba ke Batang Agam	250	U	0.70	0.90	Berfungsi	-	4
7.	Drainase Parak Kubang	1,500	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
8.	Drainase Jl. Panganak Atas	750	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
9.	Drainase Jl. Bagindo Azizchan	245	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
10.	Drainase Jl. Kusuma Bhakti	940	U	0.60	0.70	Berfungsi	-	4
11.	Drainase Depan Masjid Jamik Tigo Baleh	326	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
12.	Drainase Kapalo Koto ke Belakang Masjid Jamik Tigo Baleh	600	U	0.60	0.70	Berfungsi	-	4
V.	<u>Saluran Drainase Sekunder B.1</u>							
1.	Drainase Pincuran Gaung	894	Trapezium / U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4

No	Jenis prasarana / Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemel. (kali/thn)
				B	H	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)		(iv)	(vii)	(vi)	(vii)
2.	Drainase Depan SD Bertingkat Belakang Balok ke SMP I	1,106	U / Buis	0.60	0.70	Berfungsi	-	4
3.	Drainase Barumbuang I ke Saluran Induk Samping By Pass	750	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
4.	Drainase dibelakang STAIN Garegeh ke Saluran Sekunder	1,500	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
5.	Riol Samping Jl. Angku Basa ke Bukit Pauh	350	U	0.40	0.60	Berfungsi	-	4
VI.	<u>Saluran Drainase Tersier</u>						-	
1.	Riol Jenjang 40 ke Pasar Banto	91	U	0.30	0.50	Berfungsi	-	
2.	Riol komplek Pasar Atas	500	U	0.35	0.55	Berfungsi	-	
3.	Riol Samping Aur Kuning ke Jl. Parak Kubang	350	U	0.40	0.60	Berfungsi	-	
4.	Riol Kampung Jawa Lama dan Benteng ke Jl. Teuku Umar	100	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	
VII	<u>Pintu Air</u>	24				Berfungsi	-	4
							-	
VIII.	<u>Kolam Retensi</u>	3	Trapezium	21.00	2.50	Berfungsi	-	12
							-	
IX.	<u>Trash rack / saringan sampah</u>	3				Berfungsi	-	12

6. Penataan Bangunan dan Lingkungan

▪ Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengurusan IMB mulai tahun 2008 telah diserahkan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan pada tahun 2014 menjadi Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) untuk menjalankan amanat perizinan satu pintu. Data jumlah IMB yang telah diterbitkan oleh BP2TPM pada tahun 2014 adalah 435 izin, sedangkan rencana capaian jumlah bangunan gedung yang memiliki IMB tidak dimiliki oleh BP2TPM

▪ Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)

Pedoman harga standar bangunan gedung negara di Kota Bukittinggi setiap tahunnya telah ditetapkan termasuk harga satuan pekerjaan konstruksi lainnya sebagai acuan perencanaan dan pelaksana dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

7. Jasa Konstruksi

▪ Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

IUJK diterbitkan oleh Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) untuk menjalankan amanat perizinan satu pintu yang salah satu mekanismenya melalui rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jumlah permohonan IUJK yang masuk sebanyak 35 izin atau realisasi 100%, dengan menerbitkan IUJK sebanyak 35 izin.

- **Sistem Informasi Jasa Konstruksi**

Hingga tahun 2015 Kota Bukittinggi belum memiliki Sistem Informasi Jasa Konstruksi, hal ini disebabkan belum adanya sumber daya manusia dan struktur organisasi yang jelas yang menjelaskan tugas dan fungsinya. Pada Tahun 2016 melalui program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan dilaksanakan kegiatan pembinaan jasa konstruksi bagi pelaku usaha dan pihak terkait yang terlibat termasuk di dalamnya masyarakat jasa konstruksi.

8. Penataan Ruang

- **Informasi Penataan Ruang**

Kota Bukittinggi pada tahun 2015 telah dilakukan penyusunan dokumen revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2010-2030. Karena revisi tersebut maka kegiatan ketersediaan peta analog belum dilakukan. Tetapi untuk mendukung SPM ini Kota Bukittinggi telah melaksanakan sebanyak 6 kegiatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan dan RTBL.

- **Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR**

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan konsultasi publik untuk penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) khusus kawasan Aur Biugo Tigo Baleh, dan Konsultasi Publik untuk penyusunan Dokumen Revisi RTRW.

- **Izin Pemanfaatan Ruang**

Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan target Izin Pemanfaatan Ruang pada Tahun 2015 adalah 100%, dan realisasi yang didapatkan dari indikator tersebut sebesar 100%, dengan telah disahkannya Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Bukittinggi pada tahun 2011, sehingga pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang yang seharusnya berpedoman pada Peraturan Daerah, dapat dilaksanakan.

- **Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang**

Untuk merealisasikan SPM ini, kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Tata Ruang Seksi Pengawasan dan Pengendalian. Dari pengaduan yang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 80% dapat ditangani.

9. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Merupakan jumlah lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas yang meliputi jalan, drainase, sanitasi, air bersih dan listrik yang memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja waktu tertentu.

10. Pertanahan

Per 31 Desember 2016 tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebanyak 389 persil tanah dengan luas 1.249.161,76 M2 berupa tanah bangunan gedung, tanah jalan dan tanah kosong yang tidak dimanfaatkan. Dari total 389 persil tanah yang dikuasai, sebanyak 149 persil dengan luas 494.921,80 M2 telah memiliki sertifikat dan sebanyak 240 persil dengan luas 754.239,96 belum memiliki sertifikat

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam pengembangan sistem manajemen kelembagaan dan pengembangan pelayanan SKPD masih ditemui beberapa tantangan dan peluang yang bila dikelola akan berdampak signifikan terhadap pelayanan SKPD, beberapa dari hal tersebut adalah:

a. Lingkungan internal

- **Kekuatan (Strength)**
 - Tersedianya kualitas sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi berdasarkan latar belakang disiplin ilmu ke PU-an
 - Adanya struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas,
 - Terjalannya koordinasi dengan instansi terkait,
 - Adanya petunjuk teknis tentang penataan dan pelaksanaan pembangunan perkotaan yang didukung oleh Perda,
 - Dukungan gedung kantor dan fasilitas penunjang yang cukup.
- **Kelemahan (Weaknesses)**
 - Kurangnya Sumber daya aparatur secara kuantitas.
 - Terbatasnya kesempatan mengikuti pelatihan.
 - Kurangnya sarana dan prasarana.
 - Kurang lancarnya alur pelaporan (Evaluasi),
 - Belum terlaksananya seluruh rencana kegiatan yang disusun.
 - Kurangnya pemahaman aparatur terhadap Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.
 - Masih kurangnya koordinasi antar bidang dalam lingkup internal kedinasan.

Lingkungan internal merupakan unsur-unsur penentu bagaimana mengupayakan Kinerja Staf (SDM) untuk menangani tugas-tugas kedinasan secara profesional. Dalam peningkatan pelayanan aparatur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi, dirasa masih diperlukan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan teknik di bidang perencanaan wilayah dan kota, dan teknik sipil untuk menghadapi tugas-tugas masa depan dalam rangka melaksanakan otonomi ke level pemerintahan tingkat bawah dan menghadapi pertumbuhan / peningkatan pembangunan.

Disamping itu untuk mengoptimalkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi kepada masing-masing pegawai diupayakan untuk meningkatkan pemahaman dan peningkatan kemampuan kerja serta memperkuat rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diemban.

b. Lingkungan Eksternal

- **Peluang (Opportunities)**
 - Dukungan yang tinggi dari pemerintah, instansi terkait serta masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan perkotaan sesuai dengan rencana Pekerjaan Umum secara menyeluruh dan berkesinambungan,
 - Adanya partisipasi masyarakat dan pihak terkait membantu mensosialisasikan pelaksanaan pembangunan perkotaan sesuai dengan perencanaan,
 - Adanya Perda yang mendukung penerapan rencana pembangunan perkotaan yang telah ditetapkan,

- Adanya kerjasama dengan para investor untuk merealisasikan pembangunan perkotaan,
- Adanya program kerjasama pendekatan wilayah guna kelancaran dan kesempurnaan rencana pembangunan perkotaan,
- Adanya kondisi alam dan letak Kota Bukittinggi yang strategis.
- Ancaman (Threats)
 - Sulitnya pembebasan tanah guna penerapan rencana pembangunan ruang kota secara optimal,
 - Sebahagian masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi dalam upaya merealisasikan rencana pembangunan kota, sehingga terjadi pergeseran / penyimpangan dari rencana semula,
 - Terbatasnya lahan / areal pembangunan kota yang menyebabkan sangat tingginya nilai tanah, sehingga masyarakat tidak lagi mempedulikan rencana pembangunan kota,
 - Sulitnya birokrasi antar wilayah guna kerjasama pendekatan wilayah.

Lingkungan Eksternal merupakan unsur-unsur yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi untuk menentukan strategi apa yang akan diambil dalam proses pencapaian visi dan misi seoptimal mungkin.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, merupakan perencanaan keberlanjutan pembangunan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Capaian kinerja renstra periode sebelumnya telah menghasilkan berbagai kemajuan dan ketersediaan infrastruktur yang cukup berarti namun masih dihadapkan berbagai permasalahan pembangunan.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi berdasarkan capaian kinerja dan hambatan yang dihadapkan pada periode sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan penunjang layanan internal kedinasan;
 - a. Terbatasnya sumber data dan informasi baik itu secara primer maupun sekunder sebagai acuan utama dalam yang penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM juga disebabkan oleh masih kurangnya kepedulian aparatur terhadap kebutuhan dan kekuatan suatu data dan informasi
 - b. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas dan UPTD Dinas belum optimal.
 - c. Kurangnya pemahaman Bidang-bidang pada SKPD terhadap Tupoksi masing-masing dalam penyelenggaraan pelayanan baik secara internal maupun secara eksternal.
 - d. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang atau meningkatkan kinerja aparatur baik peralatan kerja internal maupun peralatan untuk kebutuhan pelayanan kepada masyarakat;
2. Permasalahan bidang jalan dan bangunan pelengkap;
 - a. Penurunan kondisi jalan dan jembatan; dimana 64,73% kondisi sedang, 21,39% kondisi baik, 24,03% kondisi rusak ringan dan 2,92% rusak berat dari total panjang jalan 194,11 kilometer yang terdiri dari 8,85 Km Jalan Nasional, 5,09 Km Jalan Provinsi dan 180,17 Km Jalan Kota.
 - b. Dari 194,11 kilometer jalan baru 68,858 Km jalan telah memiliki trotoar dengan rincian 35,352 Km trotoar pada bagian kiri dan 33,506 Km pada bagian Kanan;
 - c. Dari 2951 titik lampu PJU yang terbagi dalam 64 panel dimana 1384 lampu merupakan mercuri dan 1126 titik lampu TL 40 Watt dan sisa berupa lampu taman, lampu hias, lampu sorot dan jenis lainnya. Sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah akan dilakukan revitalisasi terhadap lampu-lampu jalan diatas terutama lampu mercuri.

3. Genangan dan drainase; kondisi 2016 dengan kondisi genangan sebanyak 7 titik dengan lama genangan 1 s/d 2 jam dengan luas 8000 M2. Untuk mengatasi genangan dimaksud tambahan kebutuhan saluran diestimasi 4365 M'
4. Air Minum ; dimana 93% masyarakat telah mengakses air minum yang layak dari berbagai sumber, namun baru 37,64% (kondisi 2015) cakupan layanan perpipaan. Tahun 2020 diamanatkan seluruh masyarakat (100%) memiliki ketersediaan air minum yang layak sesuai dengan pemenuhan target universal access (sanitasi dan air bersih) .
5. Penataan Bangunan dan Lingkungan; masih banyaknya bangunan yang belum tertata serta perda RTRW dan RDTR dan dokumen teknis lainnya yang masih diperlukan dalam penataan dan pemanfaatan ruang kota;
6. Masih belum selesainya konsolidasi tanah *by pass* dan masih terdapatnya masalah pertanahan masyarakat lainnya.

3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program kepala daerah dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Dengan kata lain, RPJM merupakan hasil visi dan misi dan program dari walikota dan Wakil Walikota pada periode tersebut, dimana Walikota Kepala Daerah Kota Bukittinggi terpilih Periode 2016 – 2021 adalah pasangan H. RAMLAN NURMATIAS, SH dan H. IRWANDI, SH. Adapun Visi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah **“TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA , PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA”**

Terhadap Visi Jangka Menengah Daerah Kota tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum, penataan ruang dan pertanahan serta tugas pembantuan lainnya, perlu menjabarkan, memprogramkan dan melaksanakan visi dimaksud sesuai tugas pokoknya agar hasil pembangunan sesuai dengan mutu, waktu dan kualitas yang dipersyaratkan.

- **KOTA TUJUAN PARIWISATA ;** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan berperan dalam menyediakan infrastruktur pendukung pariwisata yang layak seperti jalan akses menuju; kawasan/objek wisata, penyediaan utilitas, berupa jaringan air minum, sanitas, drainase, pedestrian/trotoar dan penerangan jalan umum. Dan penyediaan desain infrastruktur yang inovatif dan kreatif sehingga melahirkan destinasi-destinasi baru pendukung kepariwisataan;
- **KOTA TUJUAN PENDIDIKAN, KESEHATAN;** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan berperan dalam membantu/memfasilitasi dinas terkait secara teknis dapat meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memenuhi persyaratan teknis serta memiliki jalan akses yang cukup baik terhadap pejalan kaki maupun kendaraan, serta memelihara kawasan sarana dan prasarana bebas dari genangan dengan lingkungan yang sehat dan nyaman.

- **KOTA TUJUAN PERDAGANGAN DAN JASA;** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan berperan dalam mendorong penyediaan infrastruktur yang memadai, baik berupa penyediaan prasarana jalan dan untuk kelancaran mobilisasi orang dan barang menuju centra-centra pemasaran ataupun sebaliknya disamping memberikan saran teknis terhadap SKPD terkait.

Dalam mewujudkan pencapaian visi daerah **“TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA , PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA”** maka didukung dengan 5 (lima) misi pembangunan yaitu;

1. Mengembangkan dan Memberdayakan Partisipasi Berbagai Potensi Pemangku Kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat)
2. Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan
3. Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan
4. Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat

Berdasarkan misi diatas, misi 3 “Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan” terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sedang misi lainnya memiliki hubungan yang terkait secara tidak langsung.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030;

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan dokumen RTRW tersebut.

Dalam PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, dari fungsi pariwisata, Kota Bukittinggi termasuk sebagai salah satu tujuan wisata nasional, terkait dengan karakter budaya dan sejarah kota dimasa lalu. Dalam konstelasi struktur perwilayahan nasional, Bukittinggi termasuk dalam kawasan andalan Agam-Bukittinggi dan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bagi PKL disekitarnya yaitu Padangpanjang, Lubuk Sikaping, Payakumbuh, dan Batusangkar, terkait sektor unggulan pada sektor perkebunan, pariwisata dan pertanian.

Dari segi penyediaan infrastruktur kawasan, kawasan perkotaan Bukittinggi memiliki nilai ekonomis di bidang transportasi darat. Hal ini dikarenakan oleh posisi Kota Bukittinggi yang berada pada simpul transportasi regional nasional di Pulau Sumatera. Kota Bukittinggi ini merupakan simpul poros utara-selatan dan poros barat-timur. Poros utara selatan ini berupa jalan

lintas tengah (jalinteng) yang menghubungkan antara Banda Aceh hingga ke Lampung dan berpotongan dengan poros barat-timur yang berupa jalan lintas Padang-Pekanbaru. Kedua jaringan jalan ini merupakan jaringan jalan arteri primer nasional yang secara regional memiliki nilai ekonomis nasional.

Dalam konteks RTRW Pulau Sumatra dan RTRW Provinsi Sumatra, Kota Bukittinggi diarahkan Pusat Kegiatan Wilayah sebagai pusat pelayanan sekunder dengan perkiraan jumlah penduduk pendukung 150.000 Jiwa pada tahun 2019. Selain fungsi lindung yang berperan cukup besar dalam konteks wilayah, terkait kondisi fisiknya, fungsi budidaya yang diarahkan mencakup fungsi permukiman perkotaan, kehutanan, perkebunan, dan pariwisata.

A. Arahan Struktur Ruang

1. Pusat Pelayanan; Pusat pelayanan Kota Bukittinggi secara hirarkis beserta lokasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Pusat Pelayanan Primer
 - Kawasan Pasar Atas
 - Kawasan Aur Kuning
- 2) Pusat Pelayanan Sekunder
 - Kawasan Gulai Bancah
 - Kawasan Belakang Balok
 - Kawasan Campago Ipuah
- 3) Sub Pusat pelayanan Kota
 - Kawasan Garegeh
 - Kawasan Ladang Cakiah

Sedangkan pusat lingkungan diorientasikan dalam kegiatan sosial budaya bagi permukiman disekitarnya. Pusat lingkungan dikembangkan dengan beberapa titik utama yang bertujuan menarik perkembangan Kota Bukittinggi ke arah selatan dan timur.

2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

1) Sistem jaringan jalan

Fungsi Jalan Arteri Primer terhadap transportasi Kota Bukittinggi adalah jalan-jalan yang menghubungkan kota tersebut dengan kota-kota besar lainnya dalam ibukota provinsi, atau ruas-ruas jalan yang menghubungkan antara satu PKN dengan PKN dalam satu provinsi, atau ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar Pusat Pelayanan Kota (Primer) dalam wilayah Kota Bukittinggi. Adapun jalan yang berperan sebagai jalan arteri primer adalah Jl. By Pass dan Jl. Soekarno Hatta. Sedangkan Fungsi Jalan Arteri Sekunder terhadap transportasi Kota Bukittinggi adalah jalan-jalan yang dapat berfungsi sebagai jalur pengalih arus lalu lintas angkutan utama yang menuju ke dan dari Kota Bukittinggi untuk mengurangi beban jalan Arteri Primer dan kepadatan lalu-lintas di dalam kota. Selain itu berfungsi juga melayani pergerakan dari Pusat Pelayanan Kota (Primer) ke Pusat Pelayanan Kota (Sekunder). Adapun jalan arteri sekunder adalah Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Pemuda, Jl. Diponegoro, Jl. St. Syahrir, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Veteran, Jl. Jend. Soedirman, Jl. Tigo Baleh, dan Jl. Bermawi St. Rajo Ameh.

Berdasarkan arahan RTRWN (PP26/2008) tentang Jalan Bebas Hambatan, jaringan jalan bebas hambatan non tol dikembangkan dengan menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi dengan melebarkan ruas jalan By Pass. Melalui upaya pelebaran ruas jalan By Pass, rencana pengembangan jalan bebas hambatan di Kota Bukittinggi

dilakukan dengan tanpa melakukan alihfungsi lahan-lahan pertanian dan ruang terbuka lainnya, sebagai salah satu upaya menjaga keseimbangan lingkungan kota. Untuk jalan kolektor sekunder, berfungsi menghubungkan antar pusat sekunder. Sedangkan jalan lokal merupakan ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar pusat lingkungan.

2) Sistem Perparkiran

Sebagai salah satu kota tujuan wisata dan perdagangan, Kota Bukittinggi diarahkan mempunyai sistem perparkiran khususnya pada kawasan perdagangan dan jasa serta pariwisata. Parkir bersama dalam bentuk pelataran parkir, taman parkir dan atau gedung parkir dapat dibangun pada semua peruntukan lahan.

Perencanaan sistem perparkiran khusus di luar kebutuhan perparkiran untuk aktivitas sehari-hari masyarakatnya diperlukan guna mendukung fungsi pariwisata. Sistem perparkiran yang bersifat off street dikembangkan di beberapa kawasan.

3) Sistem Prasarana Perkeretaapian

Prasarana perkeretaapian terdiri atas jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api. Keterpaduan antar jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalur kereta api lain serta dengan moda transportasi lain dilakukan di stasiun.

Jaringan jalur kereta api yang dikembangkan dapat dibagi atas:

- Jaringan jalur kereta api antar kota, menghubungkan Jalur Padang – Padang Panjang - Bukittinggi – Payakumbuh – Pekanbaru – Dumai. Jalur KA Padang Panjang – Payakumbuh, saat ini masih berupa jalan rel non operasi (jalan mati), sesuai dengan Renstra Ditjen Perkeretaapian Tahun 2010 – 2014, terdapat Program Peningkatan Jalan KA.
- Jaringan jalur kereta api perkotaan, melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang alik. Sistem kereta api yang akan dikembangkan adalah kereta api gantung. Jalur wisata yang memanfaatkan kereta gantung tersebut akan menghubungkan daya tarik wisata di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam dengan salah satunya memanfaatkan daya tarik wisata alam Ngarai Sianok.

Stasiun kereta api sebagai simpul jaringan jalur KA antarkota dikembangkan pada stasiun KA yang telah ada yaitu di Jl. Angkatan 45 Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang. Sedangkan stasiun kereta api perkotaan yang berfungsi sebagai jalur wisata dikembangkan pada beberapa titik daya tarik wisata.

3. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Kelistrikan

Sistem jaringan listrik di Kota Bukittinggi terdiri dari Jaringan transmisi tenaga listrik ditetapkan sebagai sistem interkoneksi meliputi Gardu Distribusi yang tersebar di Kota Bukittinggi; serta Jaringan tegangan menengah 20 KV yang keluar dari gardu induk melalui saluran udara tegangan menengah maupun saluran kabel tegangan menengah

Jaringan tegangan rendah 7 KV adalah saluran transmisi kabel tegangan rendah umumnya yang mengikuti pola jaringan jalan dan Jaringan Distribusi Listrik meliputi Distribusi Rayon Bukittinggi

4. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi di Kota Bukittinggi, diarahkan sebagai berikut:

- Pusat otomatisasi sambungan telepon di Kel. Bukit Cangang Kayu Ramang, Kec. Guguak Panjang
- Kantor Pos Besar di Kel. Bukit Cangang Kayu Ramang, Kec. Guguak Panjang
- Menara telekomunikasi (BTS) untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator di Kel. Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan dan Kel. Pakan Labuah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Hal ini dilakukan untuk memelihara estetika ruang udara Kota Bukittinggi.

5. Rencana Pengembangan Infrastruktur Perkotaan

1) Sistem Penyediaan Air Minum

- unit air baku; Prasarana air minum di Kota Bukittinggi memanfaatkan Mata Air Sungai Tanang, Mata Air Cingkariang, Sumur Bor Tabek Gadang, Sumur Bor Birugo, Sumur Dangkal Kubang Putih dan Air Permukaan dari Batang Sianok sebagai sumber airnya dengan Reservoir : Birugo 1, Birugo 2, Mandiangan, Benteng, Panorama Baru, dan Kuriman.
- unit produksi, meliputi unit-unit produksi yang ada saat ini dan rencana pengembangan untuk memenuhi rata-rata kebutuhan produksi di Kota Bukittinggi sebesar kurang lebih 810 liter/detik.

Terdapat juga penyediaan air minum secara konvensional yang tidak digolongkan ke dalam SPAM berupa penampungan air hujan, sumur dangkal, sumur pompa, instalasi air kemasan, dan sebagainya.

2) Sistem Jaringan Air Limbah

Sistem pembuangan air limbah setempat dilakukan secara individual maupun komunal. Sistem pembuangan air limbah dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah secara terpusat pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) baik skala kawasan (modular) atau skala kota dengan memperhatikan kondisi daya dukung lingkungan serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Sistem pembuangan air limbah terpusat dikembangkan pada kawasan perdagangan dan jasa yang dilengkapi dengan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) diarahkan disebelah Timur dan Tenggara Kota Bukittinggi.

3) Sistem Jaringan Drainase

Konsep pengembangan jaringan drainase adalah sebagai berikut.

- Aliran air diarahkan ke Ngarai Sianok, Batang Agam dan Batang Tambuo.
- Melakukan normalisasi pada saluran yang sudah tidak mampu menampung air hujan maupun air limbah, dengan memperlebar saluran (bila memungkinkan) ataupun dengan pendalaman dasar saluran.
- Karena daerah ini memiliki kontur pegunungan maka dimensi drainase semakin ke arah bawah seharusnya semakin melebar, agar dapat menampung debit air maksimum.

Sistem jaringan drainase primer memanfaatkan sungai. Kecenderungan kontur yang miring Kota Bukittinggi memberikan keuntungan terkait dalam proses pelimpasan air dari tempat yang lebih tinggi ke daratan yang lebih rendah yaitu Batang Sianok dan Batang Tambuo. Sedangkan sistem jaringan drainase sekunder cenderung mengikuti jaringan jalan. Sistem jaringan tersier cenderung berfungsi mengalirkan air dari rumah tangga ke sistem jaringan drainase sekunder. Sedangkan untuk membantu peresapan air hujan ke dalam tanah dimanfaatkan kolam retensi. Kolam Retensi diarahkan diKecamatan Guguk Panjang dan Kecamatan Mandiingin Koto Selayan.

3.4. Penentuan isu strategis

Perumusan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan renstra sebagai tahapan dalam menentukan arah kebijakan serta program pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan kedepannya.

Berdasarkan telaahaan terhadap permasalahan internal dinas, telaahaan terhadap visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih; kebijakan/renstra Disprasjaltarkim serta rensta kementerian PU dan Perumahan Rakyat dan telaahaan terhadap RTRW maka beberapa rumusan isu strategis yang muncul yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan SDM dan Peralatan serta sarana penunjang pekerjaan yang memadai yang dapat memacu pelaksanaan pekerjaan lebih kreatif dan inovatif.
2. Penurunan kondisi perkerasan jalan yang saat ini dominan dalam kondisi sedang dan akan menurun menjadi kondisi rusak ringan dan berat;
3. Revitalisasi dan penambahan lampu penerangan jalan umum sehingga menjadikan Bukittinggi Kota yang terang dan menunjang sebagai kota pendidikan, kesehatan serta perdagangan dan jasa.
4. Target 100-0-100 (100% akses air minum, dan 100% akses sanitasi layak) yang secara bersama-sama baik program dan kegiatan maupun pendanaannya menjadi prioritas baik dipusat maupun didaerah sebagai bentuk sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dengan pemerintah daerah;
5. Menjadikan RTRW Kota Bukittinggi sebagai matra spasial dalam pembangunan infrastruktur .
6. Pembangunan infrastruktur yang dapat mengatasi berbagai permasalahan seperti kesenjangan pembangunan antara kawasan pusat kota dengan kawasan pinggiran kota, dan mengatasi banjir/genangan di beberapa kawasan strategis Kota.
7. Tantangan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum kedepan juga erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 pilar pembangunan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Sehingga bagaimana pembangunan fisik, sosial dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan.
8. Perlu adanya perwujudan perkuatan perencanaan pembangunan pembangunan infrastruktur Ke PU an. Kelemahan-kelemahan yang terasa menggejala selama ini seperti keterbatasan ketersediaan data, statistic dan informasi secara bertahap melalui sasaran, tujuan, program dan kegiatan dalam Renstra diupayakan untuk ditiadakan.
9. Peningkatan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka penyediaan informasi, penyelesaian permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi;

▪ ***Tinjauan Visi dan Misi serta Rancangan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021.***

Visi Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi terpilih periode 2016-2021 yaitu *“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata , Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya”*.

Visi tersebut ditunjang dengan 5 (lima) misi yaitu:

1. Mengembangkan dan Memberdayakan Partisipasi Berbagai Potensi Pemangku Kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat);
2. Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan ;
3. Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan ;
4. Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat;

Sedangkan prioritas pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik;
3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Penanggulangan Kemiskinan;
6. Pelestarian lingkungan hidup;
7. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur;
9. Pengembangan Pariwisata;

Dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tersebut yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah menunjang pelaksanaan misi 3 yaitu *“Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan ; dengan prioritas pembangunan “Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur”*.

▪ ***Rancangan Renstra DPUPR 2018-2021.***

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi telah merumuskan rancangan renstra dengan visi : *“Terwujudnya infrastruktur kota dalam rangka mendukung Bukittinggi sebagai kota tujuan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya”*.

Visi tersebut didukung dengan misi:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan peralatan ke PU an;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur kota untuk mendukung pelayanan publik;
3. Meningkatkan penataan ruang kota serta mengendalikan dan mengarahkan perkembangan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota;
4. Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka penyediaan informasi, penyelesaian masalah pertanahan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi 2016-2021 dapat dilihat sebagai berikut:

- **Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan peralatan ke PU an**
 Tujuan dari Misi 1 yaitu : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan sasaran:
 - ✓ Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP
 - ✓ Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

Tabel 4.1
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016-2021 (Misi – 1)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	1. Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai SAKIP Dinas PUPR	B	B	B	B	B	B
	2 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan	Jumlah Laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	5	5	5	5	5	5

- **Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur kota untuk mendukung pelayanan publik.**

Tujuan dari Misi 2 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan dengan sasaran:
 - ✓ Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
2. Memberikan rasa aman terhadap bahaya banjir dan genangan, dengan sasaran:
 - ✓ Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan / banjir.
3. Meningkatnya cakupan air irigasi untuk daerah pertanian ; dengan sasaran:
 - ✓ Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi
4. Meningkatkan pengelolaan pembangunan gedung.
 - ✓ Meningkatnya mutu dan umur teknis bangunan publik/Gedung pemerintah
 - ✓ Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi
5. Pemenuhan target universal acces (sanitasi dan air bersih), dengan sasaran :
 - ✓ Pemenuhan kebutuhan air bersih
 - ✓ Pemenuhan drainase layak

Tabel 4.2
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016-2021 (Misi – 2)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Meningkatkan kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan	1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase tingkat jalan dan jembatan dengan kondisi baik	85,20%	87,30%	90%	92%	94%	95%
2. Memberikan rasa aman terhadap bahaya banjir dan genangan	1. Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan/ banjir.	Persentase wilayah/titik yang terkena dampak genangan/ banjir	100%	85%	85%	70%	55%	40%
3. Meningkatnya cakupan air irigasi untuk daerah pertanian	1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi	persentase wilayah cakupan irigasi yang terpenuhi	98%	98%	98%	98%	98%	97%
4. Meningkatkan pengelolaan pembangunan gedung.	1. Meningkatnya mutu dan umur teknis bangunan publik/Gedung pemerintah	persentase gedung /bangunan yang memenuhi standar layak fungsi	0%	0%	10%	20%	30%	40%
	2. Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi	persentase masyarakat yang membangun sesuai advice planning yang dikeluarkan	10%	10%	20%	40%	60%	75%
6. Pemenuhan target universal acces (sanitasi dan air bersih)	1. Pemenuhan kebutuhan air bersih	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	90,64%	90,64%	95,45%	97%	100%	100%
	2. Pemenuhan drainase layak	Persentase drainase perkotaan yang layak	40%	40%	55%	60%	65%	70%

- **Misi 3 : Meningkatkan penataan ruang kota serta mengendalikan dan mengarahkan perkembangan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota.**

Tujuan Misi 3 yaitu : Pengendalian dan pemanfaatan ruang kota; dengan sasaran:

- ✓ Peningkatan penataan ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang;

Tabel 4.3
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016-2021 (Misi – 3)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota.	1. Peningkatan penataan ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	60%	65%	70%	75%	80%	85%
		pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	50%	55%	60%	65%	70%	75%

- **Misi 4 : Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka penyediaan informasi, pengadaan, dan penyelesaian masalah pertanahan untuk kepentingan umum dan pembangunan**

Tujuan Misi 4 yaitu : Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan, dengan sasaran :

- ✓ Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas
- ✓ Selesainya konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah

Tabel 4.2
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016-2021 (Misi – 4)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan.	1. Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas	Persentase pelayanan pertanahan sesuai SOP	-	50%	55%	60%	65%	70%
	2 Selesainya konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah	Persentase konflik pertanahan pemerintah daerah diselesaikan	-	35%	40%	45%	55%	60%

Sesuai dengan nomenklatur SKPD yang baru, Bidang Pertanahan baru bergabung pada tahun 2017, sehingga tidak dapat dibuatkan target kinerja untuk tahun 2016.

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah metoda terpilih dan pola yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang sudah ditetapkan sebagaimana diuraikan pada Tabel sebelumnya. Strategi dan kebijakan jangka menengah ini harus mampu menunjukkan bagaimana cara Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu, strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2016-2021.

4.3.3 Strategi

Dalam mewujudkan tujuan atas misi yang telah ditetapkan maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien;
2. Menyediakan sarana dan prasarana aparatur yang memadai;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan menyangkut jasa konstruksi;
4. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana bina marga;
5. Mempertahankan, menambah serta meningkatkan kondisi, mutu dan fungsi jalan, jembatan dan irigasi;
6. Memelihara, merehabilitasi, membangun dan meningkatkan jaringan drainase untuk mengurangi titik genangan air ;
7. Meningkatkan mutu fasilitas fisik dasar dan prasarana umum;
8. Melakukan peningkatan cakupan pelayanan air bersih;
9. Melakukan penyediaan instalasi jaringan penerangan jalan umum (PJU) yang merata dan memadai;
10. Penyediaan Database ke-PU-an;
11. Meningkatkan ketertiban pemanfaatan ruang kota sesuai dengan RTRW;
12. Menertibkan pelanggaran terhadap pemanfaatan tata ruang kota yang tidak sesuai dengan RTRW;
13. Menyediakan informasi pertanahan yang berkualitas;
14. Menyelesaikan konflik pertanahan pemerintah daerah;
15. Melaksanakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

1.3.3 Kebijakan

Kebijakan yang dilakukan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengadakan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemajuan teknologi dan informasi;
3. Mengirimkan aparatur dan pelaksana jasa konstruksi untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi jasa konstruksi;
4. Mengadakan dan melakukan pemeliharaan alat-alat berat yang dibutuhkan;
5. Melakukan pengananan jalan, jembatan, dan irigasi sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab;

6. Menyiapkan perencanaan teknis serta mensosialisasikan rencana-rencana pembanguna jalan, jembatan dan irigasi ;
7. Melakukan pemetaan terhadap jaringan drainase yang yang perlu dipelihara, direhabilitasi, dibangun dan ditingkatkan;
8. Meningkatkan kapasitas produksi air baku air minum dengan dengan melakukan inovasi terhadap sumber air untuk air minum;
9. Melakukan pemetaan terhadap daerah yang membutuhkan PJU serta melakukan pembaharuan dan peremajaan terhadap PJU yang sudah tidak layak;
10. Menyiapkan database ke- PU an dalam bentuk data spasial (berbasis GIS);
11. Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar memanfaatkan ruang kota sesuai dengan RTRW;
12. Melakukan pendataan terhadap bangunan dalam kota;
13. Melakukan pengembangan informasi pertanahan dengan membuat arsip elektronik;
14. Melakukan mediasi dan pendekatan dengan pihak-pihak yang memiliki konflik pertanahan dengan pemerintah daerah;
15. Melakukan koordinasi dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi mengenai kebutuhan tanah dalam rangka pemenuhan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan kumpulan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan. dimana kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa atau sebagai suatu pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Dalam Renstra ini terdapat beberapa program dan kegiatan yang bersifat pure program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, seperti pembangunan infrastruktur ke PU an seperti Pengairan dan drainase, Jalan dan Jembatan, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Pertanahan dengan mengacu kepada rancangan program dan pagu pendanaan dalam RPJMD. Disisi lain juga terdapat kegiatan-kegiatan yang merupakan lintas SKPD dengan pertimbangan terbatasnya sumber daya aparatur teknis pada SKPD tersebut maka untuk penganggarannya masih ditampung dalam Rencana Program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan tahun perencanaan penganggarannya. Dalam Renstra ini juga terdapat kegiatan lintas wilayah seperti normalisasi batang/sungai yang melalui Kota Bukittinggi, dalam artian bahwa implementasi kegiatannya hanya pada bagian sungai yang melewati administrasi Bukittinggi.

Dalam renstra ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan kewenangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan yang dilaksanakan adalah Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang dalam pelaksanaannya ada yang bersifat rutin SKPD dan penunjang pelaksanaan urusan dalam pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran dengan target indikator yang telah disusun sebagaimana tergambar dalam table 5.1.

Tabel 5.1

**Rencana Program dan Kegiatan dan Indikator Kinerja
Sesuai Rancangan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
1.	MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan peralatan ke PU an					
	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	1. Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai SAKIP Dinas PUPR		Program pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran tiap tahunnya
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik/komunikasi yang yang dibayar
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak/penggandaan yang dilaksanakan
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kantor yang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman kantor yang dibeli
					Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat/koordinasi yang diikuti/dihadiri
					Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS dibayar
					Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Jasa pengamanan kantor yang dilaksanakan
					Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket yang di proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
					Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Jumlah paket yang ditunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek
					Penunjang Operasional Kegiatan Ke PU an	Jumlah kegiatan lapangan yang dibayarkan honor/lembur
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketsediaan bangunan dan parsarana pendukung
					Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	
								Pengadaan Peralatan Kantor	terlaksananya pengadaan peralatan kantor	
								Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	
								Pemeliharaan berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor dan Lanscape	
								Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat ketsediaan pakaian dinas	
								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan	Jumlah Laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan laporam dan dokumen perencanaan SKPD/dinas	
									Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun
									Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Jenis dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya
									Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Keuangan SKPD
									Fasilitasi kegiatan DAK bidang ke PU an	Jumlah bidang DAK yang difasilitasi
									Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase pemenuhan alat berat Kebinamargaan
									Pengadaan alat-alat berat	Jumlah alat berat yang diadakan/ dibeli
									Pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat berat yang dipelihara
2.	MISI 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur kota untuk mendukung pelayanan publik									
	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan	1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase tingkat jalan dan jembatan dengan kondisi baik					Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota dengan kondisi baik	
								Peningkatan Trotoar	Panjang Trotoar yang ditingkatkan	
								Pembangunan Trotoar	Panjang Trotoar yang dibangun	
								Peningkatan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang ditingkatkan	
								Pembangunan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang dibangun	
								Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	
								Rehabilitasi Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang direhab	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
					Pembangunan Box Culvert Pengecoran bahu/ badan jalan Penyusunan DED Jalan 2 Jalur Jl. Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta Pembangunan Jalan 2 Jalur Jl. Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta Perencanaan DAK Jalan	Jumlah box culvert yang dibangun Jumlah bahu/ badan jalan yang dicor Jumlah DED yang disusun Jalan 2 jalur yang dibangun Jumlah perencanaan Dak jalan yang dikerjalan
					Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase peningkatan kualitas jalan dari pemeliharaan
					Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Panjang Jalan Dalam Kota yang di rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin
					Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	Panjang Jembatan Dalam Kota yang di rehabilitasi/ Pemeliharaan
					Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Panjang Jalan trotoar yang di rehabilitasi/ pemeliharaan Rutin
					Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase wilayah/ jalan dengan penerangan jalan lengkap
					Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum yang dipelihara
					Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah/ direvitalisasi
					Revitalisasi Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah/ direvitalisasi
					Pembayaran Listrik Rekening PJU	Rekening Listrik PJU yang dibayar
					Program Sistim Informasi / Database Jalan Jembatan	Tingkat ketersediaan informasi/data base jalan
					Leger Jalan Kota Bukittinggi	Jumlah Dokumen leger Jalan Kota Bukittinggi
					Program Pengendalian Banjir	Persentase Pengurangan titik genangan
2. Memberikan rasa aman terhadap bahaya banjir dan genangan	1. Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan /banjir	Persentase wilayah/ titik yang terkena dampak genangan/ banjir			Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali	Panjang Pengerukan Sungai / Kali
					Pembuatan Sumur Resapan	Jumlah sumur resapan yang dibuat
					Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya	Persentase sungai yang terpelihara/ normalisasi
					Normalisasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
					Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pengamanan titik bahaya longsor
					Pemasangan Batu Bronjong/Dam bangunan	Panjang Batu Bronjong/Dam bangunan dibangun
					Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan	Panjang Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan
					Pembangunan Infrastruktur Kaw. Rawan Bencana	Pembangunan Infrastruktur Kaw. Rawan Bencana
	3. Meningkatnya cakupan air irigasi untuk daerah pertanian	1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi	Persentase wilayah cakupan irigasi yang terpenuhi		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase DI yang beririgasi teknis
					Pembangunan Saluran Irigasi	Panjang Saluran Irigasi yang dibangun
					Rehab/ peningkatan Jaringan Irigasi	Panjang saluran irigasi yang di Rehab/ peningkatan
					Pemeliharaan Rutin Irigasi	Irigasi yang dipelihara
					Perencanaan DAK Irigasi	Jumlah perencanaan DAK irigasi yang dikerjakan
	4. Meningkatkan pengelolaan pembangunan gedung.	1. Meningkatnya mutu dan umur teknis bangunan publik/ gedung pemerintah	Persentase gedung/ bangunan yang memenuhi standar layak fungsi		Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	jumlah pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum
					Pembangunan Kantor Lurah	Jumlah kantor lurah yang dibangun
					Rehab Kantor Lurah	Jumlah kantor lurah yang direhab
					Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi	Jumlah Kantor DPRD Kota Bukittinggi yang dibangun
					Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi	Jumlah rumah dinas Walikota Bukittinggi yang dibangun kembali
					Rehab Gedung Parkir Ex Gloria	Jumlah gedung parkir Ex Gloria yang direhab
					Rehab Balai Pemuda	Jumlah balai pemuda yang direhab
					Rehabilitasi/ Pembangunan Kembali Pasar Atas	Tersedianya dokumen sebagai acuan rehabilitasi/ pembangunan kembali Pasar Atas
					Revitalisasi Kawasan Jam Gadang	Kawasan Jam Gadang yang direvitalisasi
					Program Pengelolaan Pembangunan Gedung	Persentase gedung negara dan swasta yang laik fungsi
					Operasionalisasi Perda Bangunan gedung	Terlaksananya Operasionalisasi Perda Bangunan gedung
		2. Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi	persentase masyarakat yang membangun sesuai advice planning yang dikeluarkan		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
					Pembinaan Jasa Konstruksi	Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan
					Pembangunan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Jumlah SIM yang dibangun/ di update
					Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	Paket perencanaan pekerjaan fisik SKPD dengan nilai kecil dari 100.000.000 tersusun
					Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Jumlah dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBGN) Kota Bukittinggi yang tersusun
	6. Pemenuhan target universal access (sanitasi dan air bersih)	1. Pemenuhan kebutuhan air bersih	persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman
					Pembuatan Sumur Bor	Jumlah sumur bor yang dibuat
					Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Air Minum	Jumlah Sarana Air Minum yang dibangun dan direvitalisasi
					Pemeliharaan Sarana Air Minum	Jumlah sarana air minum yang dipelihara
					Pembangunan Sarana Sanitasi	Jumlah Sarana Sanitasi yang dibangun
					Pemeliharaan dan Revitalisasi Sarana Sanitasi	Jumlah Sarana Sanitasi yang dipelihara di direvitalisasi
					Pemberdayaan Sanitasi	Terlaksanannya Pemberdayaan Sanitasi
					Pembangunan toilet umum	Jumlah toilet umum yang dibangun
					Pembangunan iPLT dan IPAL	Jumlah IPLT dan IPAL yang dibangun
					Bantuan Pengujian Kualitas Air Baku Masyarakat	Jumlah Bantuan Pengujian Kualitas Air Baku Masyarakat yang terlaksana
					Pemipaan (SR) Masyarakat	Jumlah Pemipaan (SR) Masyarakat
					Operasi dan Pemeliharaan SPAM Panorama Baru	Terlaksanannya Operasi dan Pemeliharaan SPAM Panorama Baru
					Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kayu Kubu	Terlaksanannya Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kayu Kubu
					Operasi dan Pemeliharaan SPAM Labuah Batu (Bukit Apit)	Terlaksanannya Operasi dan Pemeliharaan SPAM Labuah Batu (Bukit Apit)
					Pamsimas	Terlaksanannya Pamsimas
		2. Pemenuhan drainase layak	Persentase drainase perkotaan yang layak		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik
					Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE			URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
							Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dipelihara
							Peningkatan Drainase	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang ditingkatkan
							Pengembangan model dralingmas (Drainase lingkungan berbasis masyarakat)	Terlaksanannya Pengembangan model dralingmas (Drainase lingkungan berbasis masyarakat)
3. MISI 3 : Meningkatkan penataan ruang kota serta mengendalikan dan mengarahkan perkembangan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota								
	1. Pengendalian dan pemanfaatan ruang kota	1. Peningkatan penataan ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang	Kesesuain pemanfaatan ruang kota				Program Perencanaan Tata Ruang	persentase penyediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah
							Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Terlaksanannya Pembuatan Keterangan Rencana Kota
							Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Jumlah Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak
							Pendamping Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Jumlah Perda RDTR tersusun
							Sosialisasi Perda RDTR Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda RDTR Kota Bukittinggi terlaksana
							Sosilaisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi terlaksana
							Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi terlaksana
							Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Jumlah penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi dilanjutkan
							Pengadaan cetak peta tata ruang	Tersedianya peta tata ruang
							Pendataan Bangunan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Terlaksanannya Pendataan Bangunan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
							Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang	Terlaksanannya Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang
							RTBL Kawasan Strategis	Jumlah RTBL kawasan strategis tersusun
							Studi penataan ruang daerah	Studi komparasi penataan ruang daerah yang dilaksanakan
							Penyusunan dan Pendataan Arsip – Arsip Tata ruang serta Digitalisasi Data	Jumlah Arsip dan digitalisasi data tata ruang yang tersusun dan terdata
							Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok	Jumlah kawasan Ngarai Sianok yang diidentifikasi dan dipetakan
							Sistem Informasi Tata ruang	Tersedianya sitem informasi tata ruang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
			Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan					Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap tata ruang
							Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	Jumlah kegiatan pengawasan/ pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan	
							Audit Pemanfaatan Ruang	Jumlah audit pemanfaatan ruang yang disusun	
							Pembuatan Bilboard Tata Ruang	Jumlah bilboard yang dibuat	
							Verifikasi dan penyelesain pengaduan masyarakat masalah bangunan	Jumlah Verifikasi dan penyelesain pengaduan masyarakat masalah bangunan	
4.	Misi 4 : Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka penyediaan informasi, penyelesaian masalah pertanahan , dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan								
	1. Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan	1. Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas	Persentase pelayanan pertanahan sesuai SOP					Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase ketersediaan informasi pertanahan
							Pembuatan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	Terlaksananya pembuatan aplikasi dan GIS tanah dan bangunan	
							Kegiatan Pembuatan Arsip Elektronik	Tersedianya arsip elektronik pertanahan	
							Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase optimalisasi penataan, penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah	
							Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Jumlah sertifikat tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan/ diterbitkan	
							Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	tersedianya tanah untuk kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	
			Sosialisasi Pengadaan Tanah	Terlaksananya sosialisasi pengadaan tanah					
		2. Selesaiinya konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah	Persentase konflik pertanahan pemerintah daerah diselesaikan					Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Kepastian hukum atas tanah aset daerah
							Kegiatan Penyelesaian Tanah Konsolidasi By Pass dan Masalah Tanah Masyarakat Lainnya	Masalah konsolidasi tanah by pass dan masalah tanah masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi ditujukan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi pelaksanaan urusan wajib bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan di Kota Bukittinggi yang sejalan dengan upaya pencapaian standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan.

Penetapan indikator harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016–2021.

Sesuai dengan Revisi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Bukittinggi tahun 2018–2021, indikator dan target kinerja yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu:

1. Jalan; dengan indicator Persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang dengan kondisi awal 85,20% dan ditargetkan 95% pada akhir RPJMD/renstra.
2. Air minum; dengan persentase cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman dengan kondisi awal 90,64% menjadi 100% pada akhir renstra.
3. Air limbah; dengan persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah (sanitasi) yang layak dengan target 100% diakhir perencanaan dengan kondisi awal 93,11%.
4. Regulasi dan informasi tata ruang; dengan Persentase penyediaan informasi dan regulasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah; dengan kondisi awal 40% menjadi 90% pada akhir renstra.
5. Tertib pemanfaatan ruang dengan persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan dengan kondisi awal 40% menjadi 80% pada akhir renstra
6. Permasalahan tanah yang dapat diselesaikan kondisi awal 80% menjadi 85% pada akhir renstra

Untuk melihat indikator dan target kinerja renstra yang direncanakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan (2016-2021) yang berkaitan dengan RPJMD dapat dilihat dalam table 6.1 berikut.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD

INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA TAHUN						KONDISI AKHIR RENSTRA
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Persentase jalan dengan kondisi baik/ sedang	85,20%			90%	92%	94%	95%	95%
2. persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	90,64%			97%	100%	100%	100%	100%
3. persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah (sanitasi) yang layak	93,12%			98%	100%	100%	100%	100%
4. persentase penyediaan informasi dan regulasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	40%			75%	80%	85%	90%	90%
5. persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	40%			60%	65%	70%	75%	80%
6. Persentase permasalahan tanah yang dapat diselesaikan	80%			82%	83%	84%	85%	85%

BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018 - 2021 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara SOPD, masyarakat dan dunia usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur dan penataan ruang perlu dilandasi dengan aturan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif melalui tahapan musrenbang dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Mengingat besarnya kebutuhan pendanaan untuk memenuhi sasaran-sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka diperlukan juga adanya dorongan untuk meningkatkan kemitraan dengan swasta dan masyarakat dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum. Dalam hal itu tugas pemerintah adalah menciptakan regulasi yang sehat, membangun iklim yang makin kondusif dan kompetitif, menguarngi resiko investasi, mendorong pengembangan inovasi dan teknologi, serta mendorong kompetisi antara lain dengan menciptakan tender yang kompetitif guna memperkuat perkembangan sektor swasta. Disisi lain optimalisasi manunggal sakato juga merupakan salah upaya yang perlu terus didorong untuk menciptakan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.

Dengan melaksanakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2018 - 2021 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja pelayanan ke PU an dan penataan ruang serta pertanahan dengan sebaik-baiknya, maka Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera dirasakan. Dengan demikian koordinasi dan integrasi secara vertikal maupun hoizontal yang semakin kuat pada penyelenggaraan pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran-sasaran yang ada bermanfaat untuk mendukung kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah dan mendukung sektor lainnya akan menjadi kenyataan.

Bukittinggi : 2017

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI**

Ir. OKTAVIANUS, MT.
NIP.19631030 199202 1 002

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2016-2021

KODE						URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN						INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output)						SAT.						DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN						TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																														TAHUN 2017				TAHUN 2018				TAHUN 2019				TAHUN 2020				TAHUN 2021				KONDISI AKHIR RENSTRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																														TA RG ET	Rp.			TA RG ET	Rp.			TA RG ET	Rp.			TA RG ET	Rp.			TA RG ET	Rp.			TA RG ET	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

					Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman kantor yang dibeli	paket	1	1	43.800.000	1	31.450.000	1	38.000.000	1	41.000.000	1	50.000.000	4	204.250.000
					Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat/koordinasi yang diikuti dan dihadiri	tahun	1	1	465.000.000	1	250.000.000	1	254.100.000	1	279.000.000	1	300.000.000	4	1.548.100.000
					Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS dibayar	orang	41	41	1.035.000.000	41	1.035.600.000	41	1.185.000.000	41	1.300.000.000	41	1.400.000.000	41	5.955.600.000
					Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Jasa pengamanan kantor yang dilaksanakan	Kantor (2 OPD)	1	1	197.000.000	1	197.000.000	1	238.370.000	1	262.207.000	1	285.000.000	1	1.179.577.000
					Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket yang di proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	paket	126	126	330.435.900	126	380.435.900	126	399.828.770	126	439.811.647	126	460.000.000	504	2.010.512.217
					Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Jumlah paket yang ditunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	paket	126	150	120.000.000	126	150.000.000	126	160.000.000	126	170.000.000	126	180.000.000	504	780.000.000
					Penunjang Operasional Kegiatan Ke PU an	Jumlah kegiatan lapangan yang dibayarkan honor/lembur	paket			-		-	1	181.500.000	1	199.650.000	1	210.000.000	3	591.150.000
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketsediaan bangunan dan parsarana pendukung		70		1.335.753.000	85	198.000.000	90	498.700.000	95	583.570.000	100	480.000.000	100	3.096.023.000
					Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	1	920.000.000	1	-	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	4	1.520.000.000
					Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Pagar, Garase, Taman dan Landscape	paket		3	235.753.000		-		-		-		-		235.753.000
					Pengadaan Peralatan Kantor	terlaksananya pengadaan peralatan kantor	paket	1	1	50.000.000	1	68.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	70.000.000	4	315.050.000
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional	unit	41		-	5	-	5	143.000.000	5	157.300.000			15	300.300.000
					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor dan Lanscape	gedung	1	1	130.000.000	1	130.000.000	1	145.200.000	1	159.720.000	1	160.000.000	1	724.920.000
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat ketsediaan pakaian dinas	%	100		-	100	14.000.000	100	169.400.000	100	186.340.000	100	200.000.000	100	569.740.000
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stel	145		-	110	14.000.000	110	169.400.000	130	186.340.000	130	200.000.000	480	569.740.000

						Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota dengan kondisi baik	Km	85		15.371.513.075	90	33.315.691.000	93	49.250.000.000	95	116.024.000.000	95	43.750.000.000	95	257.711.204.075
						Peningkatan Trotoar	Panjang Trotoar yang ditingkatkan	ruas		10	5.999.319.400	10	5.671.350.000	10	6.000.000.000	10	6.500.000.000	10	7.000.000.000	40	31.170.669.400
						Pembangunan Trotoar	Panjang Trotoar yang dibangun	ruas		6	1.910.698.000	5	1.952.458.000	5	2.500.000.000	5	3.000.000.000	5	3.500.000.000	20	12.863.156.000
						Peningkatan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang ditingkatkan	Km		2,2	5.424.963.950	5	16.686.275.000	5	22.000.000.000	5	25.000.000.000	5	27.000.000.000	20	96.111.238.950
						Pembangunan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang dibangun	Km				5	3.860.000.000	5	4.840.000.000	5	5.324.000.000	5		20	14.024.000.000
						Rehab Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang direhab	km				5	3.860.000.000	5	4.500.000.000	5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	20	18.360.000.000
						Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	unit		1	849.971.725	1	74.458.000	1	6.050.000.000						6.974.429.725
						Pembangunan Box Culvert	Jumlah Box Culvert yang dibangun/ ditingkatkan	paket	3	1	699.060.000			2	1.210.000.000						1.909.060.000
						Pengecoran bahu/badan jalan	Jumlah bahu/ badan jalan yang dicor	paket				1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	4	3.000.000.000
						Pembangunan Jalan Konsolidasi By Pass Kelurahan Pulau Anak Aia	Jalan Yang Dibangun	paket		1	200.000.000										200.000.000
						Pengedaman dan Pengecoran Bahu Jalan Simpang Empat By Pass Jln. Teja Sukmana	Dam yang dibuat dan bahu jalan yang dicor	paket		1	200.000.000										200.000.000
						Pemindahan Saluran dan Trotoar Simpang By Pass Surau Gadang	Pemindahan Saluran dan Trotoar Simpang By Pass Surau Gadang	paket		1	87.500.000										87.500.000
						Penyusunan DED Jalan 2 Jalur Jl. Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta	Jumlah DED yang disusun	paket						2	1.000.000.000						1.000.000.000
						Pembangunan Jalan 2 Jalur Jl. Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta	Jalan 2 jalur yang dibangun	paket								2	70.000.000.000				70.000.000.000
						Perencanaan DAK Jalan	Jumlah perencanaan DAK jalan yang dikerjakan	dolku men				1	461.150.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	4	1.811.150.000

						Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik	%	72		7.758.835.905	85	5.484.945.000	90	8.750.000.000	95	10.400.000.000	95	10.765.000.000	95	43.158.780.905
						Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun	M'	3000	2000	5.524.976.795	1500	3.926.000.000	2000	5.000.000.000	2000	6.000.000.000	2000	7.000.000.000	7500	27.450.976.795
						Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dipelihara	M'	2850	5700	235.477.685	5700	454.671.000	5700	1.000.000.000	5700	1.150.000.000	5700	1.265.000.000	22800	4.105.148.685
						Peningkatan Drainase	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang ditingkatkan	M'	1000	1200	1.998.381.425	5000	1.104.274.000	5000	1.500.000.000	5000	2.000.000.000	5000	2.500.000.000	20000	9.102.655.425
						Pengembangan model dralingmas (Drainase lingkungan berbasis masyarakat)	Terlaksanannya Pengembangan model dralingmas (Drainase lingkungan berbasis masyarakat)	Keg.						1	1.250.000.000	1	1.250.000.000			2	2.500.000.000
						Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pengamanan titik bahaya longsor	%	45		2.458.199.650	60	9.500.000.000	70	7.181.250.000	80	8.959.375.000	80	3.250.000.000	80	31.348.824.650
						Pemasangan Batu Bronjong/Dam bangunan	Batu Bronjong/Dam bangunan dibangun	paket				1	8.000.000.000	1	3.306.250.000	1	4.959.375.000			3	16.265.625.000
						Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan	Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan yang dibangun	paket		5	2.458.199.650	1	1.500.000.000	6	2.875.000.000	6	3.000.000.000	6	3.250.000.000	19	13.083.199.650
						Pembangunan Infrastruktur Kaw. Rawan Bencana	Pembangunan Infrastruktur Kaw. Rawan Bencana	titik						1	1.000.000.000	1	1.000.000.000			2	2.000.000.000
						Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase peningkatan kualitas jalan dari pemeliharaan	%	85		1.376.636.690	90	1.958.436.305	93	2.662.000.000	95	2.928.200.000	95	3.000.000.000	95	11.925.272.995
						Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Jalan Dalam Kota yang di rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin	bulan	12	12	532.812.320	12	937.200.130	12	907.500.000	12	998.250.000	12	1.000.000.000	48	4.375.762.450
						Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	Jumlah Jembatan Dalam Kota yang di rehabilitasi/dipelihara	unit	31	31	443.875.360	31	486.954.375	31	847.000.000	31	931.700.000	31	1.000.000.000	31	3.709.529.735
						Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Trotoar dalam kota yang di rehabilitasi/ pemeliharaan Rutin	bulan	12	12	399.949.010	12	534.281.800	12	907.500.000	12	998.250.000	12	1.000.000.000	48	3.839.980.810

						persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	40			70		85		100		100		100	-	
						Pembuatan Sumur Bor	Jumlah sumur bor yang dibangun	paket		1	200.000.000,00	1	30.000.000	1	550.000.000	1	605.000.000	1	700.000.000	4	2.085.000.000
						Pembuatan Sumur Bor dan Sambungan Rumah (SR)	Sumur Bor, Tower Air, dan Sambungan Rumah	paket		1	220.321.600,00		-		-		-		-		220.321.600
						Lanjutan Pembangunan Toilet Umum	Lanjutan Pembangunan Toilet UmumKawasan Wisata NgaraiMaaram dan Benteng Fort de Kock	paket		2	424.000.000,00		-		-		-		-		424.000.000
						Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Air Minum	Jumlah Sarana Air Minum yang dibangun dan yang direvitalisasi	paket					-	1	1.500.000.000					1	1.500.000.000
						Pemeliharaan Sarana Air Minum	Jumlah Sarana Air Minum yang dipelihara	paket					-	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.500.000.000
						Pembangunan Sarana Sanitasi	Jumlah Sarana Sanitasi yang dibangun								1	2.600.000.000			1	2.600.000.000	
						Pemeliharaan dan Revitalisasi Sarana Sanitasi	Jumlah Sarana Sanitasi yang dipelihara di direvitalisasi	paket					-	1	1.100.000.000	1	1.210.000.000	1	1.300.000.000	3	3.610.000.000
						Pemberdayaan Sanitasi	Terlaksanannya Pemberdayaan Sanitasi	paket					-	1	275.000.000	1	302.500.000			2	577.500.000
						Pembangunan Toilet Umum	Toilet Umum yang terbangun	paket			3	1.358.046.500								3	1.358.046.500
						Pembangunan IPLT dan IPAL	IPLT dan IPAL terbangun	unit					1		2.889.000.000	1	2.789.000.000			2	5.678.000.000
						Bantuan Pengujian Kualitas Air Baku Masyarakat	Bantuan Pengujian Kualitas Air Baku Masyarakat	paket					1	66.150.000	1	69.457.500				2	135.607.500
						Pemipaan (SR) Masyarakat	Pemipaan (SR) Masyarakat	SR		300	436.000.000			500	1.100.000.000	500	1.155.000.000			1000	2.691.000.000
						Operasi dan Pemeliharaan SPAM Panorama Baru	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Panorama Baru	SPAM	1	1	63.000.000,00			1	236.250.000	1	248.062.500	1	272.868.750	3	820.181.250
						Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kayu Kubu	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kayu Kubu	paket					1	236.250.000	1	248.062.500	1	272.868.750	3	757.181.250	
						Operasi dan Pemeliharaan SPAM Labuah Batu (Bukit Apit)	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Labuah Batu (Bukit Apit)	paket					1	236.250.000	1	248.062.500	1	272.868.750	3	757.181.250	
						Pamsimas	terlaksananya Pamsimas	paket					1	85.000.000						1	85.000.000

						Program Pengendalian Banjir	Persentase Pengurangan titik genangan	titik	8		644.628.110	4	253.842.150	2	1.431.250.000	2	1.739.375.000	0	-	0	4.069.095.260
						Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	Panjang Pengerukan Sungai / Kali	M'		200 0	344.638.385	200 0	253.842.150	200 0	431.250.000	200 0	474.375.000			600 0	1.504.105.535
						Pembuatan Sumur Resapan	Jumlah sumur resapan yang dibuat	unit		1	299.989.725			2	1.000.000.000	2	1.265.000.000			4	2.564.989.725
						Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum	%	65%		17.044.979.660	75	75.522.479.130	80	52.722.365.000	85	22.046.318.500	85	450.000.000	85	167.786.142.290
						Event-Event Daerah dan Nasional	Jumlah event daerah yang dilaksanakan	event	5	5	99.964.400	5	100.000.000	5	110.000.000	5	125.000.000	5	150.000.000	20	584.964.400
						Pembangunan Kantor Lurah	Jumlah kantor lurah yang dibangun	unit	3	7	5.221.254.740	1	19.400.000.000	1	1.150.000.000	1	1.265.000.000			3	27.036.254.740
						Rehab Kantor Lurah	Jumlah kantor lurah yang direhab	paket		3	841.496.000	1	70.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	10	1.811.496.000
						Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi	Jumlah Kantor DPRD Kota Bukittinggi yang dibangun	unit		1	149.599.610	1	16.288.337.630	1	47.277.365.000	1	15.891.318.500			1	79.606.620.740
						Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi	Jumlah Rumah Dinas Walikota Bukittinggi yang dibangun kembali	unit		1	5.712.024.425	1	6.507.141.500							1	12.219.165.925
						Pengembangan Rumah Dinas Wakil Walikota Bukittinggi	Rumah Dinas yang dikembangkan	unit		1	2.583.521.535		-								2.583.521.535
						Rehab Gedung Parkir Eks Gloria	Jumlah Gedung Parkir Eks Gloria yang direhab	unit		1	2.227.118.950	1	2.000.000.000							1	4.227.118.950
						Lanjutan Pemasangan Pagar Lintasan Pacuan Kuda Bukit Ambacang	Panjang Pagar Lintasan Pacuan Kuda	M'		200	210.000.000		-								210.000.000
						Rehab Balai Pemuda	Jumlah Balai Pemuda yang direhab	unit			-		-	1	1.150.000.000	1	1.265.000.000			2	2.415.000.000
						Rehabilitasi/Pembangunan Kembali Pasar Atas	Tersedianya dokumen sebagai acuan rehabilitasi/ pembangunan kembali Pasar Atas	doku men			-	4	6.165.000.000	1	2.735.000.000	2	3.200.000.000				12.100.000.000
						Revitalisasi Kawasan Jam Gadang	Kawasan Jam Gadang yang direvitalisasi	kegiat an			-	1	24.992.000.000								24.992.000.000
																				-	-

						Program Pengelolaan Pembangunan Gedung	% Gedung negara dan swasta yang laik fungsi	%			293.417.165	20	143.323.500	30	172.500.000	40	189.750.000	40	200.000.000	40	849.466.735
						Operasionalisasi Perda Bangunan gedung	Terlaksananya Operasionalisasi Perda Bangunan gedung	TABG/ SLF		18	143.893.235	18	143.323.500	18	172.500.000	18	189.750.000	18	200.000.000		849.466.735
						Penyusunan Ranperda	Jumlah RanPerda tersusun	ranper da		1	149.523.930										149.523.930
						Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase wilayah/ jalan dengan penerangan jalan lengkap	%			4.300.399.780	10 0	7.697.756.555	10 0	9.391.250.000	10 0	10.801.312.50 0	10 0	10.870.312.500	10 0	43.061.031.33 5
						Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Penerangan Jalan Umum yang dipelihara	bulan	12	12	399.999.940	12	439.756.555	12	484.000.000	12	532.400.000	12	600.000.000	48	2.456.156.495
						Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah	paket	6	5	600.399.840	6	878.000.000	6	726.000.000	6	798.600.000	6	800.000.000	24	3.802.999.840
						Revitalisasi Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang direvitalisasi	paket			-	6	2.750.000.000	6	3.025.000.000	6	3.025.000.000	6	3.025.000.000	24	11.825.000.000
						Pembayaran Listrik Rekening PJU	Rekening Listrik PJU yang dibayar	rekeni ng	12	12	3.300.000.000	12	3.630.000.000	12	5.156.250.000	12	6.445.312.500	12	6.445.312.500	48	24.976.875.000
						Program Pengaturan Jasa Konstruksi	persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI	%	10		115.809.775	40	249.275.000	80	450.000.000	75	501.000.000	85	410.000.000	85	1.726.084.775
						Pembinaan Jasa Konstruksi	Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Keg.	1	1	115.809.775	1	144.829.500	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	4	740.639.275
						Pembangunan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Jumlah SIM yang dibangun/ diupdate	SIM						1	100.000.000	1	121.000.000			2	221.000.000
						Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	Paket Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000 tersusun	paket	125			50	48.395.500	50	100.000.000	50	110.000.000	50	120.000.000	200	378.395.500
						Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Jumlah Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBGN) Kota Bukittinggi yang tersusun	doku men				5	56.050.000	5	100.000.000	5	110.000.000	5	120.000.000	20	386.050.000

						Program Perencanaan Pembangunan infrastruktur	tingkat ketersediaan dokumen pendukung perencanaan non DED	%	10		216.684.775			-			-		-	85	216.684.775
						Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	Paket Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000 tersusun	paket	125	44	24.838.250			-			-		-	0	24.838.250
						Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Jumlah Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBG) Kota Bukittinggi yang tersusun	dokumen		4	55.927.995			-			-		-	0	55.927.995
						Fasilitasi Kegiatan DAK Bidang ke PU an	Jumlah paket kegiatan yang difasilitasi	bidang		4	135.918.530			-			-		-		135.918.530
																					-
MISI 3 : MENINGKATKAN PENATAAN RUANG KOTA SERTA MENGENDALIKAN DAN MENGARAHKAN PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KOTA YANG BERKUALITAS DAN BERKESINAMBUNGAN SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA											1.882.905.120			2.926.935.740			2.573.100.000		2.728.410.000		1.815.000.000
						Program Perencanaan Tata Ruang	persentase penyediaan informasi dan regulasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	%	40%		1.585.679.245	75		2.461.428.805	80		1.945.100.000	85	2.059.610.000	85	1.050.000.000
						Pendamping Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Jumlah Perda RDTR tersusun	dokumen	1	1	400.037.830	1	200.000.000							1	600.037.830
						Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi terlaksana	paket				1	296.510.400	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	596.510.400
						Sosialisasi Perda RDTRK Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda RDTRK Kota Bukittinggi terlaksana	paket						1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000
						Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi	paket				1	146.609.400	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	446.609.400
						Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Jumlah penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi yang dilanjutkan	dokumen				1	299.111.180							1	299.111.180
						Pengadaan cetak peta tata ruang	Tersedianya peta tata ruang	peta	1	40	30.000.000	40	30.000.000							40	60.000.000
						Pendataan Bangunan	Terlaksananya Penataan Bangunan	dokumen		1	329.968.300			-			-		-		329.968.300
						Pendataan Bangunan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Terlaksananya Penataan Bangunan di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	dokumen	1			1	368.894.625							1	368.894.625

						Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang	Terlaksanannya Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang	jenis		12	250.000.000	1	90.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000			3	740.000.000
						RTBL Kawasan Strategis	Jumlah RTBL Kawasan Strategis tersusun	dokumen		1	441.498.450	1	590.000.000	1	798.600.000	1	878.460.000			3	2.708.558.450
						Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Terlaksanannya pembuatan keterangan rencana kota	krk	350	350	49.158.610	350	70.519.625	350	71.500.000	350	78.650.000			1050	269.828.235
						Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Terlaksanannya Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	sertifikat	60	60	85.016.055	60	101.716.930	60	154.000.000	60	169.400.000	60	200.000.000	240	710.132.985
						Studi penataan ruang daerah	Studi komparasi penataan ruang daerah yang dilaksanakan	keg.						1	121.000.000	1	133.100.000	1	250.000.000	3	504.100.000
						Penyusunan dan Pendataan Arsip - Arsip Tata Ruang Serta Digitalisasi Data	Terlaksanannya data tata ruang yang lengkap dan tertata	paket				1	225.415.000							1	225.415.000
						Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok	Terlaksanannya Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok	kegiatan				1	42.651.645							1	42.651.645
						Sistem Informasi Tata Ruang	Tersedianya sistem informasi tata ruang	paket						1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000
						Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat tertibkan	%	40%		297.225.875	65	465.506.935	70	628.000.000	75	668.800.000	75	765.000.000	75	2.824.532.810
						Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	Jumlah kegiatan Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	tahun	1	1	146.681.575	1	199.927.810	1	198.000.000	1	217.800.000	1	250.000.000	4	1.012.409.385
						Audit Pemanfaatan Ruang	Jumlah Audit Pemanfaatan Ruang yang disusun	dokumen	1		75.544.300	1	65.579.125	1	110.000.000	1	121.000.000	1	125.000.000	4	497.123.425
						Pembuatan Billboard Peringatan Dilarang Membangun diatas Lereng/ Tebing	Jumlah billboard yang dibuat	buah		15	75.000.000		-		-		-		-		75.000.000
						Pembuatan Billboard Tata Ruang	Jumlah billboard yang dibuat	buah				40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	50	250.000.000	170	850.000.000
						Verifikasi dan Penyelesaian pengaduan masyarakat masalah bangunan	Terlaksanannya Verifikasi dan Penyelesaian pengaduan masyarakat masalah tanah	keg.						1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	3	390.000.000

MISI 4 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFORMASI, PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN DAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PEMBANGUNAN						4.167.747.288		23.053.874.950		6.975.000.000		8.100.000.000		9.225.000.000		51.495.801.208
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase optimalisasi penataan, penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah	%	90		3.754.639.868	92	22.246.311.150	93	6.250.000.000	94	7.300.000.000	94	8.350.000.000	94	47.900.951.018	
Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Jumlah sertifikat tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan/ diterbitkan	sertifi kat		5	221.710.950	5	156.333.925	5	250.000.000	5	300.000.000	5	350.000.000	20	1.278.044.875	
Pengadaan Tanah Untuk Jalan	Tersediannya tanah untuk jalan menuju kantor DPRD	paket		1	33.089.293										33.089.293	
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	Tersediannya tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	paket		1	3.499.839.625	1	22.016.313.175	1	6.000.000.000	1	7.000.000.000	1	8.000.000.000	4	46.516.152.800	
Sosialisasi Pengadaan Tanah	Terlaksananya Sosialisasi Pengadaan Tanah	paket				1	73.664.050								73.664.050	
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanian	Persentase Kepastian hukum atas tanah aset daerah	%	80		387.286.390	82	532.787.790	83	600.000.000	84	650.000.000	84	700.000.000	84	2.870.074.180	
Kegiatan Penyelesaian Tanah Konsolidasi By Pass dan Masalah Tanah Masyarakat Lainnya	Masalah konsolidasi tanah by pass dan masalah tanah masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan	tahun		1	387.286.390	1	532.787.790	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	4	2.870.074.180	
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanian	Persentase ketersediaan informasi pertanian				25.821.030	55	274.776.010	70	125.000.000	85	150.000.000	90	175.000.000	90	724.776.010	
Pembuatan Sistem informasi geografis tanah dan bangunan milik Pemerintah kota Bukittinggi	Terlaksananya pembuatan aplikasi dan GIS Tanah dan Bangunan	kegiat an				1	247.289.830							1	247.289.830	
Kegiatan Pembuatan Arsip Elektronik	Tersedianya arsip elektronik pertanian	arsip		100	25.821.030	100	27.486.180	100	125.000.000	100	150.000.000	100	175.000.000	400	477.486.180	

Bukittinggi, 2017
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI

Ir. OKTAVIANUS, MT

NIP.19631030 199202 1 002

